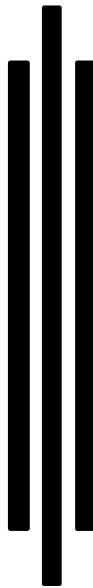




**PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
2025**



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program untuk jangka waktu tertentu, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks modal manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

- mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
 16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD Semesta Berencana.
 17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 18. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Semesta Berencana.
 19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
 21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- b. pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- e. BAB V PENUTUP.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.

- (4) evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN
2025-2029

Pasal 6

Perubahan RPJMD Semesta Berencana dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
- d. bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Semesta Berencana dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

RKPD Semesta Berencana tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI TABANAN,



Diundangkan di Singasana
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
: (3,45/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tahun memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, gender, ekonomi, politik, hukum dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kebutuhan perencanaan pembangunan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-10
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	II-13
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-65
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-74
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-144
2.2.1 Gambaran Pendapatan Daerah	II-139
2.2.2 Neraca Daerah	II-150
2.2.3 Gambaran Belanja Daerah	II-153

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-158
2.3.1 Permasalahan	II-158
2.3.2 Isu Strategis	II-171
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-187
3.1. Visi dan Misi	III-187
3.1.1 Visi	III-188
3.1.2 Misi	III-192
3.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029	III-194
3.1.4 Strategi Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-211
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-273
4.1 Rencana dan Indikasi Program Daerah	IV-273
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-313
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-313
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-317
BAB V PENUTUP	V-321
5.1 Kaidah Pelaksanaan	V-322
5.2 Pedoman Taransisi	V-323

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024.....	II-14
Tabel 2.2	Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB ADHK Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-18
Tabel 2.3	Status Daya Dukung Lahan Tahun 2023.....	II-21
Tabel 2.4	Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan & Air di Kabupaten Tabanan.....	II-23
Tabel 2.5	Status Air di Kabupaten Tabanan Tahun 2023.....	II-24
Tabel 2.6	Status Air di Kabupaten Tabanan Tahun 2045.....	II-24
Tabel 2.7	Status Pangan di Kabupaten Tabanan tahun 2023.....	II-25
Tabel 2.8	Status Pangan di Kabupaten Tabanan tahun 2045.....	II-26
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk, Persentase, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabanan.....	II-27
Tabel 2.10	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2024-2034.....	II-27
Tabel 2.11	Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-29
Tabel 2.12	Karakteristik Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tabanan 2022 - 2024.....	II-47
Tabel 2.13	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2024.....	II-48
Tabel 2.14	Jumlah dan Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024.....	II-49
Tabel 2.15	Jumlah Karya Warisan Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-50
Tabel 2.16	Sanggar Seni Terdaftar di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-52
Tabel 2.17	Situs Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-60

Tabel 2.18 Perkembangan Olahraga di Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023	II-63
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2.20 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-67
Tabel 2.21 Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-68
Tabel 2.22 Infrastruktur Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan	II-69
Tabel 2.23 Aplikasi Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan	II-70
Tabel 2.24 Data Aplikasi yang Aktif di Server Tabanan Command Centre (TCC) dan Hosting.....	II-71
Tabel 2.25 Alamat Website Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.....	II-72
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-75
Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Tabanan berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-76
Tabel 2.28 Ketersediaan Guru Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-77
Tabel 2.29 Kondisi Ruang Kelas SD di Sepuluh Kecamatan Di Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-78
Tabel 2.30 Ketersediaan Guru Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-79
Tabel 2.31 Kondisi Ruang Belajar SMP di Sepuluh Kecamatan Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-80
Tabel 2.32 Jumlah Siswa yang Dididik pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024.....	II-82
Tabel 2.33 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024	II-84
Tabel 2.34 Ketersediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024.....	II-87

Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-90
Tabel 2.36	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024.....	II-93
Tabel 2.37	Kondisi Drainase di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-94
Tabel 2.38	Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2024.....	II-95
Tabel 2.39	Kinerja Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024.....	II-97
Tabel 2.40	Jenis dan Jumlah PMKS/PSKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-99
Tabel 2.41	Jenis dan Jumlah PSKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-101
Tabel 2.42	Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-102
Tabel 2.43	Jenis dan Jumlah PMKS di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-103
Tabel 2.44	Evaluasi Capaian Kinerja.....	II-105
Tabel 2.45	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 (Audited).....	II-148
Tabel 2.46	Neraca Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 (Audited).....	II-150
Tabel 2.47	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-151
Tabel 2.48	Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2030.....	II-152
Tabel 2.49	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-156
Tabel 2.50	Penyimpulan Isu Strategis Daerah.....	II-175

Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2030.....	III-199
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.....	III-212
Tabel 3.3	Pentahapan Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.....	III-224
Tabel 3.4	Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029.....	III-264
Tabel 4.1	Rencana dan Indikasi Pendanaan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030.....	IV-274
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama.....	IV-314
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.....	IV-318

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	I-10
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Tabanan.....	II-14
Gambar 2.2	Peta Wilayah Metropolitan Sarbagita.....	II-16
Gambar 2.3	Proporsi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (ADHK Tahun 2010)...	II-17
Gambar 2.4	Peta Status Daya Dukung Lahan.....	II-21
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010....	II-30
Gambar 2.6	Indeks Rasio Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2024.....	II-31
Gambar 2.7	Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2017– 2024.....	II-32
Gambar 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024.....	II-33
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2021-2024.....	II-33
Gambar 2.10	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024.....	II-35
Gambar 2.11	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024.....	II-36
Gambar 2.12	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024.....	II-37
Gambar 2.13	Rapor Pendidikan Tahun 2023-2025.....	II-38
Gambar 2.14	Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-38
Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024.....	II-39
Gambar 2.16	Umur Harapan Hidup Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2021 – 2024.....	II-40
Gambar 2.17	Umur Harapa Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024.....	II-41

Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tabanan 2021-2024	II-42
Gambar 2.19	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	II-43
Gambar 2.20	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah).....	II-45
Gambar 2.21	Pengeluaran Riil Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024 (Ribu Rupiah).....	II-46
Gambar 2.22	Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Provinsi Bali Tahun 2023.....	II-65
Gambar 2.23	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II-66
Gambar 2.24	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024.....	II-145
Gambar 2.25	Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.....	II-146
Gambar 2.26	Perkembangan Pendapatan Daerah Berdasarkan Komponen Pendapatan Tahun 2020-2024.....	II-147
Gambar 2.27	Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024....	II-153
Gambar 2.28	Proporsi Belanja Tahun 2020-2024.....	II-154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya sebagai sebuah tahapan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Sebagai tahapan strategis, maka dalam penyusunannya dilakukan melalui tahapan dan proses yang sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan perencanaan yang menyeluruh, terpola dan terintegrasi dalam sistem perencanaan nasional sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Sistem perencanaan mengacu pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, keberadaan sistem perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Salah satu upaya mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan untuk mencapai tujuan bersama yaitu dengan pilkada serentak. Sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang 10 Tahun 2016, bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Berdasarkan hasil pilkada tersebut, kepala daerah terpilih di Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 adalah Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M, dan I Made Dirga, S.Sos, yang dilantik Presiden pada tanggal 20 Pebruari 2025 di Jakarta untuk masa bakti tahun 2025-2030. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan pasal 263 Undang-Undang 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Tabanan wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta dokumen perencanaan lainnya.

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 merupakan perencanaan tahap pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2045 dengan menekankan penguatan landasan transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola dengan memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang didukung sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan mewujudkan kesinambungan pembangunan

Pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang kaidah penyusunannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif; politis; atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Selain memperhatikan hal tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 memperhatikan daya dukung dan daya tampung, isu strategis prioritas serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan alternatif skenario yang diberikan. Secara khusus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merekomendasikan pengembangan dan pembangunan kewilayahan bercorak *conservationism* dengan mengutamakan sektor pertanian dan perkebunan sebagai keunggulan wilayah yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan wilayah namun tetap mengikutsertakan sektor pariwisata sebagai bonus keunggulan. Dengan demikian RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis yang kemudian dipedomani sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dengan kata lain, RPJMD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tabanan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 tgl 20 Agustus 2025, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN tahun 2025-2029, Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2045, RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Tabanan tahun 2023-2043.

Arahan RPJMN tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan. Strategi kewilayahan tidak saja mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup rencana intervensi pembangunan di tiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Arahan pembangunan 5 tahun ke depan disusun dalam bentuk *highlight* intervensi kebijakan dengan sasaran yang terukur untuk mencapai penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan sebagai perwujudan Visi Indonesia Tahun 2025-2029 **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Dalam kerangka kewilayahan Bali, posisi Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan wilayah metropolitan Denpasar, kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Bali (destinasi pariwisata regeneratif Bali) yaitu kawasan perdesaan *shiny* Tabanan, dan kawasan swasembada pangan, air, dan energi meliputi penataan kawasan Daerah Irigasi Tukad Yeh Hoo dan Bedugul.

Dalam hubungannya dengan arahan pembangunan nasional, pembangunan di Kabupaten Tabanan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan Bali yang menjaga keseimbangan alam, manusia dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan. Pembangunan alam Bali diarahkan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem alam Bali untuk menjadikan Bali yang kemandirian dalam pangan, energi, SDM Bali Unggul dan transformasi ekonomi Kerthi Bali. Haluan 100 Tahun Bali, kemudian di terjemahkan ke dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2045, RPJPD ini menekankan pada upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan transformasi, baik sosial, ekonomi dan tata kelola dengan berpedoman pada nilai-nilai pembangunan Bali yaitu Sat Kerthi, sebagaimana Visi RPJPD Bali yaitu **“Bali Dwipa Jaya : Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru”**

Sejalan dengan visi tersebut, RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2045 menekankan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat Tabanan melalui upaya transformatif yang berpijak nilai-nilai Sat Kerthi untuk menciptakan masyarakat Tabanan yang terpenuhinya hak-hak dasar masyarakatnya, terciptanya SDM Tabanan yang unggul, dan pembangunan ekonomi Tabanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan menuju Visi RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2045 **“Tabanan Maju dan Kerkelanjutan”**

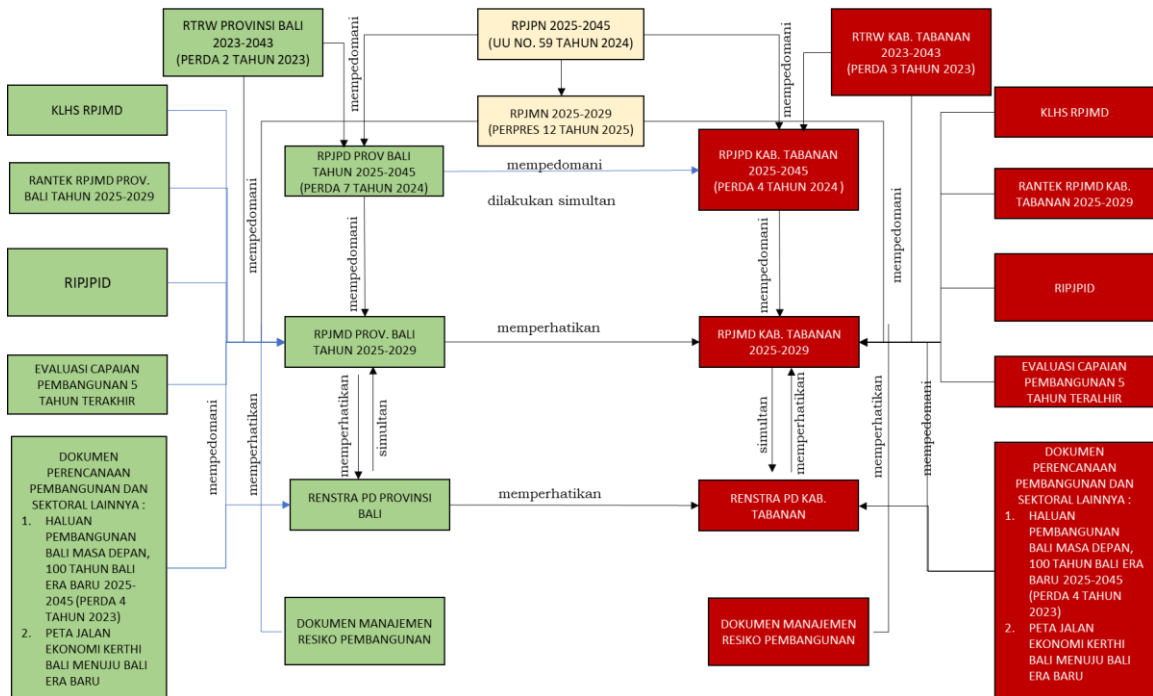
Sebagai tahap pertama pelaksanaan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2045, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali memberikan arahan pembangunan Tabanan untuk menjadi penopang utama dalam penyediaan pangan Bali dalam rangka mendukung ketahanan pangan Bali yang mengusung konsep pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, tahun 2025-2029 telah ditetapkan proyek strategis di Kabupaten Tabanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan Bali dan destinasi wisata yang berkualitas yaitu (1) Pembangunan/Pengembangan Kawasan Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, dan (2) Pembangunan Pusat Penyosohan Gabah dan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Tabanan

Selain memperhatikan arahan dokumen perencanaan tersebut, untuk mengintegrasikan antara dokumen perencanaan maka RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan tahun 2023-2043 yaitu (a) pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah yang berkelanjutan; (b) pengintegrasian pusat layanan yang merata, berhierarki dan terintegrasi dengan Pusat Kegiatan nasional (PKN) Kawasan Sarbagita dan Kawasan Perdesaan; (c). Peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan antar kawasan perdesaan, dan (d) peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah

yang mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD Semesta Berencana tahun 2025-2029 juga telah mempedomani arah kebijakan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 untuk menjawab isu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan meliputi isu akses kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, pengangguran, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, pencemaran lingkungan dan mitigasi resiko bencana. Sementara telaah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tabanan memberikan gambaran yang memberikan gambaran dan analisis pembangunan Tabanan lima tahun ke depan, dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir dan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang bersifat sektoral sebagai pijakan dalam menentukan target dan indikator pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan setiap tahunnya. RPJMD selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan manajemen risiko level kabupaten, sedangkan Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen risiko level perangkat daerah.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan terpilih tahun 2025-2029;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan selama tahun 2025-2029;
3. Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan daerah sekitar, Provinsi Bali dan Nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 terdiri dari 5 BAB yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN, akan memberikan gambaran singkat tentang latar belakang, dasar hukum, keterkaitan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Latar belakang, yang memberikan gambaran kondisi yang mendasari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodeisasi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan;
 - b. Dasar hukum, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029;
 - c. Hubungan antar dokumen, memberikan gambaran hubungan dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029;
 - d. Maksud dan tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029;
 - e. Sistematika penulisan, berisikan urian singkat tentang masing-masing BAB dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029;
2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum Kabupaten Tabanan 5 (lima) tahun terakhir dengan menyajikan data dan informasi dengan 4 (empat) aspek pembangunan yaitu:
 - a. Aspek Geografi dan Demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

- c. Aspek Daya Saing Daerah; dan
 - d. Aspek Pelayanan Umum.
3. BAB III VISI, MISI, PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, merupakan BAB yang menjelaskan makna visi, dan menetapkan misi untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan rumusan tujuan dan sasaran daerah dengan indikator yang jelas, dan terukur. Pada BAB ini juga menyajikan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah.
 4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, BAB ini menyajikan rencana perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030.
 5. BAB V PENUTUP, BAB ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

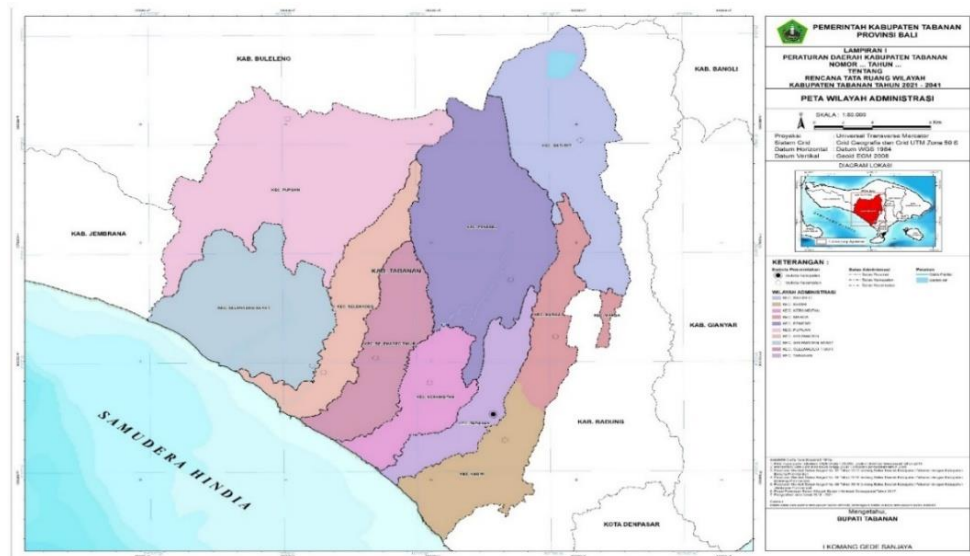
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan meliputi beberapa aspek antara lain: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 keberadaan Kabupaten Tabanan secara geografis terletak pada koordinat 8° 14' 30" - 8° 30' 07" Lintang Selatan dan 114° 54' 52"- 115° 12' 57" Bujur Timur. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tabanan 84.884 Ha (848,84 km²) atau 15,19 persen luas pulau Bali dengan batas administratif:

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Buleleng;
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Badung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng



Sumber: Perda 3 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Tabanan

Secara administratif, Kabupaten Tabanan terdiri dari sepuluh kecamatan yang terbagi dalam tiga zona yaitu Tabanan Utara meliputi Kecamatan Baturiti, Marga dan Penebel; Tabanan Selatan meliputi Kecamatan Tabanan, Kediri dan Kerambitan; dan Tabanan Barat meliputi Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat dan Pupuan. Jumlah desa sebanyak 133 desa, 349 desa adat serta 908 banjar adat. Lebih detailnya seperti disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Pakraman	Jumlah Banjar Adat	Luas Wilayah (±Ha)
1	Selemadeg	10	36	72	6.038,17
2	Kerambitan	15	28	95	4.684,02
3	Tabanan	12	12	94	4.367,16
4	Kediri	15	22	110	5.587,91
5	Marga	16	28	78	4.474,83
6	Baturiti	12	53	62	10.744,72
7	Penebel	18	72	143	14.356,92
8	Pupuan	14	24	90	17.648,73
9	Selemadeg Barat	11	37	82	10.853,33
10	Selemadeg Timur	10	32	82	6.127,77
	Jumlah	133	349	908	84.883,57

Sumber: Perda 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan 2023-2043

a. Posisi dan Peran Strategis Kabupaten Tabanan

Sebagai daerah dengan wilayah terluas ketiga di Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, Tabanan memiliki peran strategis bagi pembangunan Bali ke depan. Sebagian wilayahnya dilalui jalur arteri bagi distribusi barang dan jasa dari pulau Jawa menuju Denpasar sebagai pusat ibu kota Provinsi Bali. Infrastruktur jalan pada jalur arteri ini cukup memadai dengan terbangunnya beberapa *shortcut* yang menghubungkan Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng.

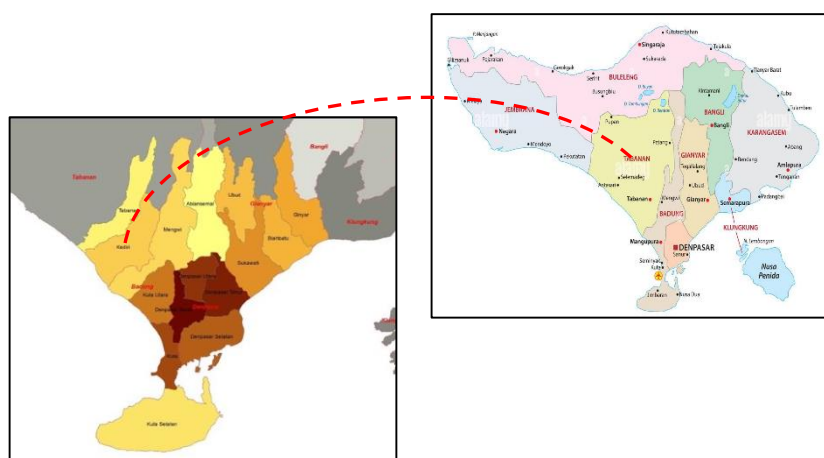
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti perkebunan rakyat, pertanian, pariwisata, industri, pertahanan dan keamanan dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Sesuai arahan RTRW Kabupaten Tabanan tahun 2023-2043, potensi perkebunan rakyat seluas 7.535 ha meliputi Kecamatan Baturiti, Penebel, Pupuan, Selemadeg, dan Selemadeg Barat.

Sementara Kawasan Pertanian terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan seluas 19.381 ha, dimana seluas 16.013 ha ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Berkelanjutan. Sedangkan Kawasan Hortikultura seluas 1.761 ha berada di 5 (lima) kecamatan yaitu Baturiti, Marga, Penebel, Pupuan, dan Selemadeg. Kawasan Perkebunan sendiri seluas 28.057 ha tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan.

Kawasan industri seluas 11 ha terdapat di Kecamatan Kerambitan. Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 3.468 ha terdapat di Kecamatan Baturiti, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan

Selemadeg Timur, dan Kecamatan Tabanan. Sementara Kawasan permukiman ditetapkan seluas 15.281 ha yang meliputi Kawasan Permukiman Perkotaan (7.666 ha) dan Kawasan Permukiman Perdesaan (7.613 ha). Untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdapat di 8 (delapan) kecamatan seluas 13 ha meliputi Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Penebel, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, dan Kecamatan Pupuan.

Selain itu, sebagian wilayah Tabanan yakni Kecamatan Tabanan dan Kediri telah ditetapkan sebagai kawasan Wilayah Metropolitan (WM) Sarbagita (Denpasar-Gianyar-Badung-Tabanan) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kawasan Sarbagita. Berikut peta kawasan Sarbagita.



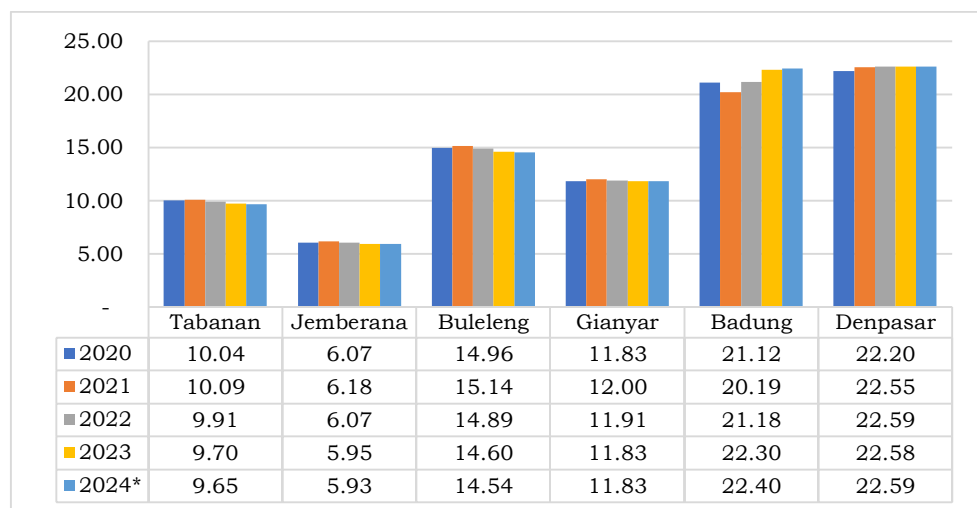
Sumber: Perda 3 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043

Gambar 2.2. Peta Wilayah Metropolitan Sarbagita

Selain itu, wilayah Tabanan bagian barat telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan kawasan perdesaaan prioritas nasional (KPPN) sebagai mana tertuang dalam RPJMN dengan cakupan wilayah yang terdiri dari 23

Desa di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat dan Pupuan.

Dari sisi PDRB, tahun 2020-2024 *share* PDRB Tabanan pada PDRB Bali berada pada posisi kelima setelah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Buleleng. Tren kontribusi PDRB Kabupaten Tabanan kecenderungannya mengalami penurunan, hal yang sama terjadi di Kabupaten Buleleng dan Jemberana, sedangkan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar lebih stagnan. Berikut tren proporsi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) tahun 2010 Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Gambar 2.3. Proporsi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (ADHK Tahun 2010)

Penurunan kontribusi PDRB Tabanan terhadap Bali tidak terlepas dari penurunan kontribusi sektor basis pembentuk PDRB, antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; serta sektor Jasa. Tahun 2024, PDRB Tabanan

sendiri didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian sebesar 3.336,53 milyar rupiah atau 22,31 persen, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 2.839,16 milyar rupiah atau 20 persen, serta sektor konstruksi sebesar 1.572,37 atau 9,37 persen. Selengkapnya kontribusi sektor pembentuk PDRB ADHK Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB ADHK Kabupaten
Tabanan Tahun 2020-2024

Kategori PDRB	PDRB Harga Konstan (Lapangan Usaha) (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.244,09	3.254,93	3.263,70	3.252,86	3.336,53
Pertambangan dan Penggalian	163,42	162,11	166,55	168,03	167,51
Industri Pengolahan	861,81	853,21	892,09	920,30	983,79
Pengadaan Listrik dan Gas	14,20	14,00	15,67	17,28	18,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	28,50	27,79	28,21	29,13	30,29
Konstruksi	1.583,71	1.473,56	1.505,79	1.530,92	1.572,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.334,54	1.327,27	1.384,16	1.453,92	1.504,45
Transportasi dan Pergudangan	247,56	231,04	246,06	268,26	281,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.236,74	2.033,41	2.276,55	2.531,61	2.839,16
Informasi dan Komunikasi	1.187,37	1.213,54	1.197,06	1.217,33	1.243,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	534,12	522,51	567,70	637,46	731,42
Real Estate	891,76	892,27	904,18	909,02	923,12
Jasa Perusahaan	157,83	152,31	162,44	169,65	184,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.292,07	1.309,31	1.247,26	1.251,42	1.272,37
Jasa Pendidikan	305,21	306,78	308,74	305,64	309,35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	415,87	436,40	440,69	448,56	454,76
Jasa Lainnya	309,83	305,13	333,58	360,73	383,32
PDRB	14.808,65	14.515,58	14.940,44	15.472,12	16.236,00

Sumber: BPS, Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2024, tahun 2025

b. Potensi Sumberdaya Alam

Topografi wilayah Kabupaten Tabanan memiliki tiga karakteristik berbeda. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia merupakan dataran rendah dengan topografi yang relatif datar, di bagian tengah bergelombang, dan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Adapun jenis tanah yang mendominasi Kabupaten Tabanan adalah jenis tanah andosol. Tanah ini berasal dari bahan induk abu dan tufa vulkan dengan fisiografi lungut vulkan kerucut dan lungur, dan bentuk wilayah berbukit sampai bergunung.

Tipe iklim Kabupaten Tabanan secara umum termasuk tipe AW, yang merupakan iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan November sampai Mei), dan adanya musim kemarau pada bulan April sampai September. Suhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74-77 persen dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155-3.292 mm. Kabupaten Tabanan mempunyai karakteristik hidrologi yang beragam sehingga secara relatif memiliki sumber daya air yang kaya dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Karakteristik hidrologi tersebut meliputi sungai, danau, mata air dan air tanah. Secara umum jenis sumber mata air dapat dikategorikan sebagai air permukaan dan air tanah.

Penggunaan lahan meliputi kawasan lindung terdiri dari badan air seluas 605 hektar, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa hutan lindung seluas 8.903 hektar, kawasan perlindungan setempat berupa kawasan kearifan lokal seluas 15 hektar, dan kawasan konservasi yang meliputi suaka alam seluas 723 hektar, serta kawasan pelestarian alam berupa taman

wisata alam seluas 376 hektar. Kawasan budidaya meliputi potensi kawasan perkebunan rakyat seluas 7.535 hektar, kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 19.381 hektar, kawasan hortikultura luasnya kurang lebih 1.761 hektar dan kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 28.057 hektar. Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 11 hektar, kawasan pariwisata seluas 3.468 hektar, kawasan permukiman yang terdiri dari permukiman perkotaan seluas 7,666 hektar dan permukiman perdesaan seluas 7.613 hektar, serta kawasan pertahanan dan keamanan seluas 13 hektar.

Tabanan memiliki potensi pertanian yang sangat besar baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Di sektor tanaman pangan komoditi utama terdiri dari padi, jagung, kedelai dan ubi jalar, sektor hortikultura komoditi utama adalah cabe, sayur hijau, bawang merah, kacang panjang, singkong, panili, kangkung, gonda, kedelai, mentimun, pare dan terong. Komoditi perkebunan terdiri dari kelapa, kopi, durian, manggis, salak, kakao, dan cengkeh. Sedangkan untuk komoditi sektor peternakan terdiri dari babi, sapi, kambing, ayam, itik, dan untuk perikanan komoditi utamanya ikan budidaya berupa ikan lele, nila, dan ikan hias.

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

➤ Daya Dukung Lahan

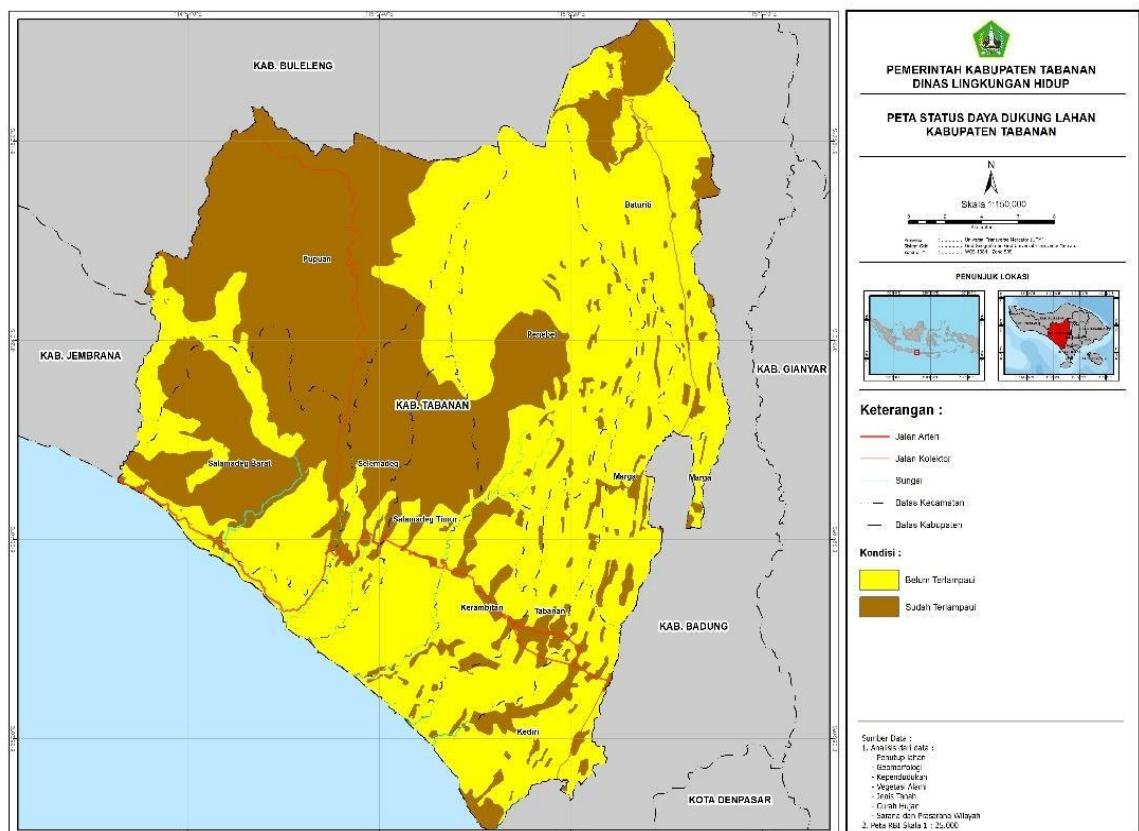
Secara umum daya dukung lahan di wilayah Kabupaten Tabanan berada pada kondisi belum terlampaui sebesar 50.592,44 Ha. Kondisi daya dukung lahan yang belum terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Penebel yakni sebesar 11.481,54 Ha. Sedangkan, untuk kondisi daya dukung lahan sudah terlampaui tertinggi berada di

Kecamatan Pupuan sebesar 13.486,18 Ha. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.
Status Daya Dukung Lahan Tahun 2023

Kecamatan	Daya dukung lahan (ha)		Luas Total
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
Baturiti	8.488,13	2.252,17	10.740,30
Kediri	4.307,74	1.241,20	5.548,94
Kerambitan	3.687,22	9.76,27	4.663,48
Marga	3.873,21	609,00	4.482,21
Penebel	11.481,54	2.879,04	14.360,58
Pupuan	4.169,44	13.486,18	17.655,62
Selemadeg Barat	4.450,47	6.375,13	10.825,60
Selemadeg Timur	3.496,46	2.621,40	6.117,86
Selemadeg	3.078,96	2.943,79	6.022,74
Tabanan	3.559,27	783,74	4.343,01
Grand Total	50.592,44	34.167,91	84.760,34

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tabanan 2024



Sumber: Perda 3 tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tabanan 2023-2043

Gambar 2.4. Peta Status Daya Dukung Lahan

➤ **Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan & Air**

Kebutuhan dan ketersediaan pangan dan air, terkait erat dengan kondisi fisik dan jumlah penduduk. Kecamatan dengan populasi lebih besar cenderung memiliki kebutuhan pangan dan air lebih tinggi. Selain itu, kondisi geografis seperti curah hujan dan ketersediaan lahan pertanian juga mempengaruhi ketersediaan pangan dan air. Misalnya, kecamatan yang terletak di dataran tinggi dengan banyak area pertanian cenderung memiliki ketersediaan pangan lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah yang kurang subur dengan sumber air terbatas memiliki tantangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Kecamatan Baturiti memiliki kebutuhan pangan sebesar 44.089.362.000 kalori per tahun dan kebutuhan air sebesar 90.388.719,77 meter kubik per tahun. Ketersediaan pangan di kecamatan ini adalah 26.413.077.712,40 kalori per tahun, sementara ketersediaan airnya mencapai 77.405.886,26 meter kubik per tahun. Kecamatan Kediri memiliki kebutuhan pangan sebesar 80.672.472.000 kalori per tahun dan kebutuhan air sebesar 80.058.651,99 meter kubik per tahun. Ketersediaan pangan di Kediri adalah 5.158.347.583,19 kalori per tahun dan ketersediaan air sebesar 50.163.722,55 meter kubik per tahun. Secara keseluruhan, total kebutuhan pangan di Kabupaten Tabanan adalah 385.726.770.000 kalori per tahun dan total kebutuhan air adalah 812.702.798,23 meter kubik per tahun. Ketersediaan pangan dan air di Kabupaten Tabanan masing-masing adalah 113.990.715.508,70 kalori per tahun dan 725.562.890,80 meter kubik per tahun. Ketersediaan sumber daya vital dalam konteks fisik dan demografis Kabupaten Tabanan menyoroti pentingnya

pengelolaan sumber daya yang efektif untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Tabel 2.4.
Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan & Air di Kabupaten
Tabanan

Kecamatan	Kebutuhan Pangan (kalori/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Ketersediaan Pangan (kalori/tahun)	Ketersediaan Air (m3/tahun)
Baturiti	44.089.362.000,00	90.388.719,77	26.413.077.712,40	77.405.886,26
Kediri	80.672.472.000,00	80.058.651,99	5.158.347.583,19	50.163.722,55
Kerambitan	37.633.428.000,00	63.503.510,82	9.764.167.936,10	48.201.246,38
Marga	23.427.432.000,00	55.385.258,60	785.300.364,22	53.911.936,01
Penebel	47.760.444.000,00	132.215.159,97	13.830.650.935,40	145.362.571,05
Pupuan	38.487.150.000,00	118.634.983,70	12.324.776.733,80	113.778.426,70
Selemadeg Barat	20.614.716.000,00	79.089.827,95	27.381.471.761,10	80.423.190,03
Selemadeg Timur	14.529.528.000,00	72202025,45	9.308.129.848,33	60.777.640,54
Selemadeg	22.946.778.000,00	62.268.851,24	7.706.173.361,32	50967855,65
Tabanan	55.565.460.000,00	58.955.808,72	1.318.619.272,84	44.570.415,64
Grand Total	385.726.770.000,00	812.702.798,23	113.990.715.508,70	725.562.890,80

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tabanan 2024

d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

➤ Status Air

Secara umum status air di wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2023 berada pada kondisi sudah terlampaui dengan luas total sebesar 46.222,36 Ha. Status air yang sudah terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Pupuan yakni sebesar 6.902,52 Ha. Sedangkan, untuk status air tahun 2023 yang belum terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Pupuan sebesar 10.753,10 Ha.

Tabel 2.5.
Status Air di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Kecamatan	Status air tahun 2023 (ha)		Luas Total
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
Baturiti	4.487,50	6.252,79	10.740,30
Kediri	560,06	4.988,87	5.548,94
Kerambitan	1.167,67	3.495,81	4.663,48
Marga	1.428,94	3.053,27	4.482,21
Penebel	8.309,80	6.050,78	14.360,58
Pupuan	10.753,10	6.902,52	17.655,62
Selamadeg	4.942,95	5.882,65	10.825,60
Selamadeg	2.993,00	3.124,86	6.117,86
Selemadeg	3.011,91	3.010,83	6.022,74
Tabanan	883,05	3.459,97	4.343,01
Grand Total	38.537,99	46.222,36	84.760,36

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tabanan 2024

Untuk status air tahun 2045 yang sudah terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Pupuan yakni sebesar 7.234,57 Ha. Demikian pula untuk status air tahun 2045 yang belum terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Pupuan sebesar 10.421,05 Ha.

Tabel 2.6.
Status Air di Kabupaten Tabanan Tahun 2045

Kecamatan	Status air tahun 2045 (ha)		Luas Total
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
Baturiti	4.030,03	6.710,26	10.740,30
Kediri	381,01	5.167,93	5.548,94
Kerambitan	973,63	3.689,86	4.663,48
Marga	1.318,18	3.164,03	4.482,21
Penebel	8.309,84	6.050,75	14.360,58
Pupuan	10.421,05	7.234,57	17.655,62
Selemadeg Barat	4.460,21	6.365,39	10.825,60
Selemadeg Timur	2.852,55	3.265,31	6.117,86
Selemadeg	2.630,10	3.392,64	6.022,74
Tabanan	788,55	3.554,46	4.343,01
Grand Total	36.165,15	48.595,21	84.760,36

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tabanan 2024

➤ Status Pangan

Secara umum status pangan pada tahun 2023 di wilayah Tabanan berada pada kondisi belum terlampaui dengan luas total sebesar 78951,74 Ha. Untuk status pangan yang belum terlampaui terbesar terletak di Kecamatan Pupuan 17.292,67 Ha. Sedangkan untuk status pangan tahun 2023 yang sudah terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Kediri sebesar 1.144,94 Ha.

Tabel 2.7.

Status Pangan di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Kecamatan	Status pangan tahun 2023 (ha)		Luas Total
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
Baturiti	10.119,07	621,23	10.740,30
Kediri	4.404,00	1.144,94	5.548,94
Kerambitan	4.130,47	533,01	4.663,48
Marga	3.821,48	660,74	4.482,21
Penebel	13.684,64	675,94	14.360,58
Pupuan	17.292,67	362,95	17.655,62
Selemadeg Barat	10.537,08	288,52	10.825,60
Selemadeg Timur	5.706,73	411,14	6.117,86
Selemadeg	5.701,28	321,46	6.022,74
Tabanan	3.554,32	788,69	4.343,01
Grand Total	78.951,74	5.808,61	84.760,36

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tabanan 2024

Untuk status pangan di tahun 2045, yang belum terlampaui terbesar terletak di Kecamatan Pupuan 16.383,29 Ha. Sedangkan, untuk status pangan tahun 2045 yang sudah terlampaui tertinggi berada di Kecamatan Baturiti yakni sebesar 2.096,16 Ha.

Tabel 2.8.
Status Pangan di Kabupaten Tabanan Tahun 2045

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2045 (ha)		Luas Total
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
Baturiti	8.644,13	2.096,16	10.740,30
Kediri	3.496,73	2.052,21	5.548,94
Kerambitan	3.554,22	1.109,26	4.663,48
Marga	3.477,52	1.004,70	4.482,21
Penebel	13.684,64	675,94	14.360,58
Pupuan	16.383,29	1.272,33	17.655,62
Selemadeg Barat	9.491,43	1.334,17	10.825,60
Selemadeg Timur	5.262,17	855,69	6.117,86
Selemadeg	4.616,51	1.406,23	6.022,74
Tabanan	3.166,62	1.176,39	4.343,01
Grand Total	71.777,26	1.2983,1	84.760,36

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tabanan 2024

e. Demografi

Kabupaten Tabanan memiliki jumlah penduduk sebanyak 478,39 ribu jiwa pada tahun 2024, terdiri dari 232,82 ribu jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 234,85 ribu jiwa penduduk perempuan atau dengan kata lain memiliki rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,3 (setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki).

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024 sebesar 0,90 persen. 5 (lima) kecamatan laju pertumbuhan penduduknya diatas 1 persen, 4 (empat) kecamatan laju pertumbuhan penduduknya dibawah 1 persen, dan 1 (satu) kecamatan mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk yaitu Kecamatan Kediri. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk, Persentase, Kepadatan, dan Laju
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabanan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (ribu jiwa)	Persentase terhadap penduduk Kabupaten Tahun 2024	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2024
1	Selemadeg	22,38	4,68	430	0,58
2	Selemadeg Timur	24,62	5,15	449	0,82
3	Selemadeg Barat	22,23	4,65	185	1,34
4	Kerambitan	43,52	9,10	1.026	1,03
5	Tabanan	77,31	16,16	1.504	0,35
6	Kediri	90,26	18,87	1.684	-0,06
7	Marga	45,09	9,42	1.006	1,25
8	Baturiti	52,68	11,01	531	0,63
9	Penebel	55,59	11,62	391	2,87
10	Pupuan	44,71	9,35	249	1,31
	Total	478,39	100,00	570	0,90

Sumber: BPS, Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2024, tahun 2025

Proyeksi kepadatan penduduk netto dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas kawasan terbangun (jiwa/ha). Pada tahun 2029, penduduk Kabupaten Tabanan diproyeksikan berada pada angka 468.553 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 0,64 persen per tahun. Data Proyeksi Penduduk Tabanan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.10.
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tabanan
Tahun 2024-2034

Kabupaten	2023	Pertumbuhan penduduk (%)	Proyeksi Penduduk Tabanan						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Tabanan	454.611	0,64	456.886	459.180	461.494	463.827	466.180	468.553	484.034

Sumber: RPIW Provinsi Bali Tahun 2025-2034

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebesar 44,21 persen. Artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 44 sampai 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari penduduk yang menjadi beban tanggungan, sebagian besar merupakan anak-anak usia balita dan sekolah (kelompok umur 0-14 tahun) sebesar 17,70 persen. Sementara sisanya 12,95 persen adalah beban tanggungan usia tua (kelompok umur 65 tahun ke atas).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Tabanan masih berada pada periode *window of opportunity* untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi pada dasarnya menghubungkan dinamika pertumbuhan penduduk dengan ekonomi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana suatu daerah memiliki tingkat *dependency ratio* terendah. Jika peluang tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka Tabanan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak menjadi beban tanggungan dibanding penduduk laki-laki. Sebesar 44,36 persen penduduk perempuan tidak produktif. Sementara penduduk laki-laki sebesar 44,07 persen. Demikian juga bila dilihat dari kelompok umur, penduduk perempuan pada kelompok umur 65 tahun ke atas (usia tua), lebih banyak menjadi beban tanggungan daripada laki-laki. Sedangkan pada usia anak-anak (umur 0-14 tahun), penduduk laki-laki lebih banyak menjadi beban dibanding perempuan.

Tabel 2.11.
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
di Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Rasio Usia Muda	18,33	17,09	17,7
Rasio Usia Tua	12,26	13,64	12,95
Dependency Ratio	44,07	44,36	44,21

Sumber: BPS, Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2024, tahun 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

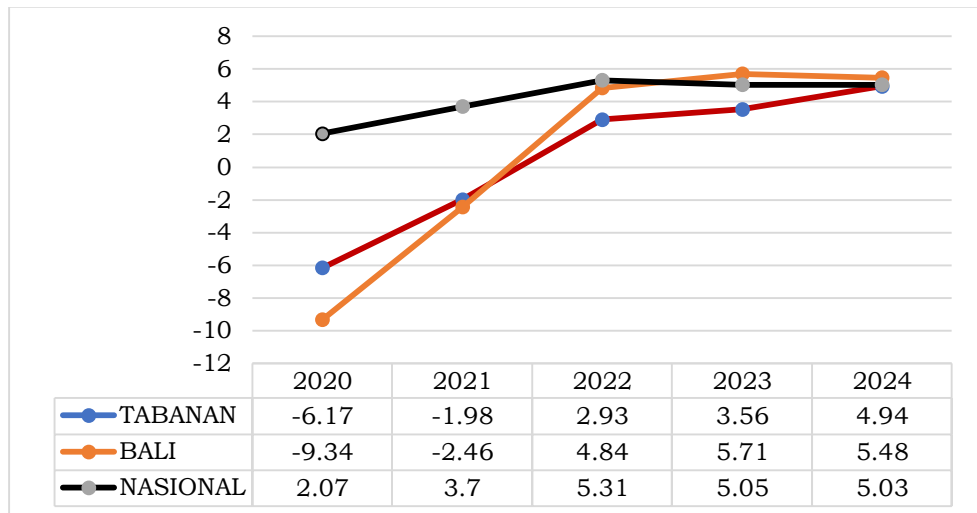
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi meliputi Pertumbuhan PDRB, Indek Gini dan Kemiskinan.

➤ Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil adalah pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun 2010. PDRB Kabupaten Tabanan tahun 2024 atas dasar harga berlaku mencapai 27.649,80 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 16.236,00 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan seri 2010 pada tahun 2024 sebesar 4,94 persen. Meskipun perekonomian Tabanan tiga tahun terakhir tumbuh positif, namun masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan Bali dan Nasional.



Sumber: Berbagai Sumber Diolah, 2025

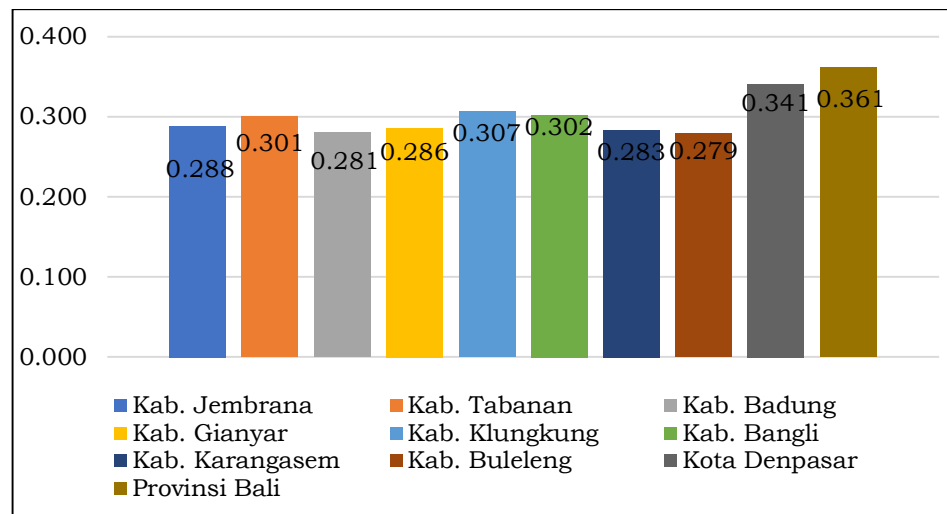
Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010

Dilihat dari lapangan usahanya, kategori sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tabanan tahun 2024 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 22,31 persen. Kategori lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Tabanan yaitu Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Kategori Konstruksi dengan besaran kontribusi masing-masing sebesar 20,00 persen dan 9,37 persen. Sementara jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Tabanan adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 60,76 persen. Komponen lain yang juga berkontribusi cukup tinggi terhadap PDRB Kabupaten Tabanan yaitu PMTB sebesar 18,73 persen.

➤ Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebesar 0,3007 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 0,347. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2023-2024 Pemerintah Kabupaten Tabanan

telah mampu melakukan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat.

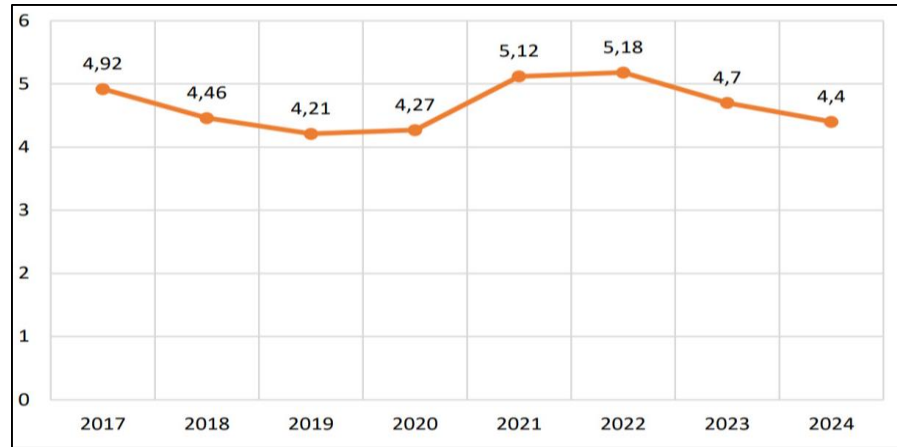


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Gambar 2.6. Indeks Rasio Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2024

➤ **Kemiskinan**

Kabupaten Tabanan telah berhasil secara konsisten menurunkan angka kemiskinan pasca pandemi covid-19. Angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan selama empat tahun terakhir. Tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan menurun menjadi 4,4 persen. Penurunan ini harus dipertahankan untuk mencapai target RPJMD 2021-2026 yaitu angka kemiskinan sebesar 4 persen di tahun 2026.



Sumber: BPS. Tabanan Dalam Angka 2025

Gambar 2.7. Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2017–2024

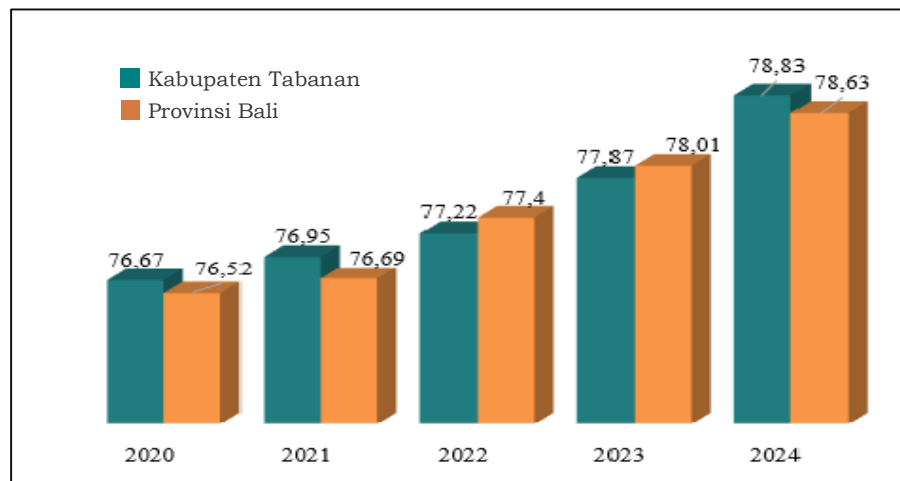
b. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

➤ **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tabanan terus mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. IPM Kabupaten Tabanan meningkat dari 76,67 pada tahun 2020 menjadi 77,87 pada tahun 2023 dan 78,83 pada tahun 2024. Angka IPM tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan termasuk dalam kategori IPM level tinggi. Jika dirata-ratakan selama kurun waktu 2020-2024, angka IPM Kabupaten Tabanan selalu lebih tinggi dari angka IPM Provinsi Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

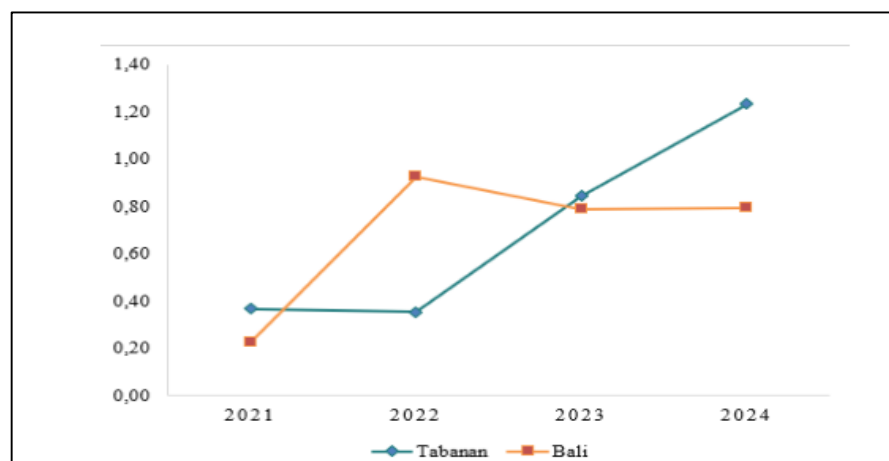
Angka IPM di Kabupaten Tabanan yang selalu mengalami peningkatan juga dibarengi dengan peningkatan kecepatan pembangunan manusia yang pada periode 2021-2024. Pertumbuhan IPM ini digunakan untuk mengukur kondisi kecepatan perkembangan dari pembangunan manusia di suatu daerah dalam kurun

waktu tertentu. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Tabanan kembali berjalan membaik dengan beralihnya status pandemi covid 19 menjadi endemi. Pencapaian IPM Kabupaten Tabanan tahun 2023-2024 yang sudah kembali di atas IPM Provinsi Bali, memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap fokus mempertahankan serta meningkatkan capaian pembangunan manusianya.



Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024. 2025

Gambar 2.8. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024



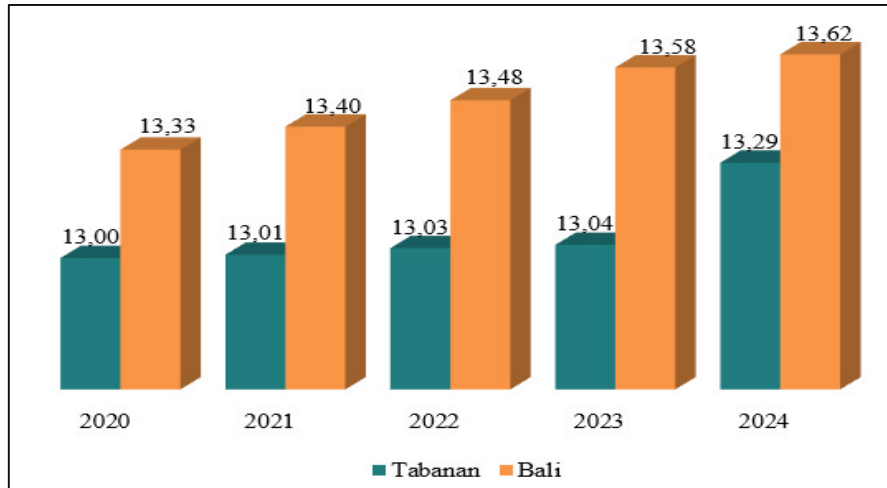
Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024. 2025

Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan IPM Kab. Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2021-2024

- Dimensi Pendidikan,

IPM pada dimensi Pendidikan diukur melalui dua indikator, yaitu indikator harapan lama sekolah (HLS) penduduk berusia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Tabanan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. HLS tersebut meningkat dari 13,00 menjadi 13,29 tahun, selama kurun tahun 2020-2024. Angka HLS tersebut berarti bahwa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Tabanan dengan usia 7 tahun ke atas di masa depan selama 13,29 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi jenjang diploma I. Namun demikian angka HLS tersebut masih dibawah rata-rata Provinsi Bali.

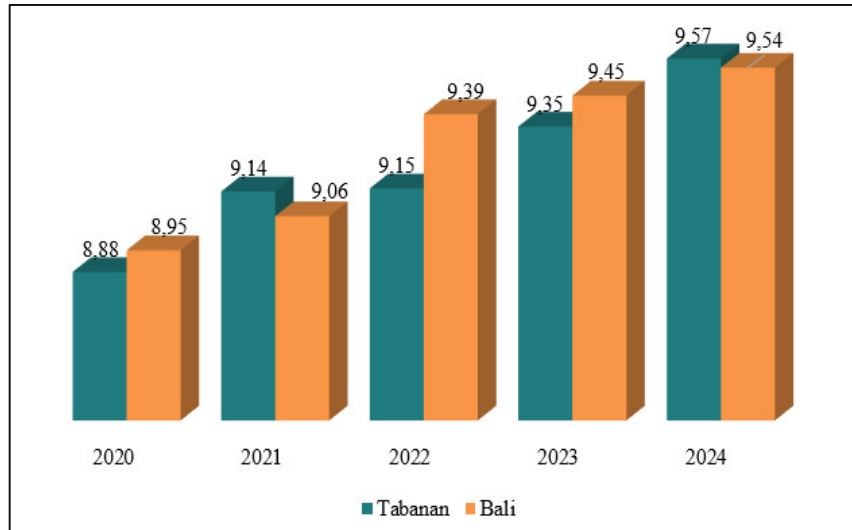
Peningkatan angka harapan lama sekolah ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Tabanan akan pentingnya pendidikan. Kondisi ini juga tercermin adanya program beasiswa dari pemerintah, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan adanya anggaran untuk program pemerintah lainnya terkait bidang pendidikan.



Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024. 2025

Gambar 2.10. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

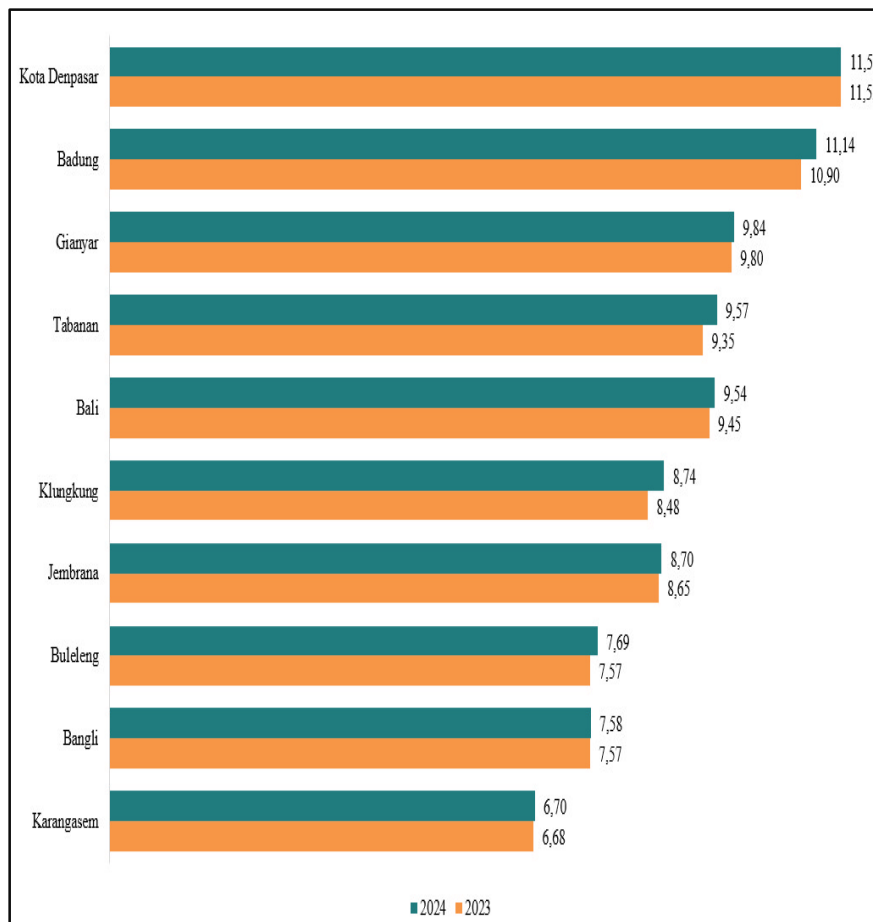
RLS merupakan indikator pendidikan yang memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. RLS dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk di suatu daerah yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk untuk bersekolah. Semakin lama penduduk bersekolah, maka semakin baik pula kualitas penduduk tersebut. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah, yaitu penduduk berusia 25 tahun ke atas. Selain itu, RLS dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.



Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024. 2025

Gambar 2.11. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

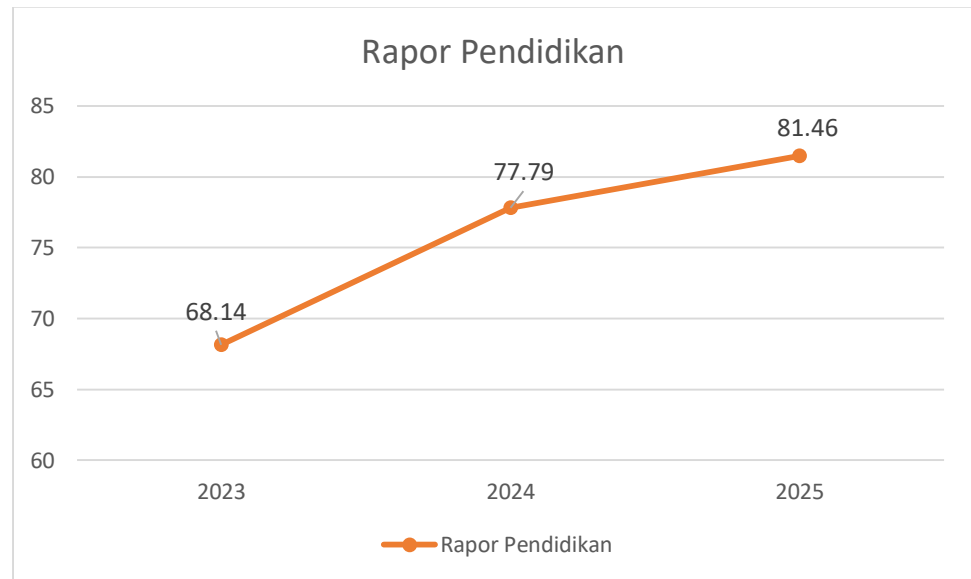
RLS tersebut meningkat dari 8,88 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,35 tahun pada tahun 2023 dan 9,57 tahun pada tahun 2024. Angka RLS 9,57 tahun tersebut berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tabanan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,57 tahun. Dengan kata lain, penduduk yang berusia 25 tahun ke atas tersebut telah menamatkan kelas IX SMP/ sederajat. Tahun 2024 RLS Kabupaten Tabanan lebih tinggi dari RLS Provinsi Bali. Kondisi tersebut menunjukkan capaian pembangunan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Tabanan sudah relatif baik dan sudah mencapai program wajib belajar (Wajar) 9 tahun. Namun capaian ini masih harus ditingkatkan jika melihat posisi Tabanan yang masih menempati peringkat keempat setelah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.



Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024, 2025

Gambar 2.12. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024

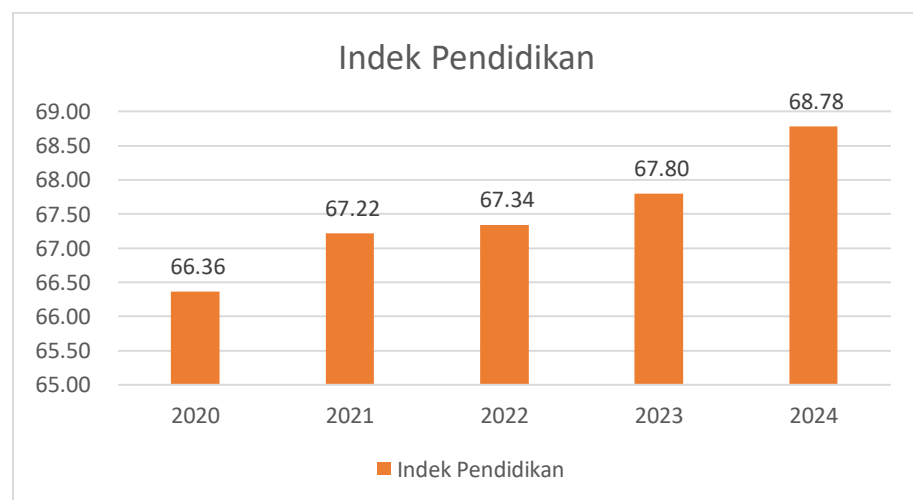
Selain memperhatikan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, kualitas pendidikan dapat diukur dari Indikator Rapor Pendidikan. Indikator ini digunakan untuk menampilkan kondisi satuan pendidikan yang pengukurannya dimulai sejak tahun 2022. Dari hasil penilaian, rapor pendidikan Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari tuntas pratama (68,14) tahun 2023 menjadi tuntas madya (81,46) tahun 2025.



Sumber: Dinas Pendidikan. Rapor Pendidikan 2023-2025

Gambar 2.13. Rapor Pendidikan Tahun 2023-2025

Selain itu, ukuran kualitas pendidikan disuatu wilayah dapat digambarkan dari Indeks Pendidikan. Capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan. Tahun 2020 capaian sebesar 66,36 meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 65,97 dan sampai tahun 2024 sebesar 68,78. Berikut capaian Indeks Pendidikan dari Tahun 2020-2024.



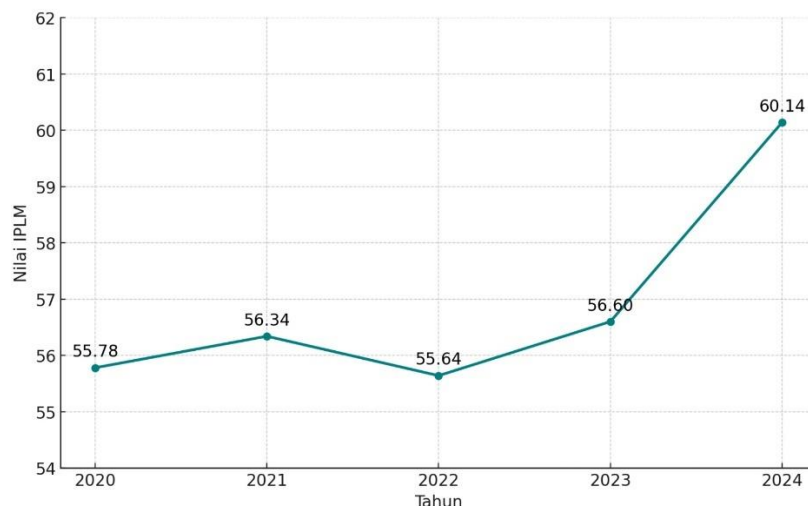
Sumber: Dinas Pendidikan. Indeks Pendidikan 2019-2024

Gambar 2.14. Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024

Dimensi pendidikan juga diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM adalah

alat yang penting untuk mengukur dan meningkatkan literasi masyarakat. Melalui pemahaman yang baik tentang IPLM, pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih literat, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Tabanan.

Peningkatan IPLM juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing masyarakat serta IPLM juga menjadi indikator untuk mengevaluasi usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan literasi Masyarakat.



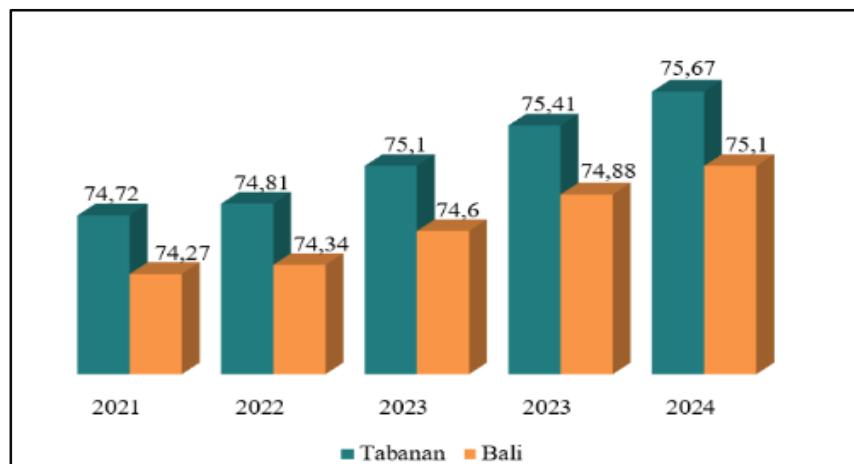
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip 2020-2024

Gambar 2.15. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024

- Dimensi Kesehatan,

Salah satu indikator IPM untuk mengukur tingkat kesehatan atau derajat kesehatan penduduk secara makro adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Kegunaan dari UHH yaitu untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pembangunan meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

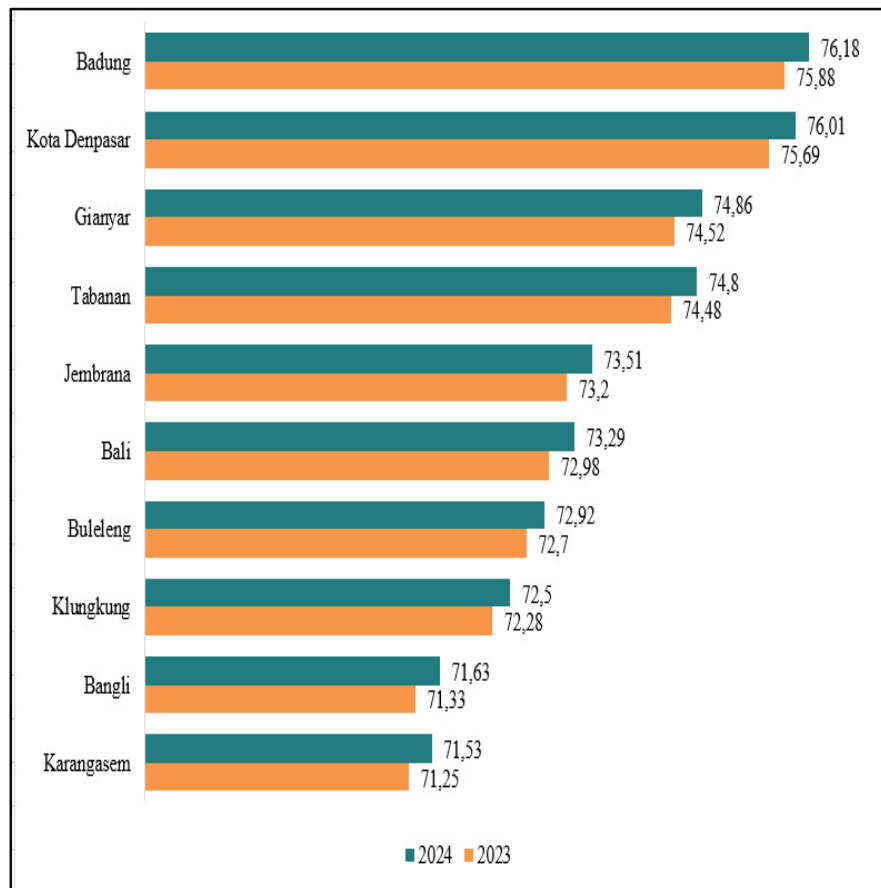
UHH Kabupaten Tabanan selalu meningkat dalam periode 2021 hingga 2024. UHH Kabupaten Tabanan juga selalu lebih tinggi daripada UHH Provinsi Bali. Kondisi peningkatan UHH di Kabupaten Tabanan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tabanan sudah relatif baik dan meningkat, sehingga secara tidak langsung kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tabanan juga sudah relatif semakin baik.



Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024, 2025

Gambar 2.16. Umur Harapan Hidup Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2021-2024

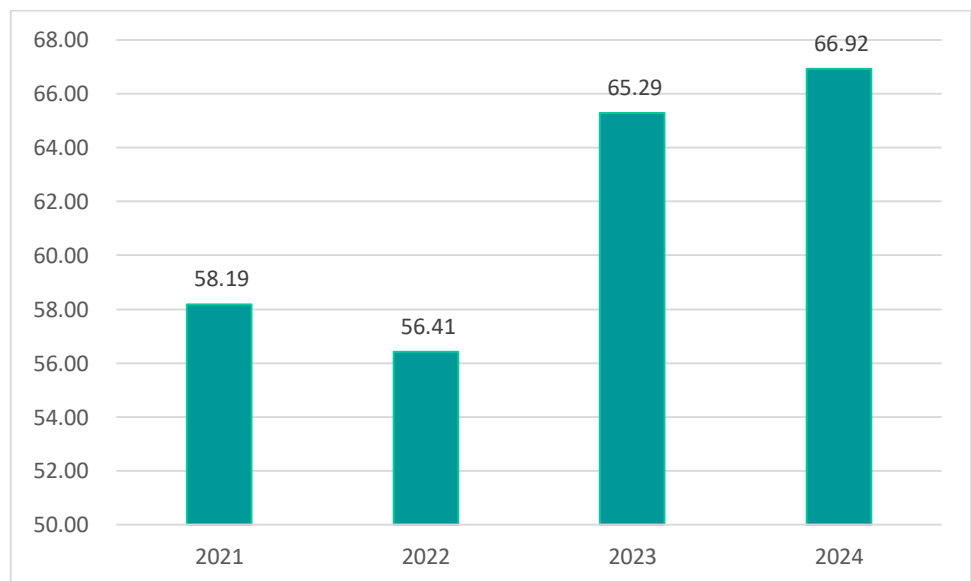
Apabila dibandingkan dengan UHH seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, UHH di Tabanan pada tahun 2023 hingga 2024 menempati peringkat keempat setelah Badung, Kota Denpasar dan Gianyar. Kondisi capaian pembangunan aspek kesehatan ini tentunya perlu ditingkatkan melalui lingkungan hidup atau pemukiman yang sehat, serta fasilitas kesehatan dan aksesnya sebagai komponen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan dan penurunan tingkat kesakitan (morbiditas) Tabanan.



Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024, 2025

Gambar 2.17. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024

Selain diukur dari UHH, Indeks Pembangunan Manusia juga didasarkan pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas keluarga. Indikator ini mencakup tiga dimensi utama: ketentraman (kualitas hubungan dalam keluarga), kemandirian (kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan), dan kebahagiaan (tingkat kepuasan anggota keluarga). Dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 capaian sebesar 58,19, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 56,41 dan pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat menjadi 65,29 dan 66,92.



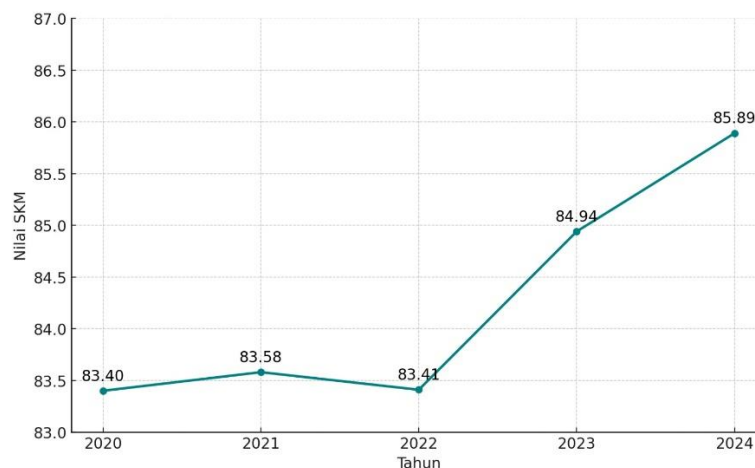
Sumber: Dinas Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan..
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tabanan 2021-2024

Gambar 2.18. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tabanan 2021-2024

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Kesehatan secara umum menunjukkan tren membaik selama lima tahun terakhir, terutama dalam

dua tahun terakhir yang mencatat peningkatan signifikan. Hal ini mencerminkan peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap layanan publik, yang bisa menjadi sinyal keberhasilan program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Meski pernah mengalami sedikit penurunan, arah tren menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas pelayanan mulai menunjukkan hasil nyata. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ini, pemerintah perlu konsisten dalam membangun sistem layanan yang berkelanjutan, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan 2020-2024

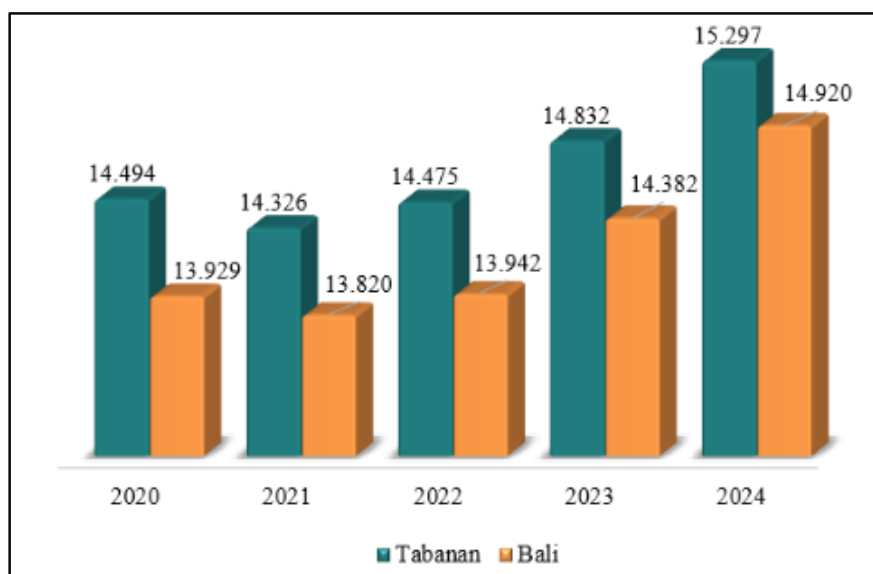
Gambar 2.19. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan

- Dimensi Ekonomi,

Dimensi dari komponen IPM yang merepresentasikan aspek ekonomi, yaitu standar kehidupan yang layak. Standar kehidupan yang layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya

kondisi ekonomi. Kesejahteraan bisa dicerminkan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diukur dengan pendekatan data pengeluaran, di mana data pengeluaran ini dikumpulkan dari data konsumsi makanan dan konsumsi nonmakanan yang mencerminkan daya beli masyarakat. Dalam perhitungan IPM, indikator pengeluaran diproksi dengan data pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*).

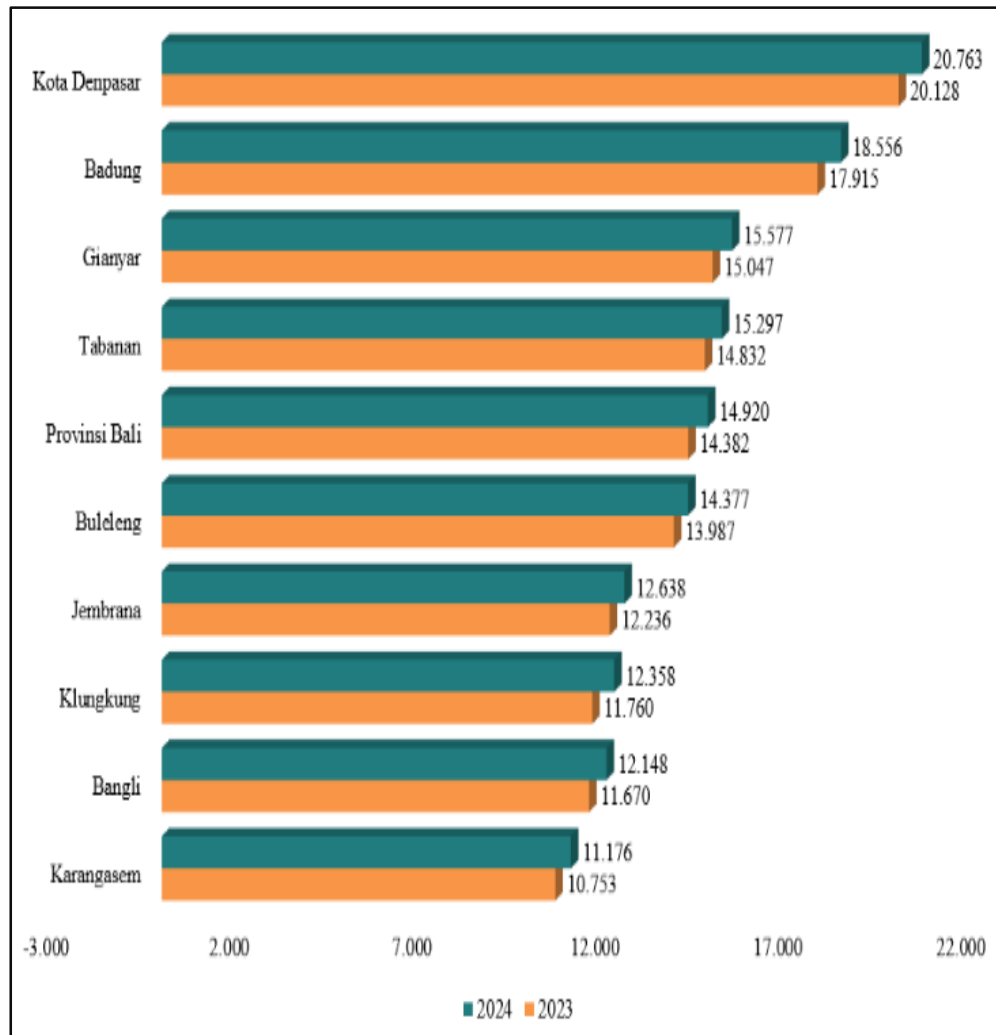
Selama periode 2020-2024, pengeluaran riil per kapita penduduk yang disesuaikan di Kabupaten Tabanan memiliki tren meningkat. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 14,49 juta menjadi 14,83 juta pada tahun 2023 dan 15,297 juta pada tahun 2024. Kondisi peningkatan pengeluaran perkapita yang disesuaikan ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin membaik. Namun, pada tahun 2020-2021, pengeluaran per kapita tersebut terus mengalami penurunan dari 14,49 juta menjadi 14,33 juta. Kondisi ini terjadi diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 di Indonesia dari tahun 2020-2022. Aktivitas perekonomian menjadi lumpuh dan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya, sehingga tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk juga menurun. Nilai pengeluaran riil per kapita pada tahun 2022-2024 telah menunjukkan peningkatan. Selain itu, nilai pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Tabanan ini selalu lebih tinggi dari pengeluaran riil per kapita Provinsi Bali pada periode 2020-2024.



Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024, 2025

Gambar 2.20. Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Ribuan Rupiah)

Apabila dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 menempati peringkat keempat setelah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar. Pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Tabanan sebesar 15,29 juta rupiah, lebih tinggi dari pengeluaran riil per kapita Provinsi Bali, yaitu sebesar 14,92 juta rupiah. Kondisi standar hidup ini tentunya perlu ditingkatkan agar tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tabanan dapat meningkat.



Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan 2023-2024, 2025

Gambar 2.21. Pengeluaran Riil Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024 (Ribu Rupiah)

➤ Ketenagakerjaan

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk usia kerja meningkat 0,4 persen. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 383.831 orang dan tahun 2024 menjadi 385.367 orang. Dari jumlah usia kerja di tahun 2024 tersebut, 75,29 persen termasuk dalam kategori angkatan kerja dan sisanya termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 74,16 persen. Hal ini menunjukkan

bahwa ketersediaan penduduk yang berpotensi untuk bekerja semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, persentase penduduk yang bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi pun mengalami peningkatan. Tahun 2024 penduduk yang bekerja tercatat 98,15 persen, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 97,36 persen. Untuk persentase pengangguran mengalami penurunan dari 2,64 persen menjadi 1,85 persen. Hal ini karena tersedianya lapangan pekerjaan baru terutama pada sektor pariwisata. Peningkatan angkatan kerja mengakibatkan persentase penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja menjadi menurun. Golongan ini meliputi penduduk yang masih bersekolah, sedang mengurus rumah tangga, dan aktivitas lainnya.

Tabel 2.12.
Karakteristik Penduduk Usia Kerja di Kabupaten
Tabanan 2022 - 2024

Uraian	2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Penduduk Usia Kerja	373.825	100	383.831	100	385.367	100
Angkatan Kerja	287.569	76,93	284.632	74,16	290.128	75,29
Bekerja	276.569	96,17	277.112	97,36	284.771	98,15
Pengangguran	11.000	3,83	7.520	2,64	5.357	1,85
Bukan Angkatan Kerja	86.256	23,07	99.199	25,84	95.239	24,71

Sumber: BPS Kabupaten Tabanan. 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tabanan nilainya fluktuatif selama kurun waktu 2022-2024. Pada tahun 2023, dimana merupakan tahun endemi covid-19, nilai TPAK mengalami penurunan. Pada tahun 2024, nilai TPAK mengalami peningkatan menjadi 75,29. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT), terus berhasil diturunkan. Dari tahun 2022 sebesar 3,83 persen, tahun 2023 sebesar 2,64 persen, dan tahun 2024 jadi sebesar 1,85 persen.

Kabupaten Tabanan yang merupakan daerah agraris, 24,01 persen mata pencaharian penduduknya bergantung dari usaha pertanian. Persentase penduduk di lapangan usaha pertanian sebesar 19,22 persen, lapangan usaha manufaktur 25,29 persen dan lapangan usaha jasa-jasa 55,49 persen. Demikian pula di Provinsi Bali, persentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian sebesar 18,02 persen, lapangan usaha manufaktur sebesar 22,66 persen, dan lapangan usaha jasa-jasa 59,32 persen.

Tabel 2.13.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2024

Lapangan Kerja Utama	Tabanan		Bali	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	54.747	19,22	480.420	18,02
Manufaktur	72.017	25,29	603.909	22,66
Jasa-Jasa	158.007	55,49	1.581.092	59,32
Total	284.771	100,00	2.665.421	100,00

Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabanan 2024. 2025

Tenaga kerja di Tabanan tahun 2024 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 49,15 persen. Sementara itu, sebanyak 33,84 persen dari total tenaga kerja merupakan pengusaha, dimana yang berusaha sendiri sebesar 17,19 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 13,87 persen, dan 2,78 persen berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Sementara itu, yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Tabanan adalah persentase pekerja keluarga/tidak dibayar yang

masih cukup besar, yaitu mencapai 13,27 persen. Pada umumnya, pekerja keluarga didominasi oleh kaum perempuan karena kebanyakan dari mereka membantu suami atau keluarganya untuk menjalankan usaha. Kelompok penduduk dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap disebut kelompok sektor formal, sedangkan sisanya tergolong dalam kelompok penduduk dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar, yang disebut juga dalam kelompok sektor informal. Selama tahun 2021-2024, hampir setengah kelompok status pekerja yang termasuk sektor informal. Khusus kelompok pekerja dengan status berusaha sendiri yang mengalami peningkatan di tiga tahun belakangan ini. Hal tersebut sekiranya mengindikasikan bahwa terjadi peralihan pekerja dari pekerja berstatus buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak bebas ke kelompok pekerja berusaha sendiri.

Tabel 2.14.

Jumlah dan Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024

Standar Pekerjaan	2022	2023	2024
Berusaha sendiri	39.614	50.307	48.942
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	54.299	42.515	39.504
Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	5.251	8.703	7.916
Buruh/Karyawan/pegawai	118.604	129.031	139.972
Pekerjaan bebas dipertanian dan non pertanian	11.820	15.847	14.356
Perkerjaan keluarga/tidak dibayar	46.981	30.709	37.801
Jumlah	276.569	277.112	284.771

Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab.Tabanan 2024. 2025

c. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

➤ Seni Budaya

Seni Budaya merupakan warisan dan sebagai wujud dari jati diri. Keberadaan seni dan budaya menjadikan Tabanan sebagai salah satu Kabupaten yang menghasilkan beberapa maestro seni salah satunya adalah I Ketut Marya melalui seni tari oleg tamulilingan, tari kebyar terompong, kebyar duduk, dan masih banyak lainnya. Dalam perkembangan seni dan budaya ditandai dengan berkembangnya sanggar seni di Kabupaten Tabanan begitu pula dengan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan dalam menjaga nilai-nilai warisan para leluhur sehingga menjadi kekayaan berupa budaya (*cultural capital*).

Dalam melestarikan adat, budaya dan seni di Bali, pemerintah Kabupaten Tabanan akan terus melaksanakan dan mendukung berbagai *event-event* festival budaya seperti Festival Singasana, Festival Ogoh-Ogoh, Lomba Gong Kebyar, sampai Festival Budaya Lokal di tingkat desa. Berikut beberapa jenis karya seni dan budaya yang ada di Tabanan.

Tabel 2.15.
Jumlah Karya Warisan Budaya di Wilayah
Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Etnis yang melaksanakannya	Nama Karya Budaya	Domain	Ket.
1	Kerambitan	Masyarakat Desa Kerambitan, Penarukan Kerambitan	Tektekan	Seni Pertunjukan	WBTB Indonesia
2	Tabanan	Masyarakat Desa Bongan Gede, Tabanan	Mesuryak	Budaya, perayaan	

No.	Kecamatan	Etnis yang melak sanakan	Nama Karya Budaya	Domain	Ket.
3	Tabanan	Masyarakat Desa Tunjuk	Tari Leko	Seni Pertunjukan	WBTB Indonesia
4	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Seni Bela Diri Tengklung	Seni Pertunjukan	
5	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Lumbung Glebeg	Kemahiran	
6	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Tradisi Keberan	Adat Istiadat	
7	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Samuan Barong	Adat Istiadat	
8	Tabanan	Masyarakat Br. Singin Selemadeg	Tari Andir	Seni Pertunjukan	
9	Tabanan	Masyarakat Desa Tunjuk Tabanan	Gending Gender Wayang	Seni Pertunjukan	
10	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Jukut Gonda	Kuliner	
11	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Tradisi Nyalcal	Ritus	
12	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Ritual Nerang	Ritus	
13	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Payas Madya Tabanan	Ketrampilan	
14	Tabanan	Masyarakat Tabanan	Payas Agung Khas Tabanan	Ketrampilan	
15	Kediri	Masyarakat Kediri	Ngerebeg Keris Ki Baru Gajah	Adat Istiadat	WBTB Indonesia
16	Kediri	Masyarakat Desa Pejaten	Keramik Pejaten	Kemahiran	
17	Kediri	Masyarakat Kediri	Okokan	Seni Pertunjukan	
18	Kediri	Masyarakat Desa Abiantuwung	Topeng Sidakarya	Seni Wali	Pengakuan Unesco
19	Marga	Masyarakat Desa Ole	Megandu	Tradisi	
20	Penebel	Masyarakat Desa Mangesta	The Beras Merah	Kemahiran	
21	Penebel	Masyarakat Desa Buruan	Joged Nini	Ritus	
22	Penebel	Masyarakat Br. Puluk- Puluk	Baris Memedi	Ritus	
23	Penebel	Masyarakat Desa Jatiluwih	Sistim subak	WBD	Pengakuan Unesco
24	Pupuan	Masyarakat Desa Pujungan	Mandolin	Seni Pertunjukan	
25	Pupuan	Masyarakat Desa Pupuan	Rejang Ayunan	Seni Pertunjukan	

No.	Kecamatan	Etnis yang melak sanakan	Nama Karya Budaya	Domain	Ket.
26	Pupuan	Masrakat Desa Pupuan	Baris Ketekok Jago	Seni Pertunjukan	
27	Pupuan	Masyarakat Desa Pupuan	Rejang Pulu	Seni Pertunjukan	

Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, tahun 2024

Tabel 2.16.
Sanggar Seni Terdaftar di Wilayah Kabupaten Tabanan
Tahun 2024

No.	Nama Sekaa	Alamat
1	Saronca	Bunyuh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti
2	Sanggar Demen	Perean, Desa Perean, Kecamatan Baturiti
3	Kerta Raharja	Br. Kukub, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti
4	Bhuana Sari Nadi	Br. Teguh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti
5	Suara Murti	Br. Angseri, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti
6	Gandawangi	Br. Apuan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti
7	Eka Yowana Santhi	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti
8	Serucuk Punyah	Br. Mayungan Anyar, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti
9	Werdha Budaya	Br. Mayungan Anyar, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti
10	Taksu Arya Bhuwana	Br.Dangin Jelinjing Belalang, Kecamatan Kediri
11	Sanggar Taksu Buana Agung	Br. Balu, Abiantuwung, Kecamatan Kediri
12	Sanggar Tirta Segara Manik	Br.Gegelang.Beraban, Kecamatan Kediri
13	Sanggar Kembang Ceraki	Br.Batugaing Kaja.Beraban, Kecamatan Kediri
14	Sanggar Taksu Yowana	Br.Beraban,Beraban, Kecamatan Kediri
15	Sanggar Tabuh Bandrang Mas	Br. Tanah Bang, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri
16	Sanggar Tari/Tabuh Puduk Harum	Br.Senapahan Kaja,Banjar Anyar, Kecamatan Kediri
17	Sanggar Tari Satya Hredaya	Br. Dalem, Pejaten, Kecamatan Kediri
18	Sanggar Tabuh Satya Hredaya	Br.Pejaten,Pejaten, Kecamatan Kediri

No.	Nama Sekaa	Alamat
19	Sanggar Seni Tari Dan Tabuh Rare Kumara Winangun	Br.Kebayan,Nyambu, Kecamatan Kediri
20	Kursus Tari Bali Budi Manik Mas	Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri
21	Sanggar Karawitan Cepaka Kuning	Br.Cepaka,Desa Cepaka, Kecamatan Kediri
22	Sanggar Seni Bina Suara Art	Br Lalangpasek,Desa Cepaka, Kecamatan Kediri
23	Sanggar Gong Semar Pegulingan	Br, Puseh,Kediri, Kecamatan Kediri
24	Sanggar Okokan Brahma Diva Kencana	Br,Delod Puri,Kediri, Kecamatan Kediri
25	Sanggar Tabuh Sari Winangun	Br.Bengkel Gede,Bengkel, Kecamatan Kediri
26	Sanggar Tari Sekar Ayu	Br. Laing, Pandak Bandung, Kecamatan Kediri
27	Sanggar Seni Satu Padu	Br. Laing, Pandak Bandung, Kecamatan Kediri
28	Sanggar Panes Tis Buah Dayuh	Br.Kelakahan Gede,Buwit, Kecamatan Kediri
29	Sanggar Sekaa Batel Deloduma	Br.Deloduma,Buwit, Kecamatan Kediri
30	Sanggar Gende Genta Mas Cita	Br.Deloduma,Buwit, Kecamatan Kediri
31	Sanggar Tari Nila Brahma	Br.Kelakahan Gede,Buwit, Kecamatan Kediri
32	Sanggar Seni Murdha Manik	Banjar Adat Pilisan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
33	Sanggar Dharma Widya Santana	Banjar Suralaga, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri
34	Sanggar Genta Budaya	Br. Dinas Dauh Jalan, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan
35	Sanggar Tari Kawi Tantra	Br. Carik, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan
36	Sanggar Seni Sekar Mas	Br. Kesiut Kawan Kaja, Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan
37	Sanggar Semara Ayundia	Br. Kesiut Tengah Kaja, Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan
38	Sanggar Tari Dan Gender Sucipa Naya	Br. Sambian Pondok, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan
39	Kempli Besar	Br.Dinas Wani, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan
40	Seni Nihita Prayoga Adhi Kara	Br. Dinas Wani Kawan, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan
41	Suara Cita	Br. Dinas Tengah Kangin, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan
42	Sanggar Tari Semara Ratih	Br. Dinas Tengah Kawan,Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan
43	Sanggar Tari Semara Ratih	Br. Dinas Tengah Kawan,Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan

No.	Nama Sekaa	Alamat
44	Sanggar Manik Mas	Br. Dinas Tengah Kawan, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan
45	Sanggar Kopang	Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan
46	Sanggar Tabuh Merdu Sura	Br. Dinas Tegaltamu Kaja, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan
47	Sanggar Tari Taksu	Br. Dinas Tibubiu Kaja, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan
48	Sanggar Tari Gopal	Br. Dinas Samsam Ii. Desa Samasam, Kecamatan Kerambitan
49	Sanggar Seni Witning Tresna	Br. Dinas Kutuh Kelod. Desa Samasam, Kecamatan Kerambitan
50	Sanggar Seni Werdi Sanggita	Br. Dinas Samsam I. Desa Samasam, Kecamatan Kerambitan
51	Sanggar Tari Semara Ayundia	Br. Dinas Baturiti Tengah, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan
52	Sanggar Tari Loka Pala	Br. Dinas Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan
53	Sanggar Tari Tangkas Kumara	Br. Dinas Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan
54	Sanggar Seni Tabuh Tri Yowana Sandhi	Br. Dinas Baturiti Tengah, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan
55	Sanggar Seni Musik Tri Rajuna Reborn	Br. Dinas Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan
56	Sanggar Seni Tabuh Werdhi Kencana	Br. Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan
57	Yayasan Lilanjani	Br. Belumbang Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan
58	Pkk Cempaka Putih	Br. Dinas Batuaji Tengah, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan
59	Kesenian Jaya Winangun	Br. Dinas Penulisan, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan
60	Sanggar Tabuh Mercusuar	Br. Dinas Kukuh Kangin, Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan
61	Sanggar Tari Taksu Buana	Br. Dinas Kukuh Kangin, Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan
62	Sanggar Tari Seriwidiani	Br. Dinas Kukuh Kelod, Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan
63	Sanggar Tari Tabuh Pucil Asem	Br. Dinas Sembung Meranggi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan
64	Sanggar Tari Adi Santi	Br. Dinas Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan
65	Sanggar Semar Pagulingan Seni Genta Wisesa	Br. Dinas Seribupati, Kecamatan Marga
66	Sanggar Tari Pondok Seni	Br. Dinas Seribupati, Kecamatan Marga
67	Sanggar Semar Pegulingan Putra Komala Giri	Br. Dinas Padangaling, Kecamatan Marga
68	Sanggar Semar Pegulingan Komala Giri	Br. Dinas Padangaling, Kecamatan Marga

No.	Nama Sekaa	Alamat
69	Sanggar Tari Krisna Budaya	Br. Dinas Cau Belayu, Kecamatan Marga
70	Putra Mas Baru	Banjar Baru, Kecamatan Marga
71	Jatayu Sabda Sudaram	Desa Tua, Kecamatan Marga
72	Sekar Ayu	Br. Dinas Peken, Kecamatan Marga
73	Saren Lango	Br. Dinas Peken, Kecamatan Marga
74	Sekaa Tari Telek Giri Sari	Br. Dinas Gunung Siku, Kecamatan Marga
75	Taksu Dedari	Br. Dinas Umabian, Kecamatan Marga
76	Sanggar Pusvita	Br. Dinas Lodalang, Kecamatan Marga
77	Sarining Sunari	Br. Dinas Anyar, Kecamatan Marga
78	Sanggar Agung	Br. Dinas Belamban, Kecamatan Marga
79	Sanggar Art Nya	Br. Dinas Belamban, Kecamatan Marga
80	Cakrabyuha	Br. Basa, Kecamatan Marga
81	Sanggar Budi Manik Mas	Br. Dinas Bunutin, Kecamatan Marga
82	Sanggar Seni Eka Satya Budaya	Br. Dinas Kuwum Mambal, Kecamatan Marga
83	Sanggar Cahaya Eka Radja	Br. Bunutin, Kecamatan Marga
84	Sanggar Budhi Manik Mas	Br. Bunutin, Kecamatan Marga
85	Sekar Mas	Petiga Kangin, Kecamatan Marga
86	Wintang Rare	Br. Dinas Ole, Kecamatan Marga
87	Janggari Bali Seni	Selanbawak Kaja, Kecamatan Marga
88	Sanggar Seni Ascarya	Br.Dinas Kelembang, Desa Rejasa, Kecamatan Penebel
89	Sanggar Seni Swara Purnaming Kauripan	Br.Dinas Rejasa Kaja, Kecamatan Penebel
90	Sanggar Rwa Bhineda	Br.Dinas Tegallingah Kaja, Desa Tegallingah, Kecamatan Penebel
91	Kawiswaran	Br.Dinas Kupang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel
92	Swara Jineng	Br.Dinas Ubung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel
93	Sanggar Giri Kedaton Sari	Br. Piling, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel

No.	Nama Sekaa	Alamat
94	Sanggar Seni Sabda Kerthi	Br. Wongaya Betan, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel
95	Sanggar Mayong Swara	Br.Dinas Munduk Juwet, Desa Pesagi, Kecamatan Penebel
96	Sanggar Gita Maha Swara	Br.Dinas Temukuaya, Desa Pesagi, Kecamatan Penebel
97	Sanggar Cipta Darma	Br.Dinas Sigaran, Desa Jegu, Kecamatan Penebel
98	Sanggar Tari Warok	Br.Dinas Cepag, Desa Jegu, Kecamatan Penebel
99	Sanggar Mudra Gita Cundamani	Br.Dinas Jegu Baleagung, Desa Jegu, Kecamatan Penebel
100	Sanggar Aji Swaram	Br.Dinas Cepag, Desa Jegu, Kecamatan Penebel
101	Sanggar Tari Tandang Apsari	Br.Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan, Kecamatan Penebel
102	Sanggar Tari Bali Asri	Br.Dinas Penatahan, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel
103	Sanggar Seni Swara Kanti	Br.Dinas Penatahan Kelod, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel
104	Sanggar Seni Joged Truna Jaya	Br.Dinas Tegayang, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel
105	Sanggar Tari Lestari	Desa Adat Bubugan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel
106	Sanggar Seni Sekar Harum	Br.Dinas Senganan Kangin, Desa Senganan, Kecamatan Penebel
107	Yayasan Bina Kumara	Br.Dinas Bubugan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel
108	Psn Desa Senganan	Desa Senganan, Kecamatan Penebel
109	Sanggar Seni Giri Kusuma	Desa Adat Soka, Desa Senganan, Kecamatan Penebel
110	Sanggar Seni Sekar Ibing	Br.Dinas Kesambahan Kaja, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel
111	Sanggar Sudamala Swara	Br.Dinas Cacab Jangkahan, Desa Biaung, Kecamatan Penebel
112	Sanggar Seni Anggrek Bulan	Br.Dinas Cacab Jangkahan, Desa Biaung, Kecamatan Penebel
113	Sanggar Seni Candra Agung	Br.Dinas Babahan Kawan, Desa Biaung, Kecamatan Penebel
114	Sanggar Seni Astagina Art Space	Banjar Biaung Kaja, Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan
115	Bunsil Gading	Pupuan, Kecamatan Pupuan
116	Sanggar Tari Serikandi	Pajahan, Kecamatan Pupuan
117	Tunas Ayu	Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan
118	Komunitas Batukaru	Pujungan, Kecamatan Pupuan

No.	Nama Sekaa	Alamat
119	Mara bangun	Sai, Kecamatan Pupuan
120	Sanggar Catur Pabhini	Br. Dinas Gablogan Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg
121	Sanggar Sari Kencana	Br. Dinas Bebal Kelod Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg
122	Sanggar Yowana Sesana Bakti	Br. Dinas Soka Desa Antap, Kecamatan Selemadeg
123	Sanggar Renteng Reges	Br. Dinas Antap Kaja Desa Antap, Kecamatan Selemadeg
124	Sanggar Tring Kencana	Br. Dinas Antap Kaja Desa Antap, Kecamatan Selemadeg
125	Sanggar Natya Praja	Br. Dinas Saraswati Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg
126	Sanggar Pari Gading	Br. Dinas Pupuan Sawah Desa Pupuan Sawah, Kecamatan Selemadeg
127	Lalah Manis	D.A. Tyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat
128	Arsa Ngulangunin	Br. Pasut, Kecamatan Selemadeg Barat
129	Tunjung Manik	Br. Mundeh Kawan, Kecamatan Selemadeg Barat
130	Gita Yadnya Suara	Br. Cantel, Kecamatan Selemadeg Barat
131	Dharma Gita Laksana	Br. Gelunggang, Kecamatan Selemadeg Barat
132	Satya Darma	Br. Mundeh Kawan, Kecamatan Selemadeg Barat
133	Celagi Gendong	Br. Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat
134	Santi Gita Suara	Br. Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat
135	Eka Santi Darma	Br. Pengasahan, Kecamatan Selemadeg Barat
136	Darma Santhi Yasa	Br. Pengasahan, Kecamatan Selemadeg Barat
137	Ghita Widya Pucak Sari	Selabih Wanasari, Kecamatan Selemadeg Barat
138	Sila Dharma Kanti	Selabih Tengah, Kecamatan Selemadeg Barat
139	Werdhi Hayu	Sl. Pangkung Kuning, Kecamatan Selemadeg Barat
140	Mekar Budaya Lestari	Br. Dukuh, Kecamatan Selemadeg Barat
141	Rindik Panca Suara Kanti	Mundeh Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat
142	Bang Wimuda	Br. Bangal, Kecamatan Selemadeg Barat
143	Eka Suara Kanthi	Br. Pengedan, Kecamatan Selemadeg Barat

No.	Nama Sekaa	Alamat
144	Seraya Dharma Kanthi	Br.Pancoran Kelod, Kecamatan Selemadeg Barat
145	Sanggar Tari	Br. Angkah Tegeh, Kecamatan Selemadeg Barat
146	Sanggar Tabuh	Br. Angkah Tegeh, Kecamatan Selemadeg Barat
147	Sanggar Seni Taksu Janardhana	Br. Dinas Tegalmengkeb Kaja, Kecamatan Selemadeg Timur
148	Kati Bang Bung	Br. Dinas Munduk Pakel, Kecamatan Selemadeg Timur
149	Sanggar Seni Padi	Br. Swastika Carik Kangin, Kecamatan Selemadeg Timur
150	Sanggar Tari Natya Kerti	Br. Swastika Carik Kangin, Kecamatan Selemadeg Timur
151	Gurnita Kusuma	Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur
152	Sanggar Seni Suara Kencana	Br. Adat Batanbuah, Kecamatan Selemadeg Timur
153	Sanggar Seni Dharma Kerti	Br. Adat Temukuaya, Kecamatan Selemadeg Timur
154	Sanggar Seni Yowana Murti	Br. Adat Pondok Mekar, Kecamatan Selemadeg Timur
155	Sanggar Seni Putra Kencana	Br. Adat Kebon, Kecamatan Selemadeg Timur
156	Sanggar Seni Wijaya Kusuma, Dane Jero Gede Siem	Br. Adat Nyampuan, Kecamatan Selemadeg Timur
157	Sanggar Seni Kelentang Mas	Br. Adat Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur
158	Sanggar Seni Semara Githa	Br. Adat Jakatebel, Kecamatan Selemadeg Timur
159	Komunitas Seni Swara Asmaralaya	Br. Adat Jakatebel, Kecamatan Selemadeg Timur
160	Dinasti Prasama	Br. Adat Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur
161	Sanggar Seni Amerta Budaya Santi	Desa Adat Kemetug, Kecamatan Selemadeg Timur
162	Dharma Wahini	Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur
163	Paiketan Swara	Br. BantasTengah Kaja, Kecamatan Selemadeg Timur
164	Kencana Sari	Serampingan, Kecamatan Selemadeg Timur
165	Karawitan yowana	Megati Kelod, Kecamatan Selemadeg Timur
166	Sanggar Seni Jegeg Bagus	BD. Dukuhpulu Kaja, Kecamatan Selemadeg Timur
167	Sanggar Seni Medangsia Desa Wanasari	Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan
168	Kembang Bali	Br. Tunjuk Kelod, Kecamatan Tabanan

No.	Nama Sekaa	Alamat
169	Padma Buddharam	Br. Beng Kelod, Kecamatan Tabanan
170	Sanggar Seni Tri Bhuana Sari	Br. Buahana Utara, Kecamatan Tabanan
171	Sanggar Seni Seliwah	Br. Buahana Selatan, Kecamatan Tabanan
172	Sanggar Seni Pucang Sari	Br. Buahana Tengah, Kecamatan Tabanan
173	Sundaram	Br. Subamia Ambal-ambal, Kecamatan Tabanan
174	Sanggar Saput Poleng	Br. Malkangin, Kecamatan Tabanan
175	Sanggar Raja Buduh	Br. Jambe Baleran, Kecamatan Tabanan
176	Sanggar Leklok	Br. Pasekan Baleran, Kecamatan Tabanan
177	Sanggar Canging Mas	Br. Pasekan Baleran, Kecamatan Tabanan
178	Sanggar Bianglala	Br. Pasekan Baleran, Kecamatan Tabanan
179	Sanggar Tari Sekar Rare	Br. Pande, Kecamatan Tabanan
180	Sanggar Tari Damar Alit	Br. Gerokgak Gede, Kecamatan Tabanan
181	Sanggar Tari Bayu Esa Sinari	Br. Sakenan Belodan, Kecamatan Tabanan
182	Sanggar Seni Sagupita Merdu	Br. Gerokgak Gede, Kecamatan Tabanan
183	Grup Tari Sunar Galang	Br. Delod Rurung, Kecamatan Tabanan
184	Sanggar Haridwipa	Jl. Kenanga No.7 Dauh Peken, Kecamatan Tabanan
185	Komunitas seni gambelan Swara Mandhala	Br. Jambe Belodan, Kecamatan Tabanan
186	Sanggar Seni Tari/Tabuh Genta Buana	Br. Ambengan, Kecamatan Tabanan
187	Sanggar Tari Widya Sari	Br. Gubug Balera Kecamatan Tabanan
188	Sanggar Sari Gurnita Dukuh Sakti	Br. Gubug Belodan, Kecamatan Tabanan
189	Sanggar Seni Karsa Tengah	Br. Curah, Kecamatan Tabanan

Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, tahun 2024

Situs cagar budaya di Kabupaten Tabanan cukup banyak tersebar di beberapa kecamatan. Situs cagar budaya tersebut perlu dikelola dan dijaga dengan baik.

Keberadaan situs cagar budaya menjadi potensi pariwisata di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.17.

Situs Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No.	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya					Tahun Ditetapkan
		Benda	Struktur	Bangunan	Situs	Kawasan	
1	Pura Luhur batukaru				√		2020
2	Pura Luhur Petali				√		2020
3	Pura Luhur Tambawaras				√		2020
4	Pura Luhur Besi Kalung				√		2020
5	Pura Luhur Muncak Sari				√		2020
6	Pura Luhur Sekartaji				√		2020
7	Pura Luhur Batubelig				√		2022
8	Pura Luhur Natar Jemeng				√		2022
9	Pura Yeh Gangga				√		2022
10	Pragmen Arca Pura Yeh Gangga	√					2023
11	Lingga di Pelinggih Meru Pura Yeh Gangga	√					2023
12	Lingga di Pura Yeh Gangga	√					2023
13	Tugu di Pura Yeh Gangga		√				2023
14	Candi Bentar di Pura Yeh Gangga		√				2023

No.	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya					Tahun Ditetapkan
		Benda	Struktur	Bangunan	Situs	Kawasan	
15	Bebaturan di Pura Yeh Gangga		√				2023
16	Meru di Pura Yeh Gangga			√			2023
17	Gedong di Pura Yeh Gangga			√			2023
18	Arca Binatang Macan 1 di Pura Luhur Aseman	√					2023
19	Arca Binatang Macan 2 di Pura Luhur Aseman	√					2023
20	Batu Belah di Beji Pura Luhur Aseman	√					2023
21	Arca Pegambuhan Pura Luhur Aseman	√					2023
22	Palung Batu di Pelinggih Kedaton Pura Luhur Aseman	√					2023
23	Upak Bangunan di Pura Luhur Aseman	√					2023
24	Pelinggih Mustika di Pura Luhur Aseman			√			2023
25	Pura Luhur Pucak Bukit Kembar				√		2024
26	Punden Berundak Pucak Geni di Pura Pucak Bukit Kembar		√				2024

No.	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya					Tahun Ditetapkan
		Benda	Struktur	Bangunan	Situs	Kawasan	
27	Punden Berundak Taman Cakra di Pura Pucak Bukit Kembar		√				2024
28	Pura Batur Kaja Kelembang				√		2024
29	Tahta Batu Pura Batur Kaja Kelembang		√				2024
30	Menhir Pura Batur Kaja Kelembang	√					2024
31	Pura Luhur Pucak Beluangan				√		2024
32	Arca Betari 1 di Pura Luhur Pucak Beluangan	√					2024
33	Kori Agung Pura Luhur Pucak Beluangan		√				2024
34	Pura Luhur Batulambung				√		2024
35	Monolit Gedong Simpen Merta Sedana di Pura Luhur Batulambung	√					2024
36	Prasasti Batunya	√					2024
	JUMLAH	13	7	3	13		

Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan, tahun 2024

➤ Olah Raga

Saat ini, bonus demografi menjadi kekuatan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kesehatan seluruh masyarakat Tabanan harus terus ditingkatkan terlebih penduduk usia produktif. Salah satunya dengan berolahraga. Kegiatan olahraga akan membentuk raga yang sehat juga akan membentuk jiwa sportivitas serta sebagai profesi yang membanggakan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tabanan terus mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasana olahraga.

Selain telah memiliki Stadion dan Gedung Gelanggang Olah Raga yang cukup representatif, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 juga telah melakukan penataan lapangan tenis *in-door*, fasilitas olahraga panjat tebing, dan sarana olah raga berupa lapangan dengan *jogging track* dan sarana lainnya di ibukota kabupaten.

Tabel 2.18.
Perkembangan Olahraga di Kabupaten Tabanan
Tahun 2019-2023

Tahun	Cakupan Pembinaan Olah Raga (%)	Cakupan Pelatih yang bersertifikat (%)	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga Per, 10,000 Penduduk
2019	100	47	50	179 Medali	2
2020	100	51	58	0 Medali (<i>pandemi covid-19</i>)	2
2021	100	60	30	22 Medali	2
2022	100	64	65	89 Medali	2
2023	100	81	152	190 Medali	2

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Tabanan, 2024

d. Fokus Pemberdayaan Perempuan

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja ini dibuktikan dengan ditetapkan Tabanan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya. Peran perempuan dalam pembangunan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dianggap baik bila di atas 70. Nilai IDG Kabupaten Tabanan dari tahun 2020 hingga 2024 selalu berada di atas 70. Secara umum, IDG Kabupaten Tabanan telah menunjukkan tren peningkatan yang positif dan tergolong tinggi dalam lima tahun terakhir. IDG Kabupaten Tabanan tertinggi mencapai 78,51 pada tahun 2022 dan 75,48 pada tahun 2024. Data capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio KDRT	%	0,03	0,012	0,03	0,03	0,03
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	%	77,95	78,27	78,41	78,07	75,48

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Tabanan, tahun 2024

e. Fokus Perlindungan Anak

Indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan anak, mencakup pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA terdiri dari dua komponen utama: Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks

Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Berdasarkan data tahun 2023, dari 9 kabupaten/kota di Bali, Tabanan menduduki peringkat keempat capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) atau dibawah Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar dan masih dibawah rata-rata IPA provinsi Bali.



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, PPHA, IPKA tahun 2023

Gambar 2.22. Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Provinsi Bali Tahun 2023.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah itu sendiri. Daya saing (*competitiveness*) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan tinggi dan berkelanjutan.

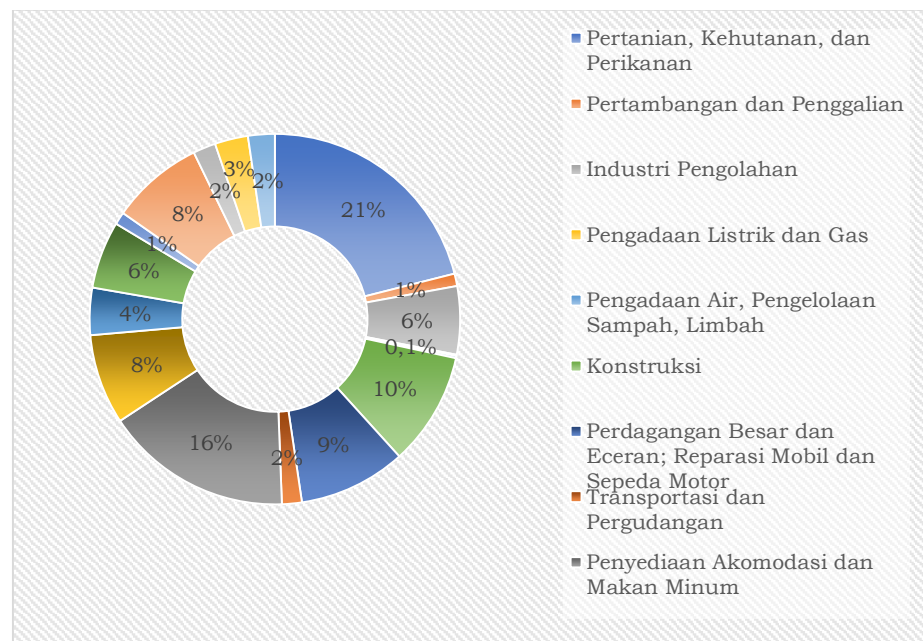
a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi bertujuan memperbaiki keadaan perekonomian untuk menunjang segala aktifitas yang berhubungan dengan perekonomian. Baik buruknya suatu perekonomian suatu daerah tergantung dari pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan terhadap segala sumber daya yang ada. Karena itu pemerintah daerah dituntut untuk

memanfaatkan serta ikut berperan dalam mengelola sumber daya yang ada. Daya saing ekonomi daerah dapat digambarkan dari struktur ekonomi, potensi ekonomi dan kemampuan keuangan daerah.

➤ Struktur Ekonomi

Kontribusi PDRB Kabupaten Tabanan tahun 2024 masih cukup variatif meskipun sektor Pertanian masih cukup dominan sebesar 21,05% yang diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,35% , sektor konstruksi 9,89%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,38% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,09 %.



Sumber: BPS Kab. Tabanan, Tahun 2024

Gambar 2.23. Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Selain dilihat dari kontribusi masing-masing sektor, perlu dilihat perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun, hal ini untuk mengetahui apakah terdapat pergeseran sektor ekonomi Tabanan. Sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB dan tumbuh positif namun nilainya berada pada posisi 14 terendah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,84%. Tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB paling tinggi terjadi pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,69%, kemudian pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,02% setelah itu pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,45%.

Tabel 2.20.
Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Tabanan
Tahun 2020-2024

Sektor	Laju Pertumbuhan (%)					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(1.23)	0.33	0.27	(0.21)	n/a	(0,84)
Pertambangan dan Penggalian	(5.06)	(0.80)	2.74	(0.89)	n/a	(0,56)
Industri Pengolahan	(4.82)	(1.00)	4.56	3.16	n/a	0.48
Pengadaan Listrik dan Gas	(8.73)	(1.40)	11.91	10.29	n/a	3.02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1.06	(2.50)	1.52	3.24	n/a	0.83
Konstruksi	(2.05)	(6.96)	2.19	1.67	n/a	(1.29)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(6.44)	(0.54)	4.44	4.89	n/a	0.59
Transportasi dan Pergudangan	(11.81)	(6.67)	6.50	9.02	n/a	(0.74)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(24.84)	(9.09)	11.96	11.12	n/a	(2.71)
Informasi dan Komunikasi	6.14	2.20	(1.36)	1.69	n/a	2.17
Jasa Keuangan dan Asuransi	(4.02)	(2.17)	8.65	12.29	n/a	3.69
Real Estate	0.34	0.06	1.34	0.53	n/a	0.57
Jasa Perusahaan	(4.06)	(3.50)	6.65	4.44	n/a	0.88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0.81)	1.33	(4.74)	0.33	n/a	(0.97)
Jasa Pendidikan	(0.52)	0.51	0.64	(1.00)	n/a	(0.09)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.10	4.94	0.98	1.79	n/a	2.45
Jasa Lainnya	(6.67)	(1.52)	9.32	8.14	n/a	2.32

Sumber: BPS Kab. Tabanan, tahun 2024

Sementara dari struktur ekonomi terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi sektor utama dengan kontribusi terhadap ekonomi Tabanan sebesar 21,89%, yang diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16,37%, sektor konstruksi 10,19%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,11%, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,41%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,46%, sektor industri pengolahan sebesar 5,87%, dan sektor lainnya masing-masing dibawah 5%. Bila dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor maka struktur ekonomi Tabanan 2020-2024 tidak mengalami perubahan namun bila tren pertumbuhannya diasumsikan sama maka dalam beberapa tahun mendatang struktur ekonomi Tabanan bertumpu pada sektor jasa.

Tabel 2.21.

Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

Sektor	Kontribusi (%)					Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,91	22,42	21,84	22,45	n/a	21,89
Pertambangan dan Penggalian	1,10	1,12	1,11	1,10	n/a	1,10
Industri Pengolahan	5,82	5,88	5,97	5,95	n/a	5,87
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,12	n/a	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,19	0,19	0,19	0,16	n/a	0,18
Konstruksi	10,69	10,15	10,08	9,80	n/a	10,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,01	9,14	9,28	9,07	n/a	9,11
Transportasi dan Pergudangan	1,67	1,59	1,65	1,66	n/a	1,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,10	14,01	15,24	18,56	n/a	16,37
Informasi dan Komunikasi	8,02	8,36	8,01	5,80	n/a	7,46

Sektor	Kontribusi (%)					Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61	3,60	3,80	4,54	n/a	3,83
Real Estate	6,02	6,15	6,05	5,05	n/a	5,78
Jasa Perusahaan	1,07	1,05	1,09	1,11	n/a	1,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,73	9,02	8,35	7,70	n/a	8,41
Jasa Pendidikan	2,06	2,11	2,07	1,84	n/a	2,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	3,01	2,95	2,72	n/a	2,81
Jasa Lainnya	2,09	2,10	2,23	2,37	n/a	2,18

Sumber: BPS Kab. Tabanan, Tahun 2024

b. Daya Saing Digital

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membangun pusat pelayanan pemerintah secara virtual yaitu Tabanan *Command Center* (TCC). TCC saat ini telah mengelola 45 website, mengelola 22 server, 25 perangkat aktif, 12,6 Km Fiber Optik mandiri, 4 wifi corner, dan 32 aplikasi. Adapun pendukung dari TCC berupa infrastruktur berikut.

Tabel 2.22.

Infrastruktur Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan

No	Capaian	Jumlah	Satuan
1	Pembangunan jaringan FO (Fiber Optik) secara mandiri	12.680	Meter
2	CCTV pada area publik	20	Buah
3	Perangkat aktif	25	Unit
4	Akses poin	91	Buah
5	<i>Bandwith</i>	1.100	Mbps
6	<i>Free wifi corner</i>	4	Unit
7	<i>Free wifi</i> BKK provinsi bali (desa adat & tempat wisata & pura)	393	Titik
8	Server jaringan	22	Unit
9	PD terintegrasi	25	PD

Sumber: Diskominfo Kab. Tabanan, tahun 2024

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2024, telah dibangun 4 *free wifi corner* yaitu di pojok lapangan Alit Saputra, lapangan Wagimin, GOR Debes dan Gedung I Ketut Maria.

Pemasangan alat *video conference* yaitu; pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ruang *Tabanan Comand Center*, serta ruang rapat bupati dan wakil bupati.

Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Propinsi Bali, pada tahun 2019 telah terpasang *wifi* gratis di 393 titik dengan memakai jaringan Fiber Optik sepanjang kurang lebih 1600 Km dengan titik pemasangan antara lain; 349 titik di seluruh desa adat, 24 titik di wilayah obyek wisata dan 20 titik di seluruh puskesmas di Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2020, juga telah dibangun 16 titik cctv yang berada di beberapa fasilitas publik seperti gedung I Ketut Maria, Pura Luhur Batukaru dan obyek wisata Jatiluwih. Adapun pendukung dari TCC berupa aplikasi seperti tabel berikut:

Tabel 2.23.
Aplikasi Teknologi Informasi Kabupaten Tabanan

No	Capaian	Jumlah (Buah)
1.	Aplikasi	32
2.	Server	22
3.	Rak Server	5
4.	Rak Jaringan	1
5.	Rak Controller CCTV	1
6.	<i>Website</i>	45
7.	<i>Router</i>	3
8.	<i>Firewall</i>	3

Sumber: Diskominfo Kab. Tabanan, tahun 2024

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini sangat pesat. Perkembangan tersebut bahkan menggeser penggunaan beberapa aplikasi yang sebelumnya berbasis *website* menjadi berbasis android dan versi sejenisnya. Akibatnya seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan, terdapat beberapa aplikasi berbasis *website* yang tidak lagi menjadi aktif.

Tabel 2.24.
Data Aplikasi yang Aktif di Server Tabanan *Command Centre* (TCC)
dan *Hosting*

No	INSTANSI	DOMAIN	Keterangan Aplikasi	Jumlah
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	http://esurat.tabanankab.go.id	Sistem Informasi (SI) Persuratan	4
		http://data.tabanankab.go.id	Portal Data Terpadu	
		http://simaretku.tabanankab.go.id	SI Menara	
		http://nms.tabanankab.go.id	SI Monitoring Jaringan	
2	Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	http://dpmtsp.tabanankab.go.id	SI Pengurusan Perijinan	1
3	Badan Keuangan Daerah	http://bphtb-online.tabanankab.go.id	Aplikasi BEA Perolehan HAK atas Tanah	4
		http://phr.tabanankab.go.id	SI Pajak Hotel dan Restoran	
		Local/Sim-PBB	SI Sim-PBB	
		Local/Simda	SI Keuangan Daerah	
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	http://simpegbkd.tabanankab.go.id	SI Pegawai	4
		https://lms.tabanankab.go.id	Learning Management System	
		http://prestasi.tabanankab.go.id	SI Prestasi Pegawai	
		http://e-kinerja.tabanankab.go.id	SI Kinerja Pegawai	
5	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	https://lpse.tabanankab.go.id	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1
6	RSU Daerah Tabanan	https://siponrs.tabanankab.go.id	SI Pendaftaran Pasien	1
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Local/Siskeudes	SI Keuangan Desa	1
8	Inspektorat	local/Siswaskeudes	SI Monitoring Keuangan Desa	1
9	Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda	https://ehibah.tabanankab.go.id	SI Bantuan Hibah	1
10	Bagian Hukum Setda	http://jdih.tabanankab.go.id	Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	1

Sumber: Diskominfo Kab. Tabanan, tahun 2024

Tabel 2.25.
Alamat Website Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan

No	Nama OPD	Website	Jumlah
Website Tabanan:		-	1
1	Tabanankab	https://tabanankab.go.id/home	
Kecamatan:			10
1	Baturiti	https://baturiti.tabanankab.go.id/	
2	Kediri	https://kediri.tabanankab.go.id/	
3	Kerambitan	https://kerambitan.tabanankab.go.id/	
4	Penebel	https://penebel.tabanankab.go.id/	
5	Pupuan	https://pupuan.tabanankab.go.id/	
6	Selemadeg Barat	https://selemadegbarat.tabanankab.go.id/	
7	Selemadeg	https://selemadeg.tabanankab.go.id/	
8	Selemadeg Timur	https://selemadegtimur.tabanankab.go.id/	
9	Tabanan	https://tabanan.tabanankab.go.id/	
10	Marga	https://marga.tabanankab.go.id/	
Dinas:			20
1	Pendidikan	https://disdik.tabanankab.go.id/	
2	Pariwisata	https://dispar.tabanankab.go.id/	
3	Kebudayaan	https://disbud.tabanankab.go.id/	
4	Kependudukan dan Catatan Sipil	https://disdukcapil.tabanankab.go.id/	
5	Kesehatan	https://diskes.tabanankab.go.id/	
6	Perindustrian dan Perdagangan	https://disperindag.tabanankab.go.id/	
7	Tenaga Kerja	https://dinaker.tabanankab.go.id/	
8	Perikanan	http://diskan.tabanankab.go.id/	
9	Pertanian	https://distan.tabanankab.go.id/	
10	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	https://dsp3a.tabanankab.go.id/	
11	Perhubungan	https://dishub.tabanankab.go.id/	
12	Pengendalian Penduduk dan KB	https://dppkb.tabanankab.go.id/	
13	Komunikasi dan Informatika	https://diskominfo.tabanankab.go.id/	
14	Koperasi dan UKM	https://diskopumkm.tabanankab.go.id/	
15	Lingkungan Hidup	https://dislh.tabanankab.go.id/	
16	Perpustakaan dan Arsip	https://dispersip.tabanankab.go.id/	

No	Nama OPD	Website	Jumlah
17	Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	https://dpmpstsp.tabanankab.go.id/	
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	https://dpmd.tabanankab.go.id/	
19	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	https://dispuprpkp.tabanankab.go.id/	
20	Ketahanan Pangan	https://dishanngan.tabanankab.go.id/	
Badan:			8
1	Keuangan Daerah	https://bkd.tabanankab.go.id/	
2	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	https://bkpsdm.tabanankab.go.id/	
3	Kesatuan Bangsa dan Politik	https://bakesbangpol.tabanankab.go.id/	
4	Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	https://bapelitbang.tabanankab.go.id/	
5	Rumah Sakit Umum Daerah	https://rsud.tabanankab.go.id/	
6	Penanggulangan Bencana Daerah	https://bpbd.tabanankab.go.id/	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	https://satpolpp.tabanankab.go.id/	
8	Rumah Sakit Nyitdah	https://rsudnyitdah.tabanankab.go.id/	
Inspektorat			1
1	Inspektorat	https://inspektorat.tabanankab.go.id/	
Sekretariat Dewan			1
1	Sekretariat Dewan	https://dprd-tabanankab.go.id	
Organisasi Lain			3
1	Praja Muda Karana	https://pramuka.tabanankab.go.id	
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	https://ppid.tabanankab.go.id	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	https://lkpd.tabanankab.go.id	
Jumlah			45

Sumber: Diskominfo Kab. Tabanan, tahun 2024

Di tahun 2022 pemerintah Kabupaten Tabanan telah mencanangkan Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) yang merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi

Informatika. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 sebesar 2,07 dengan predikat cukup dan pada tahun 2022 berhasil ditingkatkan menjadi 2,74 dengan predikat baik dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 3,77 dengan predikat sangat baik. Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di tahun 2024 sampai saat dokumen ini disusun belum dilakukan.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

a. Standar Pelayanan Minimum

Standar pelayanan minimum yang harus dilaksanakan di setiap daerah terkait dengan urusan pemerintahan wajib dasar yaitu dibidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

➤ Pendidikan

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) mensyaratkan seluruh warga negara usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan PAUD yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Capaian APK PAUD periode 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 78,56 persen tahun 2020 menjadi 80,69 persen tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk

memberikan pendidikan awal pada anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar semakin meningkat.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mampu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan akreditasi Lembaga PAUD yang ada. Tahun pelajaran 2023/2024, lembaga PAUD yang terakreditasi sebanyak 206 lembaga (91,96%) dari total 224 lembaga. Dari lembaga yang sudah terakreditasi, hampir semua lembaga PAUD di kecamatan sudah dalam kategori A. Hal ini mengindikasikan lembaga PAUD di Kabupaten Tabanan sudah semakin baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2.26.

Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	78,56	78,03	72,28	79,60	80,69
2.	Persentase Lembaga PAUD yang teakreditasi (%)	Akreditasi tidak dilaksanakan	37,88	73,79	70,67	91,96
3.	Jumlah Lembaga PAUD (Buah)	342	330	332	225	224

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, tahun 2024

- Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS dihitung terhadap perbandingan jumlah siswa baik pada jenjang SD dan SMP terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkat jenjang pendidikan yakni rentang 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD/ sederajat, rentang 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam

mengakses pendidikan secara umum. Namun, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai peningkatan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Hal ini karena penurunan dan peningkatan nilai APS dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah tanpa memperhatikan asal wilayah.

Untuk mengukur kinerja pendidikan, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingkat pendidikan dasarnya yaitu SD sederajat dan SMP sederajat dengan mengukur ketersediaan tenaga pendidik serta ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana sekolah. APS di Kabupaten Tabanan pada rentang tahun 2020-2024 telah mendekati 100 persen pada jenjang pendidikan SMP dan melebihi 100 persen pada jenjang pendidikan SD. Hal ini menunjukkan penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun di Kabupaten Tabanan hampir sudah semuanya mendapatkan akses pendidikan (tabel 2.26.).

Tabel 2.27.

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Tabanan berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI (7-12 th)	99,19	99,28	99,55	99,61	100,05
SMP/MTs (13-15 th)	98,65	98,49	98,85	97,95	99,28

Sumber: BPS Kab. Tabanan, tahun 2024

Akses pendidikan di Kabupaten Tabanan sebagaimana diuraikan di atas dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal penting lainnya yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah ketersediaan tenaga pendidik. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio ideal antara guru dan murid di Sekolah Dasar (SD) adalah 1 guru untuk 20 murid. Tahun pelajaran 2023/2024

jumlah siswa SD sebanyak 33.867 siswa, jumlah guru SD sebanyak 2.511 guru. Bila mengacu kepada perbandingan jumlah guru dan murid semestinya dibutuhkan guru sebanyak 1.693 guru. Ini menunjukkan sudah terdapat kelebihan guru SD. Namun dari sisi lain, pada jenjang pendidikan SD, semestinya tersedia 6 guru kelas, 1 kepala sekolah, 1 guru agama, dan 1 guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes). Dari 289 jumlah SD dan 1.872 rombongan belajar (Rombel) yang ada di Kabupaten Tabanan mestinya tersedia guru sebanyak 2.325 guru. Namun pada satuan pendidikan SD tahun pelajaran 2023/2024 memiliki ketersediaan guru SD sebanyak 2.511 guru terdiri dari 1.110 guru PNS, 1.111 guru PPPK, dan 290 guru kontrak (kontrak daerah, honor daerah dan honor sekolah), sehingga ada kelebihan sebanyak 186 orang. Hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan SD.

Tabel 2.28.

Ketersediaan Guru Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Rombel	Guru				
				PNS	PPPK	Kontrak	Jumlah Guru	Kebutuhan
1	Baturiti	31	186	87	112	41	240	257
2	Kerambitan	26	157	103	103	20	226	209
3	Kediri	44	284	129	200	52	381	356
4	Marga	32	192	120	106	31	257	256
5	Penebel	33	198	118	161	45	324	268
6	Pupuan	29	177	111	87	18	216	232
7	Selemadeg Barat	18	108	67	42	10	119	143
8	Selemadeg	16	95	40	54	14	108	128
9	Selemadeg Timur	19	114	82	66	8	156	152
10	Tabanan	41	361	253	180	51	484	324
Jumlah		289	1.872	1.110	1.111	290	2.511	2.325

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, 2024

Dari tabel di atas dapat disimak bahwa sebaran guru tiap kecamatan sudah terpenuhi sesuai kebutuhan. Kekurangan guru masih terjadi pada sekolah yang berada jauh dari pusat kota seperti di kecamatan Baturiti, Pupuan, Selemadeg, dan Selemadeg Barat.

Di samping akses pendidikan dan ketersediaan guru, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Dari seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, ruang kelas merupakan prasarana yang paling utama sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ruang kelas di seluruh SD yang tersebar di sepuluh kecamatan terangkum dalam dibawah ini.

Tabel 2.29.
Kondisi Ruang Kelas SD di Sepuluh Kecamatan
Di Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah SD (Negeri)	Jumlah Ruang Belajar	Kondisi Ruang Kelas				Persentase Ruang Belajar Rusak Berat
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Baturiti	31	194	103	34	43	14	7%
2	Kerambitan	26	166	80	36	42	8	5%
3	Kediri	44	281	164	47	66	4	1%
4	Marga	32	195	102	21	60	12	6%
5	Penebel	33	199	101	35	47	16	8%
6	Pupuan	29	171	99	19	43	10	6%
7	Selemadeg Barat	18	104	46	11	39	8	8%
8	Selemadeg	16	96	41	16	35	4	4%
9	Selemadeg Timur	19	113	53	17	40	3	3%
10	Tabanan	41	382	276	41	51	14	4%
	Jumlah	289	1.901	1.065	277	466	93	5%

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun pelajaran 2023/2024 kondisi ruang belajar SD sebanyak 1.065 ruang (56 persen) sudah dalam kondisi baik, sisanya sebanyak 743 ruang (39 persen) mengalami kondisi rusak ringan. Hanya 5 persen ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat.

Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP pada tahun pelajaran 2023/2024, dari 39 jumlah SMP dan 599 rombongan belajar (Rombel) yang ada di Kabupaten Tabanan, mestinya tersedia guru sebanyak 1.197 guru. Saat ini ketersediaan guru SMP sebanyak 1.250 orang. Ini menunjukkan ketersediaan guru SMP sudah melebihi dari kebutuhan. Dari jumlah guru yang ada ini sebanyak 1.051 orang (84,08 persen) berstatus sebagai guru tetap (PNS, PPPK, dan Yayasan) dan 199 orang (15,92 persen) sebagai guru tidak tetap (kontrak daerah dan honor sekolah).

Tabel 2.30.

Ketersediaan Guru Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
di Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah SMPN	Jumlah Rombongan Belajar	Guru Tetap			Guru Tidak Tetap		Jumlah Guru	Kebutuhan
				PNS	Yayasan	PPPK	Kontrak Daerah	Honor Sekolah		
1	Baturiti	5	63	63	0	36	24	1	124	130
2	Kerambitan	2	45	58	0	32	18	0	108	91
3	Kediri	5	81	119	0	53	20	1	193	189
4	Marga	4	67	71	0	30	27	0	128	125
5	Penebel	3	53	60	0	33	14	3	110	105
6	Pupuan	6	69	75	0	35	16	1	127	137
7	Selemadeg Barat	2	18	29	0	14	12	0	55	47
8	Selemadeg	2	33	32	0	21	10	0	63	59
9	Selemadeg Timur	3	50	49	0	11	10	0	70	68
10	Tabanan	7	120	141	10	79	33	9	272	246
	Jumlah	39	599	697	10	344	184	15	1.250	1.197

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, 2024

Dari tabel di atas dapat disimak, bahwa sebaran guru antar kecamatan sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Hanya Kecamatan Baturiti dan Pupuan yang masih kekurangan guru.

Di samping akses pendidikan dan ketersediaan guru, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Dari seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, ruang kelas merupakan prasarana yang paling utama sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ruang kelas di seluruh SMP yang tersebar di sepuluh kecamatan terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.31.
Kondisi Ruang Belajar SMP di Sepuluh Kecamatan
Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah SMP	Jumlah Ruang Belajar	Kondisi Ruang Kelas				Persentase Ruang Belajar Rusak Berat
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Baturiti	5	63	46	5	12	0	0%
2	Kerambitan	2	45	37	4	4	0	0%
3	Kediri	5	81	71	4	6	0	0%
4	Marga	4	67	57	0	7	3	4%
5	Penebel	3	53	39	12	2	0	0%
6	Pupuan	6	69	44	9	6	10	14%
7	Selemadeg Barat	2	18	13	2	3	0	0%
8	Selemadeg	2	33	12	10	9	2	6%
9	Selemadeg Timur	3	50	18	21	9	2	4%
10	Tabanan	7	120	80	26	14	0	0%
	Jumlah	39	599	417	93	72	17	3%

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tabanan tahun 2024

Kondisi ruang belajar pada jenjang pendidikan SMP kondisinya lebih baik dibandingkan dengan jenjang SD dimana hanya tersisa 17 ruang (3 persen) yang rusak berat. Ruang belajar yang rusak berat berada di Kecamatan

Marga, Pupuan, Selemadeg, dan Selemadeg timur dimana kondisi rusak berat paling banyak terdapat di Kecamatan Pupuan sebanyak 10 ruang. Kondisi ini membutuhkan penanganan segera agar pemerataan kondisi prasarana pendidikan antar kecamatan lebih optimal.

- Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga (usia 15-44 tahun) yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah dengan alasan putus sekolah, kendala biaya, sudah bekerja, dan alasan lainnya. Proses pembelajaran ini biasa dikenal dengan nama Kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA). Pelaksanaan pembelajaran untuk Pendidikan Kesetaraan tersentral dalam PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF SKB Tabanan) yang ada di setiap kecamatan. Di Kabupaten Tabanan, terdapat 5 lembaga PKBM dan 1 lembaga SPNF yang tersebar di lima kecamatan. Lembaga yang sudah terakreditasi yang dapat melaksanakan ujian nasional dilembaganya sendiri yaitu:

1. SPNF SKB Tabanan (Kecamatan Kediri)
2. PKBM Sari Mekar (Kecamatan Kediri)
3. PKBM Windu Segara (Kecamatan Tabanan)
4. PKBM Eka Cita (Kecamatan Kerambitan)
5. PKBM Mandiri (Kecamatan Pupuan)
6. PKBM Dharma Santhi (Kecamatan Penebel)

Perkembangan jumlah siswa yang dididik pada lembaga pendidikan kesetaraan tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.32.
**Jumlah Siswa yang Dididik pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan
di Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024**

No.	Nama Lembaga	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Paket			Paket			Paket			Paket		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	SPNF SKB Tabanan	Kediri	5	53	102	3	27	163	3	26	158	3	26	158
2	PKBM Sari Mekar	Kediri	-	13	131	0	16	100	-	10	79	-	10	79
3	PKBM Windhu Segara	Tabanan	17	-	40	26	10	28	5	22	4	6	23	8
4	PKBM Eka Cita	Kerambitan	-	17	78	4	12	29	4	2	37	4	3	37
5	PKBM Mandiri	Pupuan	-	7	88	0	6	36	-	3	39	-	3	39
6	PKBM Dharma Santhi	Penebel	-	10	44	29	8	29	-	2	21	-	4	29
Jumlah			22	114	344	33	79	385	12	65	338	13	69	350

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Tabanan, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta Program Paket A (SD) cenderung sedikit, sedangkan peserta didik pada Program Paket B (SMP) dan C (SMA) relatif lebih banyak. Hal ini dapat dikaitkan dengan cukup tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dan jenjang pendidikan SMP dari tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai alasan seperti sakit, tidak mau sekolah, menikah dan diberhentikan orangtua. Untuk program paket C (SMA) saat ini belum menjadi prioritas karena kewenangan kabupaten hanya menaungi jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP. Angka putus sekolah di Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 tercatat dari jumlah siswa SD sebanyak 2 orang sedangkan di jenjang SMP jumlah siswa sebanyak 10 orang.

➤ Kesehatan

SPM bidang kesehatan mensyaratkan bahwa seluruh warga negara mulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia wajib mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai

standar. Terdapat 12 SPM bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten antara lain: 1). Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2). Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3). Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4). Pelayanan kesehatan balita; 5). Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6). Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7). Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8). Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9). Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; 10). Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11). Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis; dan 12). Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Target SPM bidang kesehatan sebagaimana peraturan perundang-undangan wajib ditetapkan 100%. Secara umum capaian SPM bidang kesehatan sudah berjalan baik dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 capaian SPM tercapai 100 persen pada kedua belas layanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Ketercapaian SPM bidang kesehatan ini menunjukkan seluruh masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan sudah mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Data capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tabanan
Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Ibu hamil	5.651	4.691	83,01	5.643	4.903	86,89	4341	4341	100
2	Ibu bersalin	5.394	4.527	83,93	5.387	4.582	85,06	4282	4282	100
3	Bayi baru lahir	5.137	4.467	86,96	5.130	5.130	100	4279	4279	100
4	Balita	19.891	19.891	100	18.884	18.884	100	23530	23530	100
5	Usia pendidikan dasar	50.627	50.627	100	52.091	51.131	98,16	51629	51629	100
6	Usia produktif	289.769	154.850	53,44	289.769	195.592	67,50	67814	67814	100
7	Usia lanjut	80.371	45.697	56,86	80.805	60.845	75,30	73730	73730	100
8	Penderita hipertensi	131.099	82.157	62,67	131.099	55.850	42,60	44850	44850	100
9	Penderita Diabetes Melitus	5.525	5.525	100	5.525	7.773	100	5525	5525	100
10	Orang dengan gangguan jiwa berat	1.362	964	70,78	1.362	1.362	100	1016	1016	100
11	Orang dengan TB	2.911	2.268	77,91	3.353	3.986	100	2013	2013	100
12	Orang dengan risiko terinfeksi HIV	7.394	5.037	68,12	6.963	5.727	82,25	5465	5465	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabanan, tahun 2024

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi capaian SPM bidang kesehatan adalah sarana pelayanan dan tenaga kesehatan yang tersedia. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan telah tersedia cukup banyak, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau keseluruhan kecamatan, bahkan jika digabungkan dengan jaringan pelayanan dibawahnya, seperti: Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan UKBM (Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat), pelayanan kesehatan telah menjangkau seluruh desa dan banjar.

Tahun 2024 tersedia 20 unit Puskesmas dengan rincian: Puskesmas Perawatan (Puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergency dasar) sebanyak 5 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 15 unit. Lima Puskesmas Perawatan dimaksud adalah: Puskesmas Pupuan I, Puskesmas Selemadeg, Puskesmas Selemadeg Barat, Puskesmas Baturiti I dan Puskesmas Penebel I. Keterjangkauan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tabanan telah mencapai 1,38 per 30.000 penduduk. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling). Jumlah Pustu pada tahun 2024 adalah sebanyak 77 unit, dan jumlah Pusling sebanyak 25 unit ditambah dengan 2 unit Mobil Sehat untuk memberikan pelayanan sampai pada tingkat banjar khususnya pelayanan kesehatan kanker servik (IVA).

Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dilakukan oleh Rumah Sakit. Di Kabupaten Tabanan sampai saat ini terdapat 10 (sepuluh) rumah sakit, dua diantaranya merupakan rumah sakit pemerintah, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Tabanan merupakan rumah sakit rujukan regional tipe B dan Rumah Sakit Umum Singasana merupakan rumah sakit tipe C.

Ketersediaan tenaga kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Tahun 2024, di Kabupaten Tabanan tersebar sebanyak 3.158 tenaga kesehatan yang bekerja di 20 Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik yang ada di Kabupaten Tabanan. Dari 3.911 tenaga

kesehatan yang ada, jumlah perawat umum sebanyak 1.210 orang, tenaga bidan sebanyak 703 orang, dokter umum sebanyak 274 orang, tenaga dokter spesialis sebanyak 210 orang, ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 133 orang, tenaga teknis kefarmasian sebanyak 100 orang, tenaga gizi sebanyak 82 orang, tenaga keteknisan medis sebanyak 94 orang, dokter gigi sebanyak 71 orang, tenaga teknik biomedika lainnya sebanyak 63 orang, tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 56 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 75 orang, tenaga apoteker sebanyak 63 orang, dan tenaga keterampilan fisik sebanyak 24 orang. Selain itu, berkaitan dengan proses administrasi terdapat pejabat struktural di lingkup Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebanyak 73 orang, sedangkan tenaga dukungan manajemen sebanyak 1.010 orang.

Tabel 2.34.
Ketersediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan													
		Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat Umum	Bidan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi laboratorium Medik	Ahli Teknik Biomedika Lainnya	Keterapian Fisik	Keteknisan Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker
1	Puskesmas Tabanan I	0	4	3	7	25	5	3	2	2	0	0	4	2	1
2	Puskesmas Tabanan II	0	3	2	9	21	4	1	1	1	0	0	4	2	1
3	Puskesmas Tabanan III	0	7	3	16	30	1	1	2	2	0	0	6	2	1
4	Puskesmas Kerambitan I	0	5	2	11	18	5	1	2	1	0	0	2	1	1
5	Puskesmas Kerambitan II	0	3	2	13	17	4	2	2	1	0	0	2	1	1
6	Puskesmas Selemadeg	0	6	3	24	25	3	2	2	2	0	0	3	1	1
7	Puskesmas Selemadeg Barat	0	6	2	25	27	2	1	2	1	0	0	2	1	1
8	Puskesmas Selemadeg Timur I	0	4	3	14	14	2	3	1	2	0	0	2	2	1
9	Puskesmas Selemadeg Timur II	0	2	1	6	12	2	2	1	1	0	0	3	0	1
10	Puskesmas Baturiti I	0	8	3	12	25	2	1	3	2	0	0	2	4	1
11	Puskesmas Baturiti II	0	3	3	7	21	1	1	1	2	0	0	1	1	1
12	Puskesmas Marga I	0	4	3	10	29	4	3	2	2	0	0	2	1	2
13	Puskesmas Marga II	0	4	2	14	26	2	1	2	1	0	0	1	1	1
14	Puskesmas Penebel I	0	6	3	11	33	3	3	3	3	0	1	5	1	2
15	Puskesmas Penebel II	0	3	1	11	13	2	1	1	0	0	0	3	1	1
16	Puskesmas Pupuan I	0	9	2	24	23	2	1	2	4	0	0	3	2	0
17	Puskesmas Pupuan II	0	5	2	24	20	4	2	2	2	0	0	2	2	0
18	Puskesmas Kediri I	0	9	3	12	26	5	2	3	2	0	0	5	2	1
19	Puskesmas Kediri II	0	2	2	9	18	1	3	2	1	0	0	2	1	1

No	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan													
		Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat Umum	Bidan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi laboratorium Medik	Ahli Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Keteknisan Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker
20	Puskesmas Kediri III	0	4	2	8	19	5	1	2	1	0	0	2	1	1
21	RSUD Tabanan	61	44	4	372	72	7	14	22	32	28	11	19	25	10
22	RSUD Singasana	16	16	3	150	46	6	5	9	11	9	3	6	9	7
23	RS Dharma Kerti	24	7	2	50	12	0	0	1	6	4	4	4	5	2
24	RSU Bhakti Rahayu	16	14	0	54	10	1	0	1	4	4	2	2	1	2
25	RSU Wisma Prashanti	23	11	0	62	19	0	0	3	7	1	0	1	7	2
26	RSIA Cahaya Bunda	1	4	0	23	12	0	0	3	2	1	0	0	3	2
27	RSU Kasih Ibu Tabanan	20	12	2	81	12	1	1	1	6	6	0	0	4	3
28	RSU Semara Ratih	17	12	1	37	32	0	0	3	2	5	1	2	4	3
29	RSU Bali Holistik	5	4	1	11	4	0	0	0	1	1	0	0	0	2
30	RSIA Puri Bunda Tabanan	18	13	0	57	14	0	0	0	10	0	0	1	5	5
31	UPTD Lab. Kes Daerah Dan Kalibrasi Kab. Tabanan	0	0	0	0	0	0	1	0	8	3	0	0	0	0
32	UPTD Instalasi Farmasi Kab. Tabanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
33	Klinik Lapas Klas II B Tabanan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Klinik Mutiara Bunda	0	2	1	4	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35	Klinik Pratama Barta Medika	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Klinik Pratama Kasta Gumani	0	2	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Klinik Pratama Maha Boga Marga	0	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0
38	Klinik Pratama Polres Tabanan	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
39	Klinik Pratama Putra Usada Medika	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1

No	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan													
		Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat Umum	Bidan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi laboratorium Medik	Ahli Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Keteknisan Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker
40	Klinik Pratama Satya	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
41	Klinik Pratama Virtu DigiLab Tabanan Nyitdah	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Klinik Rindam Udayana	0	4	1	5	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0
43	Klinik Umum Kasih Ibu Bajera	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Klinik Utama Dharmanatha	2	3	0	6	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
45	Klinik Utama Prodia Tabanan	3	2	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
46	Klinik Utama Wijaya Kusuma	0	2	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47	Klinik Utama Kita Sidhikarya	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Klinik Gana Medika	0	3	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
49	Klinik Palguna	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Klinik Biwi Health & Care	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Klinik Pratama Heera	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Klinik Utama Laboratorium Taksu	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Laboratorium Prodia Tabanan	1	0	0	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
54	Taksu Laboratorium Klinik	1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Total		210	274	71	1.210	703	75	56	82	133	63	24	94	100	63

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, tahun 2024

Utilitas pelayanan kesehatan mencerminkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk dihitung dengan cara membandingkan jumlah kunjungan difaskes dengan jumlah penduduk dikalikan 100%. Dengan angka 90% pada tahun 2024 berarti jumlah kunjungan di faskes lebih rendah dari jumlah penduduk, hal ini terjadi dengan asumsi tingkat masyarakat yang mendaftar pada pelayanan kesehatan tercatat hanya satu kali. Angka morbiditas sebesar 13% menunjukkan bahwa masyarakat Tabanan mengalami peningkatan keluhan kesehatan, disisi lain dapat juga diartikan bahwa kesadaran masyarakat dalam masalah kesehatan cenderung semakin menurun, seiring target penerapan UHC (*universal health coverage*) dengan dukungan daerah mengalokasikan anggaran PBI daerah yang cukup besar untuk masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan pembiayaan PBI Pusat. Sedangkan FKTP terakreditasi 100% tercapai karena 20 puskesmas yang ada di Tabanan seluruhnya sudah terakreditasi.

Tingkat akreditasi Rumah Sakit paripurna juga tercapai seiring RSUD Tabanan yang mampu mempertahankan tingkat paripurna. Untuk RSUD Singasana sudah terakreditasi tingkat dasar. Capaian indikator SPM bidang kesehatan tahun 2024 tercapai 86,48 persen. Meningkatnya capaian SPM bidang kesehatan dikarenakan tingginya capaian beberapa SPM dari 12 SPM di bidang kesehatan.

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tabanan
Tahun 2020-2024

No.	Indikator RPJMD	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Utilisasi Pelayanan Kesehatan (%)	87.99	90	90	90	90
2.	Angka Morbiditas (%)	11.21	13	13	13	13

No.	Indikator RPJMD	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi (%)	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Akreditasi RSD (predikat)	Pari-purna	Pari-purna	Pari-purna	Pari-purna	Pari-purna
5.	Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)	61,29	78,69	78,69	86,48	86,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, tahun 2024

➤ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terbagi atas 10 sub urusan meliputi sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Berikut sub urusan yang menjadi prioritas penanganan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

- Air Minum

Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2024 cakupan layanan air bersih Kabupaten Tabanan telah mencapai 86,79%, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 85,24%. Layanan penyediaan air bersih ini didukung oleh penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan layanan pedesaan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan yang dikelola sendiri masyarakat. Dalam enam tahun terakhir penyediaan air minum perdesaan banyak didukung oleh Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang menyasar desa yang tidak mendapatkan pelayanan sepenuhnya oleh PDAM. Dari

capaian tahun 2024 tersebut, masih dibutuhkan peningkatan cakupan layanan sejumlah 13,21 % untuk mencapai layanan sampai dengan 100% yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tabanan.

- Air Limbah

Penyelenggaraan layanan air limbah khususnya akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Tabanan dipenuhi melalui penyediaan jamban sehat bagi keluarga dan IPAL Komunal bagi wilayah dengan penduduk padat dan kumuh. Akses terhadap fasilitas sanitasi aman (Jamban Sehat) menurut kecamatan dan Puskesmas, tahun 2024 sudah mencapai 83,91%. Namun demikian, masih terdapat $\pm$ 22.897 KK yang belum memiliki akses jamban sehat atau masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif baik upaya edukasi masyarakat maupun bentuk-bentuk intervensi lainnya.

Beberapa desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat memenuhi kriteria *ODF (Open Defecation Free*-Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Sampai tahun 2022, terdapat 28 desa berstatus *ODF (Open Defecation Free*-Bebas-Buang Air Besar Sembarangan) dengan rincian: 16 *ODF Deklarasi*, 7 *ODF Claim*, 5 *ODF Baseline*. Jadi, dari 133 desa baru 21,05% yang menyandang status *ODF*. Capaian ini tentu masih jauh dari harapan apalagi Tabanan sangat bersemangat mengembangkan Desa Wisata. Kedua sub urusan air minum dan air limbah merupakan indikator dari SPM urusan pekerjaan umum. Capaian dari indikator tersebut adalah seperti tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.36.
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024

NO	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari (%)	83,55	84,93	85,00	85,24	86,79
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	83,16	83,49	83,91	83,91	83,91

Sumber: DPUPRPKP Kab. Tabanan, tahun 2024

- Drainase

Sistem drainase merupakan suatu sistem infrastruktur yang cukup kompleks karena terkait dengan status jalan dimana drainase tersebut berada. Sistem drainase di Kabupaten Tabanan umumnya masih memanfaatkan sungai dan saluran pengairan. Bahkan sungai dan saluran pengairan saat ini berkembang menjadi saluran drainase Kota Tabanan. Drainase yang ada saat ini sepanjang 88,082 km sebagian besar masih dalam Kota dan Ibu Kota Kecamatan dengan kondisi yang baik sebesar 43,79 persen dan kondisi sedang sebesar 43,06 persen. Drainase yang dalam kondisi rusak masih sebesar 10,37 persen, sedangkan sisanya sebesar 2,79 persen merupakan drainase dari tanah. Penanganan drainase perkotaan selama ini dihubungkan dengan saluran drainase utama yang telah ada. Pada titik-titik lokasi tertentu dikawasan perkotaan masih ada genangan akibat luapan/limpasan karena dimensi saluran drainase yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemanfaatan lahan.

Tabel 2.37.
Kondisi Drainase di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

No.	Kondisi	Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
1	Baik	37,935	43,07	38,191	43,36	38,103	43,26	38,573	43,79
2	Sedang	37,939	43,07	37,790	42,90	37,999	43,14	37,924	43,06
3	Rusak	9,753	11,07	9,646	10,95	9,525	10,81	9,130	10,37
4	Tanah	2,455	2,70	2,455	2,79	2,455	2,79	2,455	2,79
	TOTAL	88,082	100,00	88,082	100,00	88,082	100,00	88,082	100,00

Sumber: DPUPRPKP Kab. Tabanan, tahun 2024

- Bangunan Gedung

Bangunan gedung dalam bentuk prasarana aparatur dan prasarana publik di Kabupaten Tabanan meliputi: gedung pendidikan, gedung kantor, gedung kesehatan, gedung olah raga, rumah dinas dan bangunan lainnya. Adapun jumlah prasarana aparatur dan prasarana publik di Kabupaten Tabanan sampai tahun 2024 mencapai 2.846 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Kondisi prasarana aparatur dan prasarana publik tersebut, 2.419 unit (85 persen) masih dalam kondisi baik, 147 unit (5,17 persen) dalam kondisi rusak sedang, dan 280 unit (9,83persen) dalam kondisi rusak berat.

➤ Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan, meliputi: perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berikut kondisi sub urusan yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Tabanan.

Pembangunan bidang Perumahan di Kabupaten Tabanan dilaksanakan dalam rangka memenuhi hunian layak huni bagi masyarakat. Penanganan bidang perumahan di Kabupaten Tabanan banyak ditangani melalui program pusat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sasaran dari program BSPS ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memberikan bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah, pembangunan rumah baru, dan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dalam periode tahun 2021–2024, pelaksanaan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kabupaten Tabanan berupa Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Untuk kebutuhan penuntasan jumlah sasaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Tabanan hingga tahun 2024 sebesar $\pm$ 3.397 unit rumah yang layak ditangani, tersebar di sepuluh kecamatan. Kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data secara reguler.

Tabel 2.38.
Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di
Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2024

No	Kecamatan	Peningkatan Kualitas (unit)	Pembangunan Baru (unit)	TOTAL
1	Tabanan	145	70	215
2	Penebel	167	66	233
3	Baturiti	197	167	364
4	Marga	93	47	140
5	Kediri	179	29	208
6	Selemadeg	155	105	260
7	Selemadeg Timur	103	123	226

No	Kecamatan	Peningkatan Kualitas (unit)	Pembangunan Baru (unit)	TOTAL
8	Selemadeg Barat	190	165	355
9	Kerambitan	148	87	235
10	Pupuan	991	170	1,161
JUMLAH		2.368	1.029	3.397

Sumber: DPUPRPKP Kab. Tabanan, tahun 2024

Dalam kaitannya dengan pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat yang ditujukan pada warga korban bencana dan warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah, sampai saat ini belum ada hunian warga yang tinggal di Kabupaten Tabanan terdampak oleh bencana dan program pemerintah. Dengan demikian, pencapaian indikator SPM tersebut belum diperlukan.

➤ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota, meliputi: sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran. Pelayanan informasi rawan bencana setiap tahun dilakukan di 10 kecamatan karena dalam dokumen Kajian Resiko Bencana semua kecamatan di Kabupaten Tabanan tergolong daerah rawan bencana. Dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 4.333 orang yang terdiri dari siswa sebanyak 200 orang, aparatur sebanyak 40 orang dan masyarakat umum sebanyak 4.093 orang. Pada tahun 2023 jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 1.129 orang yang terdiri dari

siswa sebanyak 730 orang, prajurit koramil sebanyak 30 orang, karyawan medis sebanyak 269 orang dan masyarakat umum sebanyak 60 orang. Pada tahun 2024 jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 2.818 orang yang terdiri dari siswa sebanyak 2.281 orang, prajurit koramil sebanyak 30 orang, dan masyarakat umum sebanyak 517 orang. Capaian ketiga sub urusan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.39.

Kinerja Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	134 orang	7.402 orang	134 orang	1.160 orang	2.135 orang
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10 kec.	10 kec.	10 kec.	10 kec.	10 kec.
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.293 orang masyarakat	4.293 orang masyarakat	4.333 orang masyarakat	1.129 orang masyarakat	2.818 orang masyarakat
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	569 titik	401 titik	499 titik	421 titik	330 titik

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	63 orang	63 orang	45 orang	147 orang	101 orang

Sumber: Satpol PP Kab. Tabanan, tahun 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketiga sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran belum dapat dinyatakan berhasil mencapai target pelayanan terhadap warga yang berhak mendapat pelayanan. Kedepan dibutuhkan pemetaan terhadap warga yang benar-benar berhak mendapat pelayanan sebelum program/kegiatan dieksekusi.

➤ Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sekarang dikenal juga dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Mengacu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 terdapat 26 jenis PMKS/PPKS. Selain itu pelayanan juga diberikan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari 12 jenis.

Penanganan PMKS/PPKS menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tabanan, ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya jumlah PMKS/PPKS dari tahun ke tahun. Jumlah PMKS/PPKS pada tahun 2020 sebanyak 93.638 menurun menjadi 73.914 pada tahun 2024. Namun dari 26 jenis PMKS belum semua mengalami penurunan, Terdapat 11 (sebelas) jenis PMKS yang mengalami peningkatan seperti Anak Balita Terlantar, Anak Dengan Kedissabilitas (ADK), Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Fakir Miskin, serta Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Capaian penanganan PMKS/PPKS disajikan dalam berikut.

Tabel 2.40.
Jenis dan Jumlah PMKS/PPKS di Kabupaten Tabanan
Tahun 2020-2024

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Anak Balita Terlantar	Orang	0	28	9	1	3
2.	Anak Terlantar	Orang	22.378	569	1734	157	48
3.	Anak yang Berhadapan dengan hukum	Orang	3	0	0	0	3
4.	Anak Jalanan	Orang	0	0	0	0	0
5.	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	Orang	235	304	303	320	263
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Orang	12	5	12	17	30
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	0	0	0	0	0
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	26.778	11.448	63.664	136	38
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	2.809	3.044	2.090	3.702	4.024
10.	Tuna Susila	Orang	0	0	0	0	0
11.	Gelandangan	Orang	0	0	0	0	4

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
12.	Pengemis	Orang	0	0	0	0	0
13.	Pemulung	Orang	21	22	10	3	3
14.	Kelompok Minoritas	Orang	0	0	0	0	0
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	25	248	252	63	29
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	11	6	5	41	133
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	9	9	9	9	9
18.	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	30	12	24	15	28
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	0	0	0	0	0
21.	Korban Bencana Alam	Orang	11	12	45	77	43
22.	Korban Bencana Sosial	Orang	0	0	0	15	41
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	943	919	905	327	322
24.	Fakir Miskin	KK	40.373	66.653	73.454	70.296	68.848
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	0	63	0	0	45
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	0	0	0	0	0
	JUMLAH		93.638	83.342	142.516	75.179	73.914

Sumber: Dinas Sosial P3A Kab. Tabanan, tahun 2024

Selain PMKS/PPKS penanganan PSKS juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tabanan, ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya jumlah PSKS dari tahun ke tahun. Jumlah PSKS pada tahun 2020 sebanyak 2.385 menurun menjadi 889 pada tahun 2024. Namun dari 12 jenis PSKS terdapat 2 (dua) jenis PSKS yang mengalami peningkatan yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan perbaikan. Capaian penanganan PMKS/PPKS disajikan dalam tabel 2.28.

Tabel 2.41.
Jenis dan Jumlah PSKS di Kabupaten Tabanan
Tahun 2020-2024

No	Jenis PSKS	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pekerja Sosial Profesional	Orang	45	45	45	1	4
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	826	826	826	675	40
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	72	72	72	51	85
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga	10	10	10	353	21
5.	Karang Taruna	KT	133	133	133	133	133
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Lembaga	1	1	1	1	1
7.	Keluarga Pionir	KK	0	0	0	10	0
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	lembaga	133	133	133	133	133
9.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Lembaga	826	826	826	462	133
10.	Penyuluh Sosial	Orang	54	50	50	54	54
11.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	10	10	10	10	10
12.	Dunia Usaha	Pengusaha	275	275	275	275	275
	JUMLAH		2.385	2.381	2.381	2.026	889

Sumber: Dinas Sosial P3A Kab. Tabanan, tahun 2024

Target SPM bidang sosial yang terdiri dari lima jenis pelayanan dasar sebagaimana peraturan perundang-undangan wajib ditetapkan 100%. Capaian SPM bidang sosial sudah berjalan baik dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 capaian SPM sudah tercapai 100 persen. Data capaian SPM bidang Sosial Kabupaten Tabanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.42.
Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabanan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	%	Realisasi	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	591	100	591	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	41	100	41	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	235	100	235	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Orang	26	100	26	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tang-gap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Orang/ Kejadian	45	100	45	100

Sumber: Dinas Sosial P3A Kab. Tabanan, tahun 2024

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Penanganan PMKS menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tabanan, ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya jumlah PMKS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, dari 12 jenis PMKS hampir semua PMKS

mengalami penurunan hanya Anak Balita Terlantar, Penyandang Disabilitas, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang mengalami peningkatan. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan perbaikan. Capaian penanganan PMKS disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.43.
Jenis dan Jumlah PMKS di Kabupaten Tabanan
Tahun 2020-2024

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Anak Balita Terlantar	Orang	0	28	9	1	3
2.	Anak Terlantar	Orang	22.378	504	1734	157	48
3.	Anak dengan kedisabilitas-an (ADK)	Orang	235	304	303	320	263
4.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	26.778	26.788	63.664	136	38
5.	Penyandang Disabilitas	Orang	2.809	3.044	2.090	3.702	4.024
6.	Pemulung	Orang	21	22	10	3	3
7.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemas-yarakatan (BWBLP)	Orang	25	59	252	63	29
8.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	11	6	5	41	133
9.	Korban Ben-cana Alam	Orang	11	12	45	142	4
10.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Orang	943	919	905	327	322
11.	Fakir Miskin	KK	40.373	188.057	213.554	205.595	68.848
12.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	0	63	0	0	45

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tabanan, tahun 2024

Kinerja dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum sepanjang tahun 2021-2024 juga diukur melalui indikator kinerja daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Banyak target yang telah tercapai, namun banyak pula target yang belum tercapai. Indikator dan target yang belum tercapai, dipergunakan kembali pada indikator kinerja daerah dalam dokumen ini.

Tabel 2.44.
Evaluasi Capaian Kinerja

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1	Pertumbuhan PDRB	Persentase (%)	5,60	5,7	5,8	5,9	6,0	6	6	- 1,98	2,93	3,56	4,94
2	Laju Inflasi	Persentase (%)	2,24	3,00+1%	3,00+1%	3,00+1%	3,00+1%	3,00+1%	3,00+1%	2,01 (Denpasar)	6,44 (Denpasar)	2,54 (Denpasar)	2,44
3	PDRB per kapita	Jumlah	53,59	57,09	60,59	64,09	67,59	71,09	71,09	14.326	14.475	14.832	15.297
4	Indeks Gini	Persentase (%)	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,311	0,299	0,347	0,301
5	Persentase penduduk di-bawah garis kemiskinan	Persentase (%)	4,21	4,2	4,2	4,19	4,15	4,1	4	5	5,18	4,7	4,4
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	76,17	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	76,45	76,75	77,43	78,42
7	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	94,93	93,50	93,85	94,00	94,25	94,50	95,00	96,89	96,76	97,31	N.A
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,88	8,90	8,94	8,98	9,10	9,15	9,20	9,14	9,15	9,35	9,57
9	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,65	74	74	74	74	74	74	74	74,1	74,48	74,48

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	Persentase balita gizi buruk	Persentase (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08	0,1	0,1	N.A
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase (%)	3,3	3,3	3,2	3,1	3	3	3	0,5	0,5	0,5	0,5
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	75,47	76	76,75	77	77,5	78	78,5	74,98	76,93	74,16	75,29
14	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	4,23	4,1	4	3,9	3,8	3,6	3,2	3,94	3,83	2,64	1,85
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70	75	80	85	90	100	100	N.A	85,67	84,26	85,54
16	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	91,50	92,00	93,60	94,30	95,10	95,70	95,70	89,5	85,2	93,2	91,4
18	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persentase (%)	17,14	16,52	16,21	15,90	15,59	15,28	14,97	20,86	21,67	20,04	21,80
2	Nilai Tukar Petani	Persentase (%)	104,10	105,00	105,50	106,00	106,50	107,00	107,50	92,84	97,05	99,48	101,52

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Angka kriminalitas	Kasus	182	180	175	170	165	160	155	158	160	167	142
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	73,98	73,98	74,98	74,98	74,98	74,98	Tidak dilakukan pengukuran			
5	Kontribusi Sektor Pari-wisata terhadap PDRB	Persentase (%)	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	15,65	17,11	18,58	20
6	Kontribusi Sektor Per-tanian terhadap PDRB	Persentase (%)	21,63	21,90%	22,50%	23,00%	23,50%	24,50%	25,00%	23,57	22,9	22,42	22,31
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Layanan Urusan Wajib Dasar													
1	Pendidikan												
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
1.2	Angka Partisipasi Kasar	Persentase (%)	72,14	73,50	74,50	75,50	76,75	78,50	80,00	78,56	76,60	79,43	80,69
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	106,12	106,20	106,25	106,30	106,35	106,40	106,45	95,81	103,25	95,49	98,24
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106,88	106,93	106,98	107,03	107,08	107,13	107,18	95,30	96,14	92,40	89,89
1.3	Angka Partisipasi Murni												
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96,12	96,17	96,22	96,27	96,32	96,37	96,42	89,45	89,35	90,47	89,55

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	81,22	81,32	81,47	81,62	81,77	81,92	82,07	78,47	75,76	85,10	85,10
1.4	Angka Partisipasi Sekolah												
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	109,98	110,00	110,02	110,04	110,06	110,08	110,10	88,71	97,77	90,47	90,47
1.5	Angka Putus Sekolah												
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0,23	0,18	0,13	0,08	0,03	0,02	0,18	0,13	0,08	0,03	0,02
1.6	Angka Kelulusan												
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Angka Transisi (AT)												
1.7.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	100,64	100,66	100,68	100,70	100,72	100,74	100,76	99,2	97,39	105,41	104,10
1.8	Fasilitas Pendidikan												
1.8.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	35,97	43,75	51,75	60,85	78,15	85,75	90,85	31,63	96,87	56,02	56,02

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.8.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	52,63	60,65	78,75	85,75	90,75	95,25	100	50,09	58,35	81,56	69,61
1.9	Rasio Ketersediaan Seko-lah/Penduduk Usia Se-kolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	92	91	90	89	88	87	86	54,38	82,12	82,12	82,12
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	25	24	23	21	20	19	18	33,04	20,47	20,81	20,81
1.11	Rasio Guru/Murid Seko-lah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	12,79	12,79	13,25	13,35	13,45	13,55	13,65	7,20	7,64	7,88	7,88
1.12	Rasio guru terhadap mu-rid per kelas rata-rata												
1.12.1	SD/MI	Persentase (%)	2,27	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	73,67	76,48	78,8	78,8
1.12.2	SMP/MTS	Persentase (%)	5,92	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	8,94	8,94	10,22	10,22
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	94,92	95,22	95,42	95,62	95,82	96,02	96,22	100	100	100	100
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.14.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	81,36	85,45	88,75	91,75	93,75	95,75	97,75	0	0	0	65,94
1.14.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	96,45	96,95	97,45	97,95	98,45	99,00	100,00	93,00	94,07	73,05	96,38
1.14.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	98,20	98,70	99,00	99,25	99,75	100,00	100,00	94,16	96,26	96,98	97,60
2 Kesehatan													
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/ 1000 KH	65	64	63	62	61	60	60	6,1	11,7	7,2	13,7
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/ 1000 KH	10,4	10	9,8	9,5	9,20	8,80	8,80	0,8	0,4	1,1	1,6
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/ 1000 KH	6,8	6,5	6,4	6,2	5,9	5,8	5,8	4,4	9,0	7,2	8,5
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/ 100.000 KH	77,3	76	75	74	73	72	72	342	132	131	N.A
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persentase (%)	80	80	80	80	80	80	80	3,08	3,08	3,30	3,88
2.6	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Persentase (%)	82	83	84	84	84	85	85	7,44	7,22	7,34	7,57

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	1,33	1,28	1,29	1,28
2.6.2	Rasio klinik	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	0,93	1,02	1,09	1,35
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	5,18	4,92	4,96	4,94
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	0,66	0,64	0,64	0,64
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persentase (%)	80,00	82,00	84,000	86,00	90,00	95,00	95	122	105,7	112,8	118,9
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk		80,00	82,00	84,000	86,00	90,00	95,00	95	435,3	379,7	385,9	422,3
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persentase (%)	80,00	82,00	84,000	86,00	90,00	95,00	95	181,4	232,7	241,1	258,7
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persentase (%)	90,00	92,00	93,000	95,00	96,00	98,00	98	141,5	147	144,8	150,3
2.10	Cakupan komplikasi ke-bidanan yang ditangani	Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,5	84,5	81	85,2
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	97,1	84	85,1	103,7
2.12	Cakupan Desa/ Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	93,2	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.13	Cakupan Balita Gizi Bu-ruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	18,5	44	44	44	44	44	44	19,4	21,5	45,1	114,5
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	90,9	90	90	90	90	90	90	79,5	78,9	86,9	81,6
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.17	Incidence Rate DBD	/ 100.000 Penduduk	75,9	<49	<49	<49	<49	<49	<49	4,2	78	138,2	335,5
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	55	100	100	100	100	100	100	34,6	46,1	47,4	37,2
2.19	Angka kematian Malaria	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/ 1000 Penduduk	0,002	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0	0
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	50,08	60	62	64	68	69	69	0,01	0,02	0,01	0,03
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	86,1	68,1	82,9	123,3
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persentase (%)	NA	70	72	74	75	76	76	55	55,59	56,87	87,59

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase (%)	18	18	17	17	17	16	16	N/A	8,3	23	0,8
2.25	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	90	90	90	90	90	90	90	N/A	98,3	91,7	100,5
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persentase (%)	60	60	60	60	60	60	60	N/A	N/A	210,8	26,3
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	Persentase (%)	60	60	60	60	60	60	60	N/A	N/A	N/A	N/A
2.28	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persentase (%)	90	90	90	90	90	90	90	N/A	83,3	82,6	101,6
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N/A	82,2	85,4	102,7
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N/A	61,8	95,5	82,2
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	80	82	84	85	86	88	88	N/A	98,4	97,1	97,5
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase (%)	60	61	62	64	66	65	65	N/A	0	92	95,01
2.33	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N/A	99,6	99,9	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N/A	62	≥ 175	89,91
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100
2.36	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
3.1	Persentase Jaringan Iri-gasi dalam kondisi baik	Persentase (%)	65	76	65	66,5	68	69,5	70,00	N/A	65	66,5	62
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap		47,53	48,03	49,03	50,53	52,53	55,03	55,53	N/A	49,03	56,33	57,83

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.3	Panjang Pantai Terabrasi	Kilometer	12,51	11,50	10,60	10,00	9,51	8,00	8,00	N/A	10,6	10	12,51
3.4	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase (%)	80,84	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	90,04	94,69	95,59
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase (%)	60	60	65	70	75	80	85	N/A	65	22,85	34,28
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan kabupaten yang bersertifikat	Persentase (%)	25	25	30	35	40	45	45	N/A	20	35	40
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persentase (%)	83,16	85	88,38	92,5	95,88	100	100	N/A	88,38	92,5	95,88

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.8	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	Persentase (%)	83,54	85	88,38	92,5	95,88	100	100	N/A	88,38	92,5	95,88
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman												
4.1	Jumlah rumah terbangun kewenangan kabupaten	Unit	NA	0	10	20	40	60	130	N/A	20	27	27
4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase (%)	NA	93	93	95	98	100	100	N/A	96	90	100
4.3	Persentase kawasan kumuh	Persentase (%)	87,34	90	92,5	95	97,50	100	100	N/A	98	93	98,5
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat												
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	50	60	70	80	90	100	100	N/A	77,78	53,74	90,1
5.4	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100
6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat												
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	70	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	70	85	86	87	88	89	90	100	100	100	100
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	5	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase korban ben-cana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tang-gap darurat lengkap	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
1	Tenaga Kerja												
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persentase (%)	5,5	5	4	3	2	1	1	N/A	2,42	0,31	N/A
1.2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Jumlah	4.612 Orang	4.700 Orang	4.900 Orang	5.100 Orang	5.300 Orang	5.500 Orang	5.800 Orang	N/A	20.991	42.495	N/A
1.3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	160 Orang	224 Orang	512 Orang	672 Orang	752 Orang	848 Orang	1.088 Orang	N/A	112	192	N/A
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pe-latihan kewirausahaan	Jumlah	0	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	N/A	16	48	N/A

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.6	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persentase (%)	2,81	2,70	2,77	2,81	2,85	2,88	2,90	N/A	4,25	5,32	N/A
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	50	50	50	50	50	50	50	49,15	52,61	45,14	49,25
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20
2.3	Rasio KDRT	Persentase (%)	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,012	0,013	0,012	0,025
2.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	71,3	50	55	60	65	70	75	68,72	70,89	67,17	67,59

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban keke-rasan yang menda-patkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban keke-rasan yang mendapat-kan layanan keseha-tan oleh tenaga kese-hatan terlatih di Pus-kesmas mampu tata-laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terla-tih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat pe-nyidikan sampai de-ngan putusan penga-dilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban keke-rasan yang mendapat-kan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pangan												
3.1	Ketersediaan Pangan Utama												
3.1.1	Padi (Beras)	Ton	114.583	115.156	115.732	116.310	116.892	117.476	118.064	105.177	113.591	115.955	136.130
	Padi (Gabah)	Ton	212.312	213.374	214.440	215.513	216.590	217.673	218.762	197.933	210.095	184.882	216.976

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.1.2	Jagung	Ton	9.133	9.178,67	9.224,56	9.270,68	9.317,03	9.363,62	9.410,44	12.713	14.680	12.262	14.059
3.1.3	Kedelai	Ton	153,00	153,77	154,53	155,31	156,08	156,86	157,65	395	639	1.828	270
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/ Hari	4.288,00	4.309,44	4.330,99	4.352,64	4.374,41	4.396,28	4.418,26	4.291	4.418,96	3.335	3.760,4
		Gram/Kap/ Hari	84,41	84,83	85,26	85,68	86,11	86,54	86,97	95,16	90,41	86,97	81,1
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100
4	Pertanian												
4.1	Persentase data infor-masi pertanahan yang handal	Persentase (%)	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup												
5.1	Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.3	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	11,4	14,476	14,664	14,965	15,04	15,228	15,228	N/A	59,63	56,25	62,5
5.4	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	24,7	33,38	33,42	33,46	33,5	33,54	33,54	N/A	83,76	86,04	93,38

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.5	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	13,33	7,32	7,34	7,36	7,38	7,41	7,41	N/A	36,6	35,14	36,98
5.6	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	,-	,-	1	1	1	1	4	0	0	0	1
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
6.1	Rasio pendudukan ber- KTP per satuan penduduk	Persentase (%)	99,00	99,00	99,10	99,20	99,30	99,50	99,50	98,39	98,28	98,12	99,69
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persentase (%)	99,16	99,18	99,20	99,25	99,30	99,50	99,50	99,58	99,86	99,89	99,88
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase (%)	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	38,00	32,36	40,21	43,52	46,56
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5	Penerapan KTP Nasio-nal berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	99,00	99,00	99,10	99,20	99,30	99,50	99,50	97,88	97,36	97,29	98,96
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	99,00	92,17	96,73	97,15	98,04
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.1	Rata-rata jumlah ke- lompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100	20	20	20	20
7.2	Persentase PKK desa/ kelurahan yang terbina	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100	0	0	0	0
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat ter- hadap Program pem- berdayaan masyarakat	Persentase (%)	100	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	1,13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,07	0,95	1,08	0,90
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,72	1,81	1,78	1,82

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase (%)	50	70	75	80	90	100	100	65	70	75	90
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase (%)	20	40	50	60	70	80	80	47	47	47	50
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	46	48	50	53	55	57	57	1	1	1	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan	Jumlah	6	8	10	12	14	16	16	8	10	12	14

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan pelaksanaan program pembangunan												
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	0	10	20	30	40	50	50	N/A	15	16	20
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase (%)	3	2	2	2	2	2	2	1,894	1,894	2,03	2,03
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	67,137	67.130	67,123	67,116	67,109	67,102	67,102	50,7	62,2	65,8	67,2
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persentase (%)	227	220	213	206	199	192	192	N.A	16,1	13,5	18
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase (%)	0,32	0,31	0,3	0,29	0,28	0,27	0,27	N.A	0,28	0,15	0,07

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase (%)	5	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,5	N.A	9,3	3,17	11,1
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	42,38	42,5	42,62	42,74	42,86	4,98	4,98	N.A	47,37	43,5	25,5
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	82,56	82,68	82,8	82,92	83,04	83,16	83,16	N.A	61,7	65,7	67,22
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	93,9	93,91	93,92	93,93	93,94	93,95	93,95	N.A	100	100	100
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	89	89,01	89,03	89,05	89,07	89,09	89,09	N.A	100	100	100
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	86,66	86,68	86,7	86,71	86,72	86,73	86,73	N.A	100	100	100
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	N.A	1	1	1
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persentase (%)	15	15	15	15	15	15	15	N.A	15	16	17

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N.A	100	100	100
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	92,89	92,9	92,91	92,92	92,93	92,94	92,94	N.A	60,59	66,78	N.A
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	N.A	1 : 1	1 : 1	1 : 1
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	N.A	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.24	Cakupan kelompok ke-giatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	N.A	4,5	8,56	7,4
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	26-27 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	25 Tahun	N.A	22,4	23,1	23,1
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependu-dukan, Keluarga Beren-cana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20	N.A	77	80,21	7,35
9	Perhubungan												
9.1	Jumlah arus penum-pang angkutan umum												
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	596.995	272.080	280.684	289.718	299.204	309.164	309.164	N.A	292.187	321.406	54.498
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	570	570	570	570	570	570	570	N.A	570	574	574
9.3	Jumlah uji kir ang-kutan umum	Jumlah	2.226	2.326	2.426	2.526	2.626	2.726	2.726	N.A	609	6.884	6.435
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis												
9.4.1	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	N.A	0,97	1,01	0,68
9.6	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	N.A	67,2	70,93	74,56
9.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	409.48	409.48	409.48	409.48	409.48	409.48	409.48	N.A	428,69	428,75	0,09306
10	Komunikasi dan Informatika												
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase (%)	NA	NA	25	50	75	100	100	N.A			
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	NA	NA	26,39	48,68	70,97	100,00	100,00	N.A	85	87	95
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persentase (%)	NA	77,20	78,75	80,32	81,93	83,57	85,24	N.A			
10.3.1	Persentase rumah tang-ga yang menggunakan HP	Persentase (%)	NA	73,77	75,24	76,75	78,28	79,85	81,44	N.A	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persentase (%)	NA	3,44	3,50	3,57	3,65	3,72	3,79	N.A	0	0	0
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persentase (%)	NA	49,02	50,00	51,00	52,02	53,06	54,12	N.A	100	100	100
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah												
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	71,80	72,00	72,50	73,20	74,00	74,50	75,00	71,32	71,83	72,80	72,90
11.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	43.715	45.900	46.775	47.649	48.960	49.835	50.709	N.A	N.A	N.A	43.841
12	Penanaman Modal												
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	4300	766	800	820	875	950	1050	14.489	5.889	7.130	11.988
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Milyar)	2351,03	8.172,57	3.500	3.850	4.235	4.659	5.125	2.466	4.135	1.597,45	7.716, 05
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase (%)	9322:100 00x 100% = 93 %	94	95	95	95	95	95	95	64	575	104,48
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persentase (%)	34,14	35	35	35	35	35	35	2115	67,66	286,28	-52

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	82,689 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	90 (Sangat Baik)	82,95 (Baik)	85,92 (Baik)	88,194 (Baik)	89,674 (Baik)
13	Kepemudaan dan Olahraga												
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	26,67	36,67	46,67	56,67	66,67	83,33	100,00	N.A	0,012	0,021	N.A
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	45,28	52,83	60,38	67,92	75,47	83,02	90,57	N.A	0,022	0,022	N.A
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	25	25	30	30	35	35	40	N.A	34	39	N.A
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	50	50	55	60	65	70	75	N.A	52	52	N.A
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	20	20	25	30	35	40	45	N.A	30	36	N.A
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	250	260	270	280	290	300	310	N.A	283	261	N.A
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	150	175	200	225	230	235	240	N.A	215	242	N.A
14	Statistik												
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku "PDRB"	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	2,50	5,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Kebudayaan												
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	1	2	2	2	2	2	3	0	1	6	6
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan												
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	16	4	4	4	4	4	5	0	0	9	4
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	2	2	2	2	2	2	3	0	0	3	3
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	7	2	2	2	2	2	3	0	2	1	10
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	1	3	3	3	3	3	4	N/A	N/A	3	4
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu												
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	NA	3	3	3	3	3	4	0	0	9	4
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	NA	1	1	1	1	1	2	0	0	3	3

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	1	2	2	2	2	2	3	0	2	1	10
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah		2	5	5	5	5	6	2	1	2	2
17	Perpustakaan												
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persentase (%)	0,42	0,48	0,55	0,61	0,68	0,72	0,72	0,51	0,51	1,5	1,7
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	36.189	37.789	38.189	38.589	38.989	39.289	39.289	37.911	38.648	38.674	38.708
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	8,2	8,2	8,2	8,2
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	1500	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100	3.100	364	1.390	1.448	1.600
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	11.284	11.984	12.184	12.384	12.584	12.784	12.784	11,910	12.165	12.178	12.196

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	3	3	5	6	8	10	10	46	46	46	46
18	Kearsipan												
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase (%)	10	10	25	50	75	100	100	20	60	97,5	97,5
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	10	10	25	50	75	100	100	20	60	100	100
Layanan Urusan Pilihan													
1	Pariwisata												
1.1	Kunjungan Wisatawan												
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Ribu jiwa	955	840	1.050	1.500	2.475	3.300	4.125	747	1.468	2.162	1.875
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Ribu jiwa	353	560	700	1.000	2.025	2.700	3.375	9	679	1.461	1.521
1.2	Lama Tinggal Wisatawan												
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Hari	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Hari	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persentase (%)	7,4	6	6	6	7	9	10	2,41	8,65	16,6	20,04

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Pertanian												
2.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar												
2.1.1	Padi	Jumlah	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24	N/A	21,01	18,49	21,70
2.1.2	Jagung	Jumlah	70.92	70.92	70.92	70.92	70.92	70.92	70.92	N/A	1,47	1,23	1,41
2.1.3	Kedelai	Jumlah	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	N/A	0,06	0,18	0,03
2.2	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase (%)	1.950	2.020	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	N/A	63,5	63,57	66,05
3	Perdagangan												
3.1	Ekspor Bersih Perdag- angan	Persentase (%)	0,81	0,85	0,91	0,91	1	1	1	N/A	N/A	0,9	0,8
3.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Perindustrian												
4.1	Cakupan Bina Perajin	Persentase (%)	34,67	35	35,33	36	36,67	37	37,67	70	80	90	100
5	Kelautan dan Perikanan												
5.1	Produksi Perikanan	Jumlah	3.850,9	3.864,1	3.886,5	3.916,0	3.953,8	3.997,1	4.045,1	N/A	3.879,82	3.904,85	3.934,45
5.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	31,4	32,0	32,3	32,5	32,9	33,4	33,8	N/A	31,83	32	33,4
5.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase (%)	89	90	92	94	96	98	100	N/A	93,67	93,7	95,3

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase (%)	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	N/A	16,41	16,4	16,41
5.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	630,6	636,5	643,2	650,3	658,1	667,5	674,8	N/A	636,73	640,4	645,71
5.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persentase (%)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	N/A	2,9	2,9	2,9
5.7	Nilai Tukar Nelayan	Persentase (%)	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	N/A	104,6	105,2	105,8
Penunjang Urusan													
1	Perencanaan Pembangunan												
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan												
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SiLPA	Persentase (%)	0,91	4,79	4,00	3,50	3,00	2,75	2,50	2,00	0,95	1,41	3,8
2.3	Persentase SiLPA terhadap APBD	Persentase (%)	0,97	1,60	1,22	1,15	1,09	1,09	1,08	2,00	0,95	1,41	3,8
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	25,43	26,14	26,64	27,24	27,95	27,95	27,95	25,19	26,23	24,48	26,40
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	31,72	31,77	31,82	31,87	31,92	31,92	31,92	34,3	17	19,35	15,6

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	0,57	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,32	0,33	0,34	0,35
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah (milyar)	14,1	15,5	5,4	3,9	2,8	2,02	1,5	5,4	3,9	2,8	5,4
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan												
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase (%)	54,96	58,3	62,36	67,17	72,76	79,19	80	1,94	5,21	5,9	5,7
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase (%)	43,73	46,30	51,18	56,33	62,02	68,80	70	3,61	4,23	19,7	11,13
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	35	35	35	35	35	35	35	33	35	35	33

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	2.465	2.592	2.382	1.793	1.610	1.465	1.465	2.497	2.156	2020	1.853
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4.822	5.377	5.524	6.105	6.288	6.433	6.433	3.951	4644	4.699	5.882
4	Penelitian dan Pengembangan												
	Penerapan SIDA												
4.1	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persentase (%)	70	75	80	85	90	95	100	N/A	30	45,90	57,45
5	Pengawasan												
5.1	Persentase Tindak Lan-jut Temuan Temuan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,35	99,92
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase (%)	0.014	0.044	0.044	0.044	0.029	0.014	0.014	0	0	0	0
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persentase (%)	7	7	7	6	6	5	5	6	13	18	10
6	Sekretariat Dewan												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat- Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Mau-pun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Kesatuan Bangsa dan Politik												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.1	Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai-Nilai Kebangsaan	Persentase (%)	100	75	80	85	90	95	100	N/A	80	80	100
7.2	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu.	Persentase (%)	85	75	80	80	80	80	95	N/A	80	80	88,31
7.3	Masyarakat yang memahami Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase (%)	100	75	80	85	90	95	100	N/A	80	87,5	100
7.4	Terkendalnya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	Persentase (%)	100	80	85	90	93	95	100	N/A	100	100	100

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tabanan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah telah diarahkan untuk menjamin ketersediaan anggaran, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sementara itu, pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tabanan yang belum seluruhnya dapat ditangani, baik karena alasan administratif, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun karena alasan masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan.

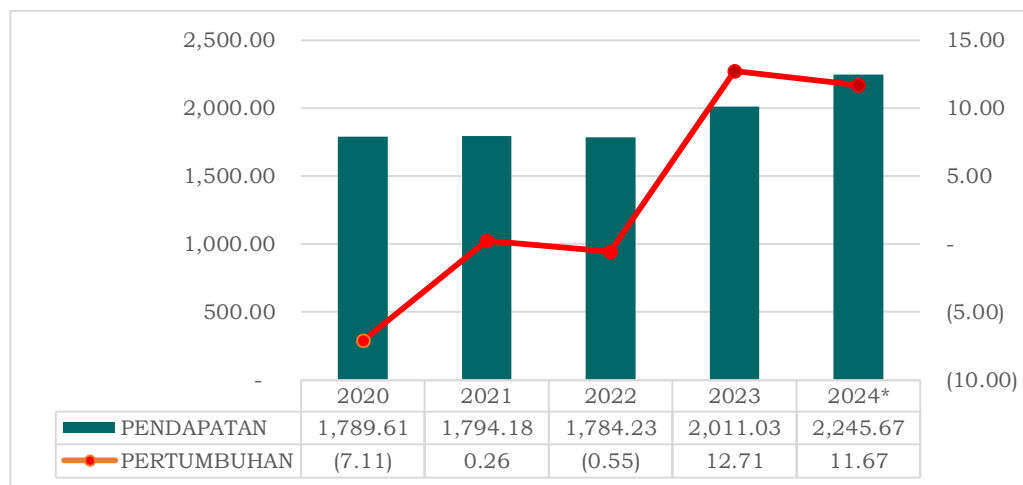
Gambaran umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah kurun waktu lima tahun kedepan (2025-2029). Gambaran umum dan analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2015-2020 mencakup: (1) struktur pendapatan beserta komponennya; (2) struktur belanja daerah beserta komponennya; (3) trend perkembangan pembiayaan defisit/surplus; dan (4) trend besaran penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.

2.2.1 Gambaran Pendapatan Daerah

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan yang lebih baik yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal. Berdasarkan peta kapasitas fiskal Kementerian Keuangan RI tahun 2023, rasio kapasitas fiskal kabupaten tabanan sebesar 1,135 dalam kategori rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan

upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah.

Pada periode 2020-2024 pendapatan Kabupaten Tabanan menunjukkan bersifat fluktuatif namun menunjukkan tren positif, tahun 2020 tercatat realisasi pendapatan tercatat sebesar 1.789,61 milyar terkontraksi sebesar 7,11 persen dibandingkan tahun 2019, sejalan dengan ekonomi Tabanan yang terkontraksi sebesar 9,34 persen. Sejalan dengan kondisi perekonomian yang membaik, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2.011,03 milyar rupiah atau tumbuh sebesar 12,71 persen. Dalam struktur pendapatan terdapat 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berikut perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024.

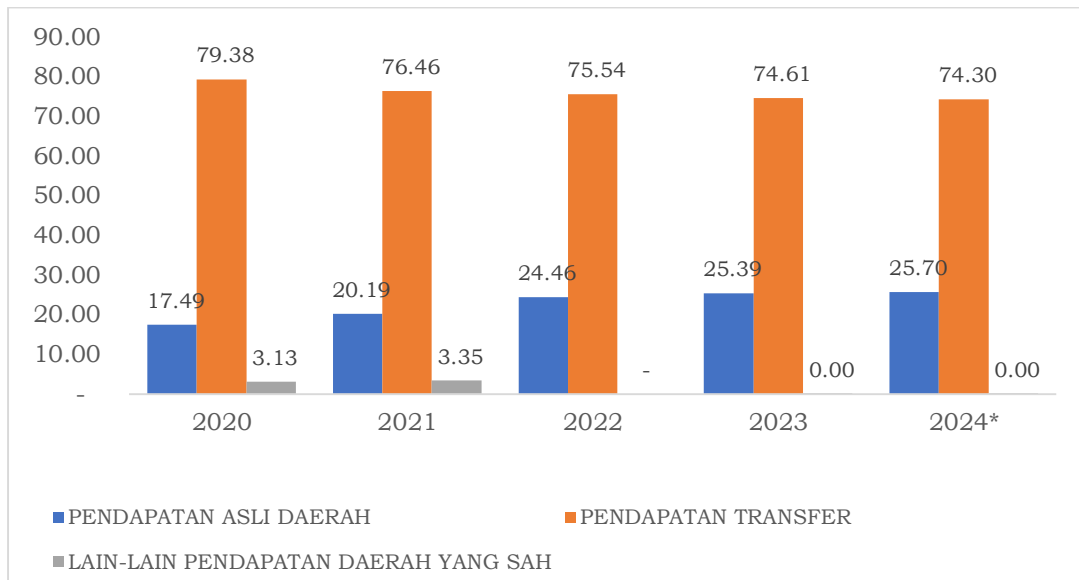


Sumber: LRA Pemkab Tabanan Tahun 2020-2024 *unaudited

Gambar 2.24. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Proporsi komponen pendapatan daerah Kabupaten Tabanan terhadap total pendapatan tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi relatif sama. Pendapatan transfer berkontribusi 74,30-79,38 persen, sedangkan kontribusi PAD sebesar 17,49-25,70 persen. Proporsi ini

menunjukkan kontribusi PAD peningkatan, yang artinya ada upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan sumber pendapatan lainnya. Proporsi komponen pendapatan daerah disajikan pada gambar berikut.



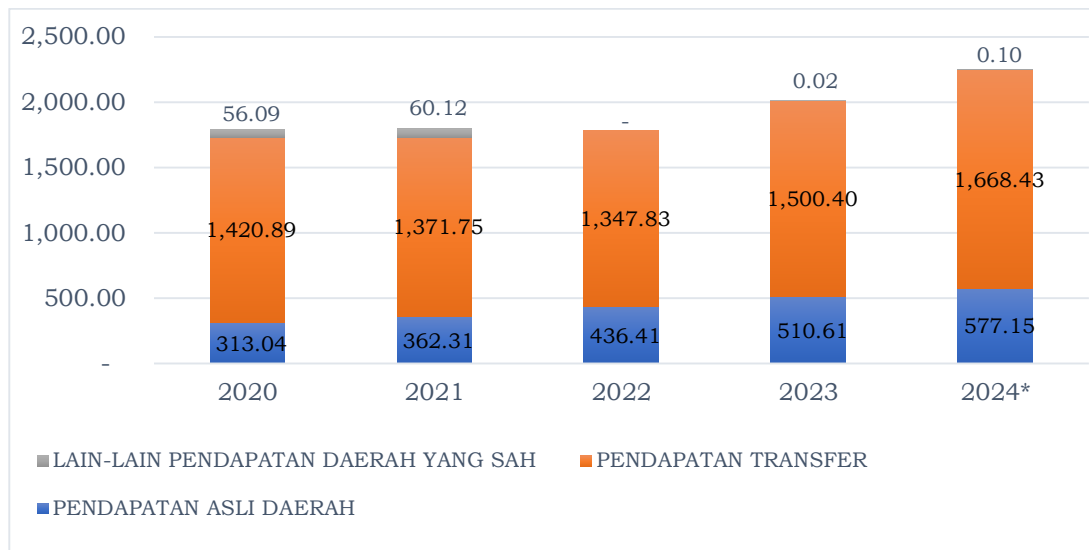
Sumber: LRA Pemkab Tabanan tahun 2020-2024 *unaudited

Gambar 2.25. Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

PAD sepanjang 2020-2024 menunjukkan tren positif, yaitu meningkat 3,03-20,45 persen. Tahun 2020 PAD tercatat sebesar 313,04 milyar rupiah, kemudian meningkat menjadi 362,31 milyar berlanjut menjadi 436,41 milyar, meningkat lagi menjadi 510,61 milyar, dan tahun 2024 tercatat menjadi 577,15 milyar rupiah.

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, pendapatan transfer tercatat sebesar 1.420,89 milyar rupiah, dan mengalami penurunan tahun 2021 menjadi sebesar 1.371,75 milyar rupiah dan tahun 2022 menjadi sebesar 1.347,83 milyar rupiah. Pendapatan transfer kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.500,40 milyar rupiah dan tahun 2024 sebesar 1.668,43 milyar rupiah.

Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, tahun 2020 dan 2021 tercatat sebesar 56,09 milyar rupiah dan 60,12 milyar rupiah. Tahun 2022-2024 pendapatan dari komponen ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berikut digambarkan perkembangan pendapatan daerah berdasarkan komponen pendapatan



Sumber: LRA Pemkab Tabanan tahun 2020-2024 *unaudited

Gambar 2.26. Perkembangan Pendapatan Daerah Berdasarkan Komponen Pendapatan Tahun 2020-2024

Selanjutnya untuk memberikan gambaran secara rinci sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan unsur pembentuknya berikut disajikan dalam tabel.

Tabel 2.45.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 (*Audited*)

Rekening	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	PENDAPATAN	1.789.609.930.388,00	1.794.178.975.870,13	1.784.234.201.539,88	2.011.033.724.130,93	2.245.674.448.462,17
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	313.042.530.522,75	362.314.631.351,11	436.408.393.060,88	510.606.715.917,93	577.145.523.475,17
4.1.01	Pajak Daerah	97.025.277.713,76	144.569.471.370,73	175.842.676.998,40	241.208.821.833,02	303.008.030.542,15
4.1.02	Retribusi Daerah	22.808.553.490,00	39.449.157.390,00	14.607.365.517,00	16.110.297.897,00	217.490.723.389,09
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.285.519.016,75	9.280.451.551,39	8.208.082.924,60	8.782.028.224,57	9.956.749.770,01
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	182.923.180.302,24	169.015.551.038,99	237.750.267.620,88	244.505.567.963,34	46.690.019.773,92
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.420.887.096.851,53	1.371.746.823.106,02	1.347.825.808.479,00	1.500.403.008.213,00	1.668.429.518.987,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.250.104.067.716,00	1.202.758.157.832,00	1.153.687.881.361,00	1.116.982.567.568,00	1.237.866.456.530,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.041.128.166.716,00	1.046.850.417.832,00	1.010.842.324.361,00	993.393.625.568,00	1.093.996.513.530,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.101.550.501,00	31.286.472.664,00	25.917.592.031,00	20.376.033.156,00	21.718.686.910,00
4.2.1.1.2	DAU	757.249.339.000,00	746.276.084.000,00	746.276.084.000,00	772.956.907.000,00	834.380.834.961,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	120.253.912.502,00	130.122.593.387,00	65.135.944.887,00	21.607.724.102,00	54.219.262.420,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	136.523.364.713,00	139.165.267.781,00	173.512.703.443,00	178.452.961.310,00	183.677.729.239,00
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	208.975.901.000,00	155.907.740.000,00	142.845.557.000,00	123.588.942.000,00	143.869.943.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	208.975.901.000,00	155.907.740.000,00	142.845.557.000,00	123.588.942.000,00	118.815.557.000,00
4.2.1.2.1	DID	87.490.362.000,00	31.792.769.000,00	25.359.033.000,00	5.960.430.000,00	0,00
4.2.1.2.5	Dana Desa	121.485.539.000,00	124.114.971.000,00	117.486.524.000,00	117.628.512.000,00	118.815.557.000,00
4.2.1.2.6	Insentif Fiskal				0,00	25.054.386.000,00

Rekening	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	170.783.029.135,53	168.988.665.274,02	194.137.927.118,00	383.420.440.645,00	430.563.062.457,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	116.888.351.037,95	94.452.271.045,02	133.219.272.704,00	155.043.276.252,00	193.253.917.882,00
4.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	116.888.351.037,95	94.452.271.045,02	133.219.272.704,00	155.043.276.252,00	193.253.917.882,00
4.2.2.1.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	71.347.173.764,72	41.015.275.929,87	52.376.835.400,00	53.589.185.848,00	61.458.123.012,00
4.2.2.1.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.643.703.317,02	12.853.532.462,99	22.504.056.894,00	38.986.906.784,00	55.959.453.038,00
4.2.2.1.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.897.473.956,21	20.327.420.963,18	28.401.669.204,00	37.695.604.597,00	50.149.945.898,00
4.2.2.1.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan		165.692.524,26	208.904.599,00	240.097.691,00	313.648.719,00
4.2.2.1.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		20.090.349.164,72	29.727.806.607,00	24.531.481.332,00	25.372.747.215,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	53.894.678.097,58	74.536.394.229,00	60.918.654.414,00	228.377.164.393,00	237.309.144.575,00
4.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	53.394.678.097,58	74.536.394.229,00	30.979.554.414,00	73.312.264.393,00	67.459.536.575,00
4.2.2.2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	-	29.939.100.000,00	155.064.900.000,00	169.849.608.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.092.143.013,72	60.117.521.413,00	0,00	24.000.000,00	99.406.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	6.436.575.829,00			24.000.000,00	
4.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	444.220.983,72	3.673.871.939,00			99.406.000,00
4.3.4	Pendapatan Hibah Dana Bos SD dan SMP	49.211.346.201,00	56.443.649.474,00			

Sumber: LRA Pemkab Tabanan tahun 2020-2024 *unaudited

2.2.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Berikut neraca Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.

Tabel 2.46.
Neraca Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 (*Audited*)

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	ASET					
1	Aset Lancar	110.025.155.659,98	164.220.314.419,02	140.948.178.709,73	186.457.417.066,16	218.500.729.923,93
2	Investasi Jangka Panjang	90.127.845.609,59	80.280.380.643,65	83.187.829.646,40	157.487.058.874,01	165.585.120.004,81
3	Aset Tetap	2.142.831.884.840,61	2.341.773.439.770,70	2.419.145.898.526,42	2.671.804.296.107,78	2.814.119.237.136,38
	Aset Properti Investasi	-	-	-	46.316.099.600,00	46.316.479.600,00
4	Aset Lainnya	8.728.057.428,78	10.283.677.077,65	15.579.331.520,91	24.747.591.452,04	18.069.725.957,70
	JUMLAH ASET	2.351.712.943.538,96	2.596.557.811.911,02	2.658.861.238.403,46	3.086.812.463.099,99	3.262.591.292.622,82
B	KEWAJIBAN					
1	Kewajiban Jangka Pendek	54.178.430.157,06	58.210.477.021,64	57.048.808.147,14	143.141.650.179,23	111.299.981.474,37
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	116.880.384.867,00	103.394.189.580,00	86.911.062.007,00	68.929.468.291,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	54.178.430.157,06	175.090.861.888,64	160.442.997.727,14	230.052.712.186,23	180.229.449.765,37
C	EKUITAS					
1	Ekuitas	2.297.534.513.381,90	2.421.466.950.022,38	2.498.418.240.676,32	2.856.759.750.913,76	3.082.361.842.857,45
	JUMLAH EKUITAS	2.297.534.513.381,90	2.421.466.950.022,38	2.498.418.240.676,32	2.856.759.750.913,76	3.082.361.842.857,45
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.351.712.943.538,96	2.596.557.811.911,02	2.658.916.698.303,46	3.086.812.463.099,99	3.262.591.292.622,82

Sumber: LRA Pemkab Tabanan tahun 2020-2024 *unaudited

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat dilakukan dengan menggunakan

analisis rasio solvabilitas. Rasio aktivitas adalah untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	2,03	2,82	1,98	1,11	1,67
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	1,50	2,31	1,48	0,93	1,38
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,02	0,07	0,06	0,07	0,06
4	Rasio hutang terhadap modal	0,02	0,07	0,06	0,08	0,06

*Sumber: LRA Pemkab Tabanan tahun 2020-2024 *unaudited*

Berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, dan mempertimbangan regulasi pengelolaan keuangan, serta kondisi lingkungan dinamis, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan tahun anggaran 2026-2030 sebagai berikut.

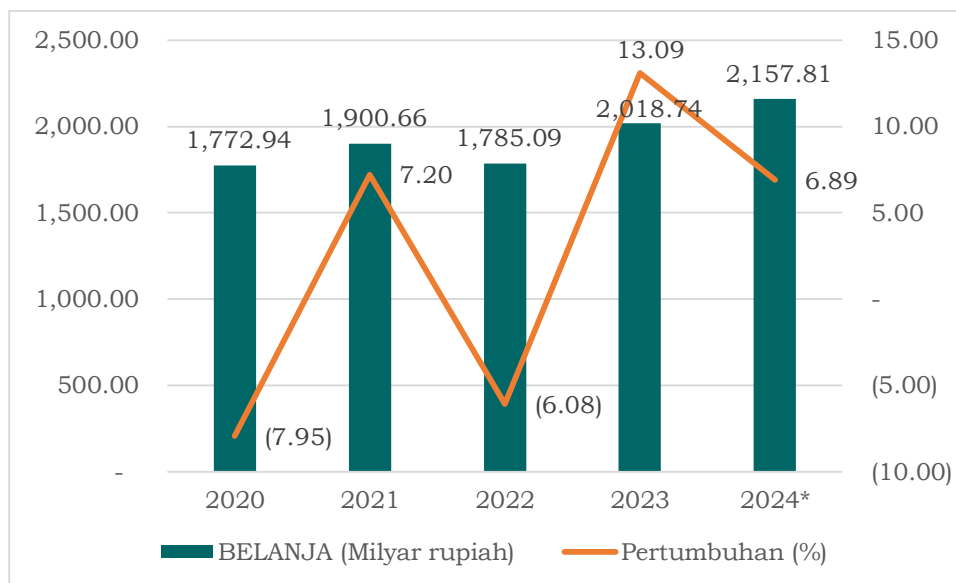
Tabel 2.48.
Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2030

Uraian		Baseline	Proyeksi Tahun				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN							
A	Pendapatan Asli Daerah	577.145.523.475,17	812.650.667.080,14	893.915.733.788,16	983.307.307.166,97	1.081.638.037.883,67	1.189.801.841.672,03
B	Pendapatan Transfer	1.668.429.518.987,00	1.317.949.922.408,00	1.383.847.418.528,40	1.453.039.789.454,82	1.525.691.778.927,56	1.601.976.367.873,94
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	99.406.000,00	-				
	JUMLAH PENDAPATAN	2.245.674.448.462,17	2.130.600.589.488,14	2.277.763.152.316,55	2.436.347.096.621,79	2.607.329.816.811,23	2.791.778.209.545,97
BELANJA							
A	Belanja Operasi	1.579.053.420.061,87	1.756.040.000.000,00	1.843.842.000.000,00	1.936.034.100.000,00	2.032.835.805.000,00	2.151.136.675.476,39
B	Belanja Modal	313.396.425.888,26	135.000.000.000,00	141.750.000.000,00	148.837.500.000,00	163.721.250.000,00	200.093.375.000,00
C	Belanja Tidak terduga	5.855.057.353,00	5.209.135.082,85	5.730.048.591,14	6.303.053.450,25	6.933.358.795,27	7.626.694.674,80
D	Belanja Transfer	259.509.540.000,00	309.351.454.405,29	340.286.599.845,82	374.315.259.830,40	411.746.785.813,44	452.921.464.394,78
	JUMLAH BELANJA	2.157.814.443.303,13	2.205.600.589.488,14	2.331.608.648.436,95	2.465.489.913.280,65	2.615.237.199.608,71	2.811.778.209.545,97
	SURPLUS/DEFISIT	87.860.005.159,04	- 75.000.000.000,00	- 53.845.496.120,40	- 29.142.816.658,86	- 7.907.382.797,48	- 20.000.000.000,00
PEMBIAYAAN							
A	Penerimaan Pembiayaan	21.333.627.719,91	94.231.000.000,00	73.076.496.120,40	48.373.816.658,86	37.907.382.797,48	20.000.000.000,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	17.981.593.716,00	19.231.000.000,00	19.231.000.000,00	19.231.000.000,00	30.000.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	3.352.034.003,91	75.000.000.000,00	53.845.496.120,40	29.142.816.658,86	7.907.382.797,48	20.000.000.000,00

Sumber: LRA Pemkab Tabanan tahun 2020-2024 *unaudited

2.2.3. Gambaran Belanja Daerah

Tren realisasi belanja daerah Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024 menunjuk fluktuatif yang cukup tinggi. Belanja daerah tahun 2020 tercatat sebesar 1.772,94 milyar rupiah, mengalami penurunan sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja daerah ini kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 7,20 persen dibandingkan tahun 2020, menjadi 1.900,99 milyar rupiah, dan kembali mengalami penurunan tahun 2022 sebesar 6,08 persen menjadi 1.785,09 milyar rupiah. Selanjutnya tahun 2023 belanja daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 13,03 persen, menjadi 2.018,74 milyar rupiah, dan tahun 2024 belanja mengalami peningkatan menjadi 2.157,81 milyar rupiah, meskipun peningkatan ini lebih rendah dari tahun 2023. Sebagai gambaran tren realisasi belanja daerah lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.



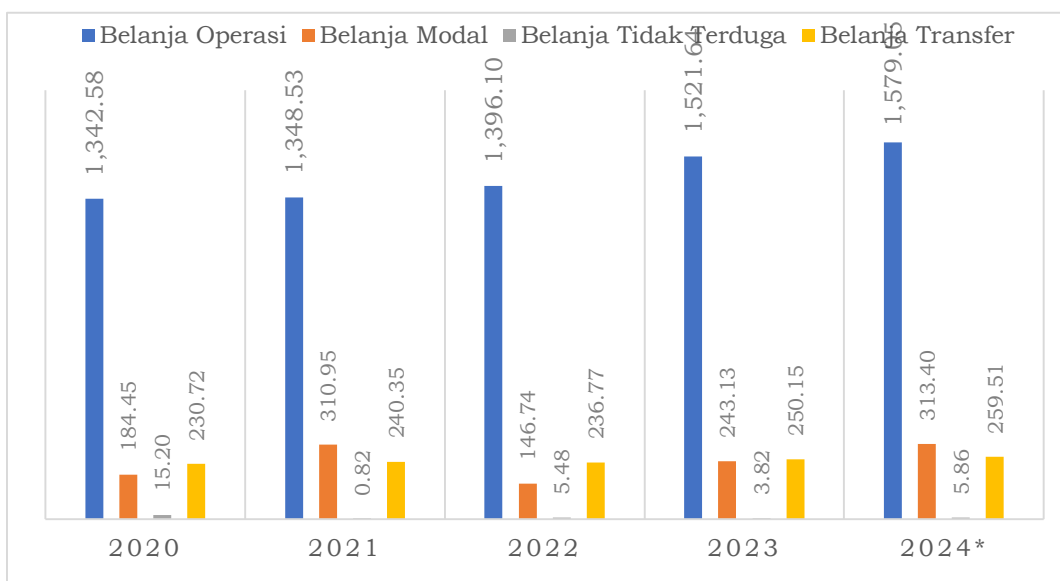
Sumber: Bakeuda Kab. Tabanan, LRA tahun 2020-2024 *unaudited

Gambar 2.27. Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Dari komposisi belanja, terlihat belanja operasi masih memiliki komposisi rata-rata 74,69

persen, diikuti belanja transfer sebesar 12,67 persen, belanja modal sebesar 12,31 persen, dan belanja tidak terduga sebesar 0,33 persen.

Belanja operasi selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif, dimana tahun 2020 tercatat sebesar 1.342,58 milyar rupiah menjadi 1.579,05 milyar rupiah di tahun 2024. Sama halnya dengan belanja transfer daerah menunjukkan tren positif, tahun 2020 tercatat sebesar 230,72 milyar rupiah menjadi 259,51 milyar rupiah tahun 2024, meskipun tahun 2022 sempat mengalami penurunan menjadi 236,77 milyar rupiah, lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Sementara belanja modal tercatat masih fluktuatif positif, tahun 2020 belanja modal tercatat sebesar 184,45 milyar rupiah, meningkat tahun 2021 menjadi 310,95 milyar rupiah, kemudian tahun 2023 turun menjadi 146,74 milyar rupiah, dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 313,40 milyar rupiah. Berikut proporsi belanja daerah berdasarkan komponen belanja.



Sumber: Bakeuda Kab. Tabanan, LRA tahun 2020-2024 *unaudited

Gambar 2.28. Proporsi Belanja Tahun 2020-2024

Proporsi belanja daerah tahun 2020-2024 berdasarkan jenis belanja, menunjukkan belanja pegawai memiliki proporsi terbesar yakni rata-rata 40,88 persen, kemudian belanja barang dan jasa sebesar

27,62 persen, belanja transfer daerah sebesar 11,70 persen, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 5,92persen dan belanja hibah. Tren belanja ini menggambarkan arah kebijakan belanja menekankan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerataan pembangunan berbasis desa, penuntasan penanganan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap, peningkatan kualitas infrastruktur pertanian, serta menjaga ketahanan daerah melalui penguatan adat, tradisi, seni dan budaya. Selengkapnya disajikan gambaran belanja Kabupaten Tabanan tahun 2020-2024.

Tabel 2.49.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

Rekening	Jenis Belanja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	BELANJA	1.772.940.833.272,32	1.900.663.089.772,11	1.785.089.226.450,88	2.018.741.872.404,53	2.157.814.443.303,13
5.1.	BELANJA OPERASI	1.342.580.219.434,99	1.348.532.784.214,61	1.396.099.180.302,14	1.521.641.389.315,76	1.579.053.420.061,87
5.1.01	Belanja Pegawai	759.680.177.044,25	745.077.209.795,33	784.280.457.079,55	771.518.552.549,12	867.377.862.091,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.401.896.980,74	516.155.426.485,28	515.580.417.716,59	597.876.286.909,07	554.121.177.167,04
5.1.03	Belanja Bunga	-	1.811.416.334,00	7.301.022.176,00	7.115.344.887,00	6.082.671.954,00
5.1.05	Belanja Hibah	102.666.370.636,00	85.488.731.600,00	88.937.283.330,00	145.131.204.970,57	151.471.708.849,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.831.774.774,00			-	
5.2.	BELANJA MODAL	184.450.046.640,86	310.954.822.844,50	146.740.172.540,74	243.131.625.567,77	313.396.425.888,26
5.2.01	Belanja Modal Tanah	181.635.740,00	7.062.600,00	10.251.400,00	28.026.000,00	413.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.368.239.096,07	70.504.222.503,50	60.885.599.016,00	37.450.938.386,85	39.119.824.159,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.693.797.463,73	43.913.000.287,00	34.344.798.769,74	75.228.011.690,78	108.270.300.574,26
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.206.374.341,06	195.647.129.974,00	50.353.759.815,00	127.918.857.401,14	162.832.003.580,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	883.407.480,00	1.145.763.540,00	2.423.164.589,00	2.760.797.575,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				82.627.500,00	

Rekening	Jenis Belanja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.195.052.692,47	821.495.693,00	5.479.372.980,00	3.818.441.999,00	5.855.057.353,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.195.052.692,47	821.495.693,00	5.479.372.980,00	3.818.441.999,00	5.855.057.353,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	230.715.514.504,00	240.353.987.020,00	236.770.500.628,00	250.150.415.522,00	259.509.540.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.386.569.504,00	14.767.227.520,00	16.419.512.628,00	22.888.559.522,00	30.960.469.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	220.328.945.000,00	225.586.759.500,00	220.350.988.000,00	227.261.856.000,00	228.549.071.000,00
	Surplus/(Defisit)	16.669.097.116	(106.484.113.902)	(855.024.911)	(7.708.148.274)	(129.830.645.215)

Sumber: Data diolah, 2025

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

2.3.1.1. Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Ketidakmampuan mengakses berbagai layanan dan kurangnya pemahaman pada urusan kesehatan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; ketenagakerjaan; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; serta pertanahan; dapat menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial.

a. Kesehatan

- Masih banyak sampah yang tidak tertangani (lebih dari 50 persen), akan berdampak pada permasalahan kesejahteraan sosial kedepannya. Tercemarnya lingkungan baik itu udara, air dan tanah, menyebabkan penurunan derajat kesehatan masyarakat yang berdampak pada berkurangnya kualitas individu untuk mensejahterakan dirinya;
- Upaya preventif dalam menjaga kualitas kesehatan tidak dilakukan dengan baik sehingga berdampak pada lebih banyaknya biaya untuk penanganan penyakit. Hal ini akan berakibat pada terhambatnya pengalokasian dana untuk pengentasan kemiskinan;
- Belum terlihat perkembangan yang signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi saat ini dalam dunia kesehatan akan berdampak pada kesiapan menghadapi era digitalisasi 20 tahun ke depan.

b. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- Masih terdapat pembukaan lahan baru perumahan saat ini dapat menyebabkan berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian;
- Belum terintegrasinya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tabanan hanya mampu melayani 8 desa di 2

kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kediri) dengan sampah yang tertangani hanya mencapai 44,06 persen.

- Masih terdapat kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Tabanan akan menyebabkan timbulnya persoalan kesehatan dan lingkungan yang menurunkan kualitas hidup individu sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kemiskinan.

c. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- Sampah dan pencemaran lingkungan lainnya tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan individu, tetapi menjadi “bom waktu” bencana alam. Kebakaran, longsor, dan kerusakan ekosistem dapat menjadi permasalahan yang serius dalam 20 tahun kedepan;
- Belum signifikannya perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang akan berdampak pada kesiapan menghadapi era digitalisasi ke depan;
- Kurang kuatnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana (terutama banjir dan tanah longsor). Hal tersebut tergambar dari masih terdapatnya kawasan permukiman rawan bencana yang tersebar di wilayah utara dan barat kabupaten Tabanan dimana masyarakat memiliki hunian didaerah rawan longsor dan banjir.
- Pelaksanaan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum maksimal karena sosialisasi penanganan kebencanaan belum menjangkau seluruh masyarakat.

d. Ketenagakerjaan

Pemberian bantuan ketenagakerjaan baik pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang berasal dari keluarga miskin belum dapat terlaksana dengan maksimal karena terkendala jenis pelatihan yang tidak sesuai maupun lapangan kerja yang jauh dari hunian keluarga miskin.

e. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- Belum terlihat perkembangan yang signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi saat ini dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ini akan berdampak pada kesiapan menghadapi era digitalisasi 20 tahun ke depan. Hal ini berdampak pada ketersediaan data yang tidak presisi sehingga menimbulkan perencanaan yang tidak tepat yang berdampak pada kesejahteraannya;
- Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam meningkatkan kesadaran untuk mitigasi bencana (terutama banjir dan tanah longsor) yang terlihat dari capaian kinerja persentase keluarga yang telah menjalankan fungsi reproduksi, ekonomi, sosial, dan pendidikan dari total jumlah keluarga yang dibina hanya 45 persen. Perempuan dan anak adalah bagian dari keluarga yang memiliki hak bersuara dan hak memperoleh pengetahuan tentang kebencanaan. Pengetahuan mitigasi bencana yang melibatkan seluruh anggota keluarga akan berdampak pada efisiensi pengeluaran keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

f. Pertanahan

- Kebijakan pengelolaan pertanahan baru sebatas pada status kepemilikan dan belum pada upaya peningkatan pemanfaatan tanah bagi keluarga miskin;
- Reformasi administrasi pertanahan masih memiliki banyak kelemahan dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk memiliki lahan tanah.

2.3.1.2. Permasalahan Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi dapat tercapai apabila masyarakat Tabanan memiliki pekerjaan yang layak, berdaya secara ekonomi, serta tercukupi kebutuhan pangannya. Pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan yang layak akan dapat terwujud dengan

memanfaatkan potensi lapangan pekerjaan sesuai karakteristik wilayah Tabanan. Oleh karenanya permasalahan kemandirian ekonomi Tabanan berkaitan erat dengan permasalahan pada urusan ketenagakerjaan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pangan, urusan koperasi dan UKM, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, urusan perindustrian, urusan perdagangan, dan urusan pariwisata.

a. Ketenagakerjaan

- Banyak lulusan BLK Tabanan tidak mendapat pekerjaan;
- Belum ada fasilitasi pelatihan oleh pemerintah yang bersertifikat internasional untuk penyediaan tenaga kerja berkualitas dalam pengembangan industri pariwisata premium (untuk mancanegara) dan pariwisata masal (untuk domestik) serta ekonomi kreatif;
- Perlunya peningkatan pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja produktif di sektor pertanian dan kelautan/perikanan yang didominasi tenaga kerja usia di atas 50 tahun.

b. Pemberdayaan masyarakat dan desa

- Kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam upaya pengembangan industri pariwisata premium (untuk mancanegara) dan pariwisata massal (untuk domestik) dan ekonomi kreatif belum terjadi di semua desa;
- Belum seluruh desa mampu melakukan pengembangan pertanian organik dan sentra pengolahannya di pedesaan;
- Sistem pendataan potensi ekonomi di desa belum menghasilkan data yang presisi.

c. Pangan

- Belum semua desa memiliki pangan olahan alternatif sesuai potensinya.
- Adanya potensi ancaman ketersediaan pangan.

d. Koperasi dan UKM

- Sistem pendataan koperasi dan UKM belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;
- Belum semua desa wisata yang ditetapkan memiliki integrasi peran antara pemerintah, swasta, serta pelaku koperasi dan UKM dalam pengembangan industri pariwisata premium (untuk mancanegara) dan pariwisata massal (untuk domestik) serta ekonomi kreatif (baik dalam upaya menyediakan tenaga kerja yang sesuai, menyediakan tempat wisata baru, menyiapkan produk unggulan, dan arah pemasarannya).

e. Pertanian

- Sistem pendataan pertanian belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian/perkebunan;
- Tabanan sebagai wilayah geografis dengan beragam potensi pertanian, hanya memiliki satu indikasi geografis yaitu kopi di kecamatan Pupuan;
- Belum semua subak tersentuh modernisasi irigasi;
- Belum semua desa wisata yang ditetapkan berkolaborasi dengan urusan pertanian dalam pengembangan industri pariwisata premium (mancanegara) dan pariwisata massal (domestik) serta ekonomi kreatif;
- Tenaga kerja disektor pertanian cenderung menurun dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun.

f. Kelautan dan perikanan

- Belum ada indikasi geografis potensi perikanan di Tabanan;
- Tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan cenderung menurun dan didominasi tenaga kerja usia di atas 50 tahun.

g. Perindustrian

- Sistem pendataan industri belum menghasilkan data yang

presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;

- Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata premium (untuk mancanegara) dan pariwisata massal (untuk domestik);
- Belum optimalnya pengembangan industri ekonomi kreatif: pengembangan industri olahan tenun dan pertanian pendukung kebutuhan pariwisata.

h. Perdagangan

- Sistem pendataan yang terkait urusan perdagangan belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;
- Peran urusan perdagangan dalam mendukung pengembangan industri pariwisata premium dan pariwisata massal, serta ekonomi kreatif belum terjadi di semua desa wisata (hanya pada sebagian desa wisata).

i. Pariwisata

- Tidak ada retribusi khusus dari sektor pariwisata terhadap upaya perbaikan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan;
- Tidak semua desa wisata yang telah ditetapkan mampu mengembangkan industri pariwisata premium dan pariwisata massal yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif;
- Belum adanya penguatan pariwisata regeneratif;
- Terjadi komersialisasi produk budaya yang berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali;
- Tidak semua desa wisata yang ditetapkan mampu meningkatkan keahlian kepariwisataan bagi tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan/perikanan dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

2.3.1.3. Permasalahan Tata Kelola

Tata Kelola pemerintahan yang baik memiliki 5 ciri utama yaitu transparan, independen, akuntabel, partisipatif, dan koordinatif. Beberapa permasalahan penting yang masih terjadi di Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terkait dengan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan wajib pertanahan, urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan wajib statistik, dan urusan wajib kearsipan.

a. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- Belum semua desa mampu menerapkan satu data kependudukan dan pencatatan sipil dari tingkat desa;
- Sistem pendataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital.

b. Pertanahan

- Data alih fungsi lahan belum terintegrasi dengan data tata ruang penggunaan tanah;
- Sistem pendataan pertanahan belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;
- Banyaknya pemanfaatan penduduk lokal Bali untuk kepentingan penguasaan aset.

c. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Sistem tata kelola data di desa belum menghasilkan data yang presisi.

d. Statistik

Belum ada pengelolaan data statistik yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital.

e. Kearsipan

Sistem kearsipan belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital.

2.3.1.4. Permasalahan Daya Saing SDM

Permasalahan daya saing SDM harus dapat ditangani segera karena SDM yang berkualitas memegang peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan 20 tahun ke depan. Berbagai permasalahan yang menghambat daya saing SDM yang masih terjadi saat ini berkaitan dengan urusan wajib dasar pendidikan, urusan wajib perpustakaan, dan urusan wajib ketenagakerjaan.

a. Pendidikan

- Wajib belajar 12 tahun (rata-rata Lama Sekolah 12 tahun) belum tercapai 100 persen untuk semua penduduk usia sekolah;
- Sistem pendataan pendidikan belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;
- Pendidikan karakter lebih berorientasi pada penguasaan kesenian, belum pada penekanan perilaku manusia Tabanan dan belum semua sekolah melaksanakannya.

b. Perpustakaan

- Belum semua sekolah mendapat dukungan peran perpustakaan dalam literasi anak usia sekolah;
- Sistem pendataan yang terkait urusan perpustakaan belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital.

c. Ketenagakerjaan

- Masih banyak lulusan BLK Tabanan tidak mendapatkan

pekerjaan karena tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dunia kerja;

- Kurangnya pelatihan yang mendukung penyediaan tenaga kerja berkualitas dalam pengembangan industri pariwisata premium (untuk mancanegara) dan pariwisata massal (untuk domestik), serta ekonomi kreatif;
- Belum ada kolaborasi antara perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan sumber daya manusia di Tabanan;
- Belum adanya peningkatan pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja produktif dalam mendukung sektor pertanian dan kelautan/perikanan yang didominasi oleh tenaga kerja usia diatas 50 tahun.

2.3.1.5. Permasalahan Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya erat kaitannya dengan generasi muda yang merupakan modal utama dalam pembangunan 20 tahun kedepan. Jika permasalahan ketahanan sosial budaya tidak dapat terselesaikan dengan baik, modal utama pembangunan 20 tahun kedepan akan tergerus. Permasalahan tersebut terkait dengan urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan kebudayaan, serta urusan kepemudaan dan olahraga.

a. Sosial

- Belum optimalnya penanganan masalah sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data menunjukkan masih terdapat 213.554 fakir miskin di Kabupaten Tabanan di tahun 2022. Pandemi seperti covid-19 yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan mengganggu ketahanan sosial harus dapat diantisipasi dengan baik kedepannya;
- Perubahan perilaku sosial generasi muda yang lebih banyak

berinteraksi melalui media teknologi informasi sosial, semakin mengikis semangat hidup sosial dalam kebersamaan dan gotong- royong.

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Perlu peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan peningkatan ketahanan sosial budaya.

c. Kebudayaan

- Belum semua desa wisata yang telah ditetapkan memiliki kolaborasi antara pekerja seni dalam pengembangan industri pariwisata dalam menunjukkan jati diri budaya Bali;
- Perkembangan teknologi informasi yang pesat mempengaruhi derasnya informasi budaya asing serta semakin terkikisnya pengetahuan dan ingatan tentang budaya luhur bangsa;
- Belum optimalnya pencegahan komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi yang berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali;
- Kegiatan adat dalam menjalankan semangat hidup kebersamaan dan gotong-royong baik di banjar adat maupun desa adat semakin berkurang. Contoh banyaknya upacara ngaben di krematorium tanpa melibatkan banjar adat;
- Degradasi adat, tradisi, seni dan budaya akibat globalisasi. Hal ini terjadi karena komersial produk budaya dan terjadinya akulturisasi budaya luar Bali;
- Keberadaan lembaga subak semakin berkurang karena alih fungsi lahan, abrasi pantai dan keterbatasan air irigasi.

d. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum adanya kegiatan rutin yang melibatkan organisasi kepemudaan dalam peningkatan ketahanan sosial budaya untuk kembali menumbuhkan semangat hidup kebersamaan dan gotong-royong yang semakin menurun sehingga berpotensi mudah dipecah belah;
- Belum optimalnya kolaborasi dengan organisasi kepemudaan

dalam mencegah komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali.

2.3.1.6. Permasalahan Infrastruktur Fisik dan Digital

Salah satu bukti capaian pembangunan adalah infrastruktur yang layak. Infrastruktur yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan di Kabupaten Tabanan tidak hanya infratuktur fisik, tetapi juga infrastruktur digital. Oleh sebab itu berbagai permasalahan yang masih terjadi harus dapat diselesaikan untuk mencapai target pembangunan 5 tahun ke depan.

a. Pekerjaan umum dan penataan ruang

- Sistem pendataan yang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;
- Masih terdapat pembangunan fisik oleh masyarakat di lahan rawan bencana longsor dan banjir;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perawatan fasilitas umum infrastruktur yang berdampak pada umur fisik dan kebutuhan perbaikan yang tinggi;
- Bangunan baru tidak menggunakan arsitektur Bali.

b. Komunikasi dan informatika

- Infrastruktur digital yang menyediakan sistem pendataan di berbagai urusan belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;
- Masih perlunya peningkatan kontribusi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pembangunan ekosistem digital di wilayah Bali.

c. Persandian

- Infrastruktur digital yang menyediakan sistem pendataan

pada urusan persandian belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;

- Belum optimalnya pengamanan data mulai dari desa.

2.3.1.7. Permasalahan Lingkungan

Pembangunan akan terlaksana dengan baik bila lingkungan yang dimiliki mampu menyediakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu permasalahan lingkungan saat ini harus mampu diantisipasi dan diselesaikan dengan segera agar tidak berdampak buruk bagi pembangunan dalam 20 tahun kedepan.

a. Perhubungan

- Belum adanya penerapan transportasi massal ramah lingkungan (*electrical vehicles*);
- Sistem pengawasan dan pelayanan publik secara digital dalam urusan perhubungan darat belum optimal (belum semua *traffic light* dilengkapi CCTV dan terhubung dengan ATCS).

b. Lingkungan hidup

- Perlunya peningkatan pengawasan alih fungsi lahan pertanian/perkebunan yang berdampak pada kerusakan ekosistem;
- Perlunya lahan tempat pembuangan akhir sampah;
- Perlunya perbaikan pengelolaan sampah;
- Masih minimnya upaya pembangunan rendah karbon untuk mendukung ketahanan energi dan air;
- Upaya menyelesaikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan penurunan emisi gas rumah kaca (polusi kendaraan) belum optimal;
- Masih minimnya upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam berbagai bidang kehidupan.

2.3.1.8. Permasalahan Kestinambungan Pembangunan

Faktor utama yang mempengaruhi terlaksananya kestinambungan pembangunan adalah pendanaan. Sumber pendanaan pembangunan yang tidak membebani masyarakat bersumber dari penanaman modal atau investasi baik dari pemilik modal dalam maupun luar negeri. Berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan penanaman modal harus mampu diselesaikan sehingga tujuan pembangunan 20 tahun kedepan dapat tercapai.

a. Penanaman modal

- Tidak adanya dokumen profil investasi kabupaten menyebabkan tidak optimalnya upaya menarik penanaman modal asing dan lokal dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Tabanan terutama untuk pengembangan industri pariwisata premium (untuk mancanegara) dan pariwisata massal (untuk domestik) serta ekonomi kreatif;
- Sistem pengawasan dan pelayanan publik secara digital dalam urusan penanaman modal belum dimanfaatkan secara optimal. Sistem pendataan yang terkait urusan penanaman modal belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat untuk membantu pengawasan dan pelayanan publik secara digital;
- Belum adanya investasi skala besar dibidang teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekosistem digital di wilayah Bali;
- Belum adanya upaya mengkaji intensifikasi pajak dan pendanaan melalui pola penanaman modal KPBU.

2.3.2 Isu Strategis

Pembangunan sebagai sebuah proses sudah barang tentu memiliki tantangan dan permasalahan sesuai karakteristik wilayah dan sumber daya yang dimiliki. Dalam perjalanan dua puluh tahun terakhir sudah barang tentu terdapat capaian yang baik dan beberapa perlu perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Kedepan tantangan dan ancaman akan semakin kompleks, ancaman ketahanan pangan, lingkungan, daya saing sumberdaya manusia, dan penguasaan teknologi informasi sebagai sebuah tuntutan. Oleh karena itu, perlu terus mengoptimalkan seluruh potensi sebagai sebuah peluang melalui tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan. Isu yang akan dihadapi selama dua puluh tahun mendatang seperti tercantum dibawah ini.

2.3.2.1. Isu Strategis Kesejahteraan Sosial

- Penuntasan penanganan kawasan kumuh yang ada di wilayah Tabanan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan;
- Peningkatan kolaborasi urusan kesehatan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan;
- Peningkatan usia harapan hidup 80 tahun;
- Alih fungsi lahan pertanian/perkebunan menjadi lahan perumahan dan permukiman;
- Penguasaan aset oleh warga negara asing semakin tinggi.

2.3.2.2. Isu Strategis Kemandirian Ekonomi

- Penambahan Indikasi Geografis (IG) terhadap potensi-potensi pertanian dalam arti luas;
- Modernisasi irigasi pertanian;
- Pengembangan pertanian organik dan sentra pengolahannya di pedesaan;
- Percepatan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada potensi sektor pendukung PDRB selain pertanian;

- Pengembangan obyek wisata baru dalam mewujudkan industri pariwisata premium (untuk mancanegara) dan pariwisata massal (untuk domestik);
- Pengembangan ekonomi kreatif melalui penyediaan tenaga kerja kreatif, branding produk unggulan Tabanan, dan arah pemasaran terfokus, untuk pendukung kebutuhan pariwisata;
- Dukungan terhadap penguatan pariwisata regeneratif Bali.

2.3.2.3. Isu Strategis Tata Kelola

- Optimalisasi sistem pengawasan dan pelayanan publik secara digital dalam berbagai bidang pemerintahan;
- Optimalisasi tata kelola satu data yang presisi, aman, terintegrasi, dan mandiri.

2.3.2.4. Isu Strategis Daya Saing SDM

- Penyediaan sumber daya manusia usia produktif dalam pengelolaan potensi pertanian;
- Penyediaan sumber daya manusia usia produktif yang akan mendukung pengembangan industri pariwisata premium (untuk mancanegara) dan pariwisata massal (untuk domestik);
- Penyediaan sumber daya manusia usia produktif sebagai pelaku ekonomi kreatif;
- Penguatan lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi serta perangkat daerah yang menangani urusan riset dan inovasi dalam meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan pasar regional dan global;
- Penyediaan tenaga pendidik dengan jumlah yang memadai dan tersebar merata antar kecamatan;
- Peningkatan fasilitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan menengah pertama;
- Peningkatan kualitas pendidikan karakter yang lebih berorientasi pada penekanan penilaian perilaku manusia Tabanan;

- Penuntasan wajib belajar 12 tahun.

2.3.2.5. Isu Strategis Ketahanan sosial dan budaya

- Adanya komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya kesakralan dan orisinalitas produk budaya lokal;
- Semangat hidup kebersamaan dan gotong-royong semakin menurun (berpotensi mudah dipecah belah);
- Peningkatan ketahanan sosial dalam menghadapi serangan budaya asing yang berdampak pada terganggunya kehidupan sosial masyarakat;
- Peningkatan peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan ketahanan sosial budaya.

2.3.2.6. Isu Strategis Infrastruktur Fisik dan Digital

- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana (terutama banjir dan tanah longsor) dan perawatan fasilitas umum infrastruktur yang berdampak pada umur fisik dan kebutuhan perbaikan yang tinggi;
- Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali;
- Dukungan terhadap pembangunan ekosistem digital di wilayah Bali;
- Optimalisasi sistem pengawasan dan pelayanan publik secara digital;
- Pengembangan dan pemantapan platform digital dalam mewujudkan sistem satu data yang presisi, aman, terintegrasi, dan mandiri.

2.3.2.7. Isu Strategis Lingkungan

- Pengembangan penerapan transportasi ramah lingkungan (*electrical vihicles*);
- Memperkuat kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana (terutama banjir dan tanah longsor);

- Pembangunan rendah karbon yang mendukung ketahanan energi dan air;
- Penyelesaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari polusi kendaraan;
- Perlunya lahan tempat pembuangan akhir sampah;
- Perlunya perbaikan pengelolaan sampah;
- Belum terintegrasinya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
- Belum adanya strategi yang jelas dan berkelanjutan antara berbagai urusan yang terkait dalam upaya mitigasi dan pengelolaan pencemaran lingkungan.

2.3.2.8. Isu Strategis Kestinambungan Pembangunan

- Kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Pemantapan manajemen pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);
- Perluasan upaya pelaksanaan pembangunan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) pada sektor-sektor dengan biaya tinggi;
- Intensifikasi pajak dan pendanaan dalam upaya pelaksanaan pembangunan melalui skema KPBU;
- Peningkatan pendapatan asli daerah tanpa membebani perekonomian penduduk Tabanan.

Tabel 2.50.
Penyimpulan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Angka kemiskinan menunjukkan trend penurunan 2. Indeks Gini menunjukkan trend penurunan 3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus menurun 4. Tersedianya Rumah Singgah 5. Tersedianya Panti Jompo	Permasalahan Kesejahteraan Sosial: - Masih banyak sampah yang tidak tertangani (lebih dari 50 persen), - Upaya preventif menjaga kualitas kesehatan tidak dilakukan dengan baik sehingga berakibat pada pengentasan kemiskinan; - Belum terlihat perkembangan yang signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi - Masih terdapat pembukaan lahan baru perumahan; - Belum terintegrasinya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan	- Potensi Penurunan Kualitas Kesehatan - Potensi Penurunan Kualitas Pendidikan - Penurunan Kesejahteraan Masyarakat - Penurunan Kesempatan Kerja di Berbagai Sektor - Peningkatan Kebutuhan Infrastruktur Wilayah - Pencemaran Lingkungan - Peningkatan Resiko Kebencanaan	1. Perubahan Iklim yang berdampak pada peningkatan bencana alam yang menimbulkan kerugian terhadap sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak 2. Krisis air bersih yang disebabkan oleh peningkatan permintaan air bersih dan degradasi lingkungan yang menyebabkan ancaman kesehatan, ketahanan pangan, dan	1. Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan masih terbatas sehingga kualitas layanan ketenagalistrikan masih rendah 2. Tata kelola ruang digital belum kondusif 3. Belum optimalnya tata kelola jalan daerah 4. Terbatasnya sistem angkutan masal perkotaan yang berimplikasi pada tingginya kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas 5. Sebagian besar pelaku usaha	1. Kecukupan dan kualitas konsumsi pangan belum optimal 2. Pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal 3. Perekonomian daerah masih rendah 4. Penerapan ekonomi hijau masih rendah 5. Kualitas lingkungan hidup masih rendah 6. Keterbatasan daya dukung dan pelayanan air bersih belum merata 7. Pengarusutamaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan	Isu Strategis Kesejahteraan Sosial: - Penuntasan penanganan kawasan kumuh; - Peningkatan kolaborasi urusan kesehatan; - Peningkatan usia harapan hidup 80 tahun; - Alih fungsi lahan pertanian/perkebunan; - Penguasaan aset oleh warga negara asing .

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	sampah. - Masih terdapat kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Tabanan - Sampah dan pencemaran lingkungan lainnya menjadi “bom waktu” bencana alam.; - Kurang kuatnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana (terutama banjir dan tanah longsor). Pelaksanaan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum maksimal - Pemberian bantuan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin belum dapat terlaksana dengan maksimal. - Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam meningkatkan kesadaran untuk mitigasi bencana (terutama banjir dan		keberlangsungan ekosistem 3. Pencemaran mikro plastik yang mengganggu ekosistem laut, kontaminasi lingkungan, dan tercemarnya sumber daya air 4. Deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan, pencemaran udara yang terkontaminasi partikel padat dan partikel berbahaya 5. Pemanasan global akibat dari peningkatan gas rumah kaca	masih berskala mikro, belum mampu menyediakan lapangan kerja yang baik 6. Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian 7. Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha, dan UMKM 8. Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri 9. Rendahnya literasi dan tingginya <i>gap</i> antara inklusi dan literasi keuangan	berkelanjutan keanekaragaman hayati belum optimal 8. Kualitas kesehatan belum optimal 9. Pemerataan dan mutu pendidikan belum optimal 10. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial belum optimal 11. Prasarana dan sarana wilayah kurang memadai	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	tanah longsor) - Belum ada upaya peningkatan pemanfaatan tanah bagi keluarga miskin; - Reformasi administrasi pertanahan masih memiliki banyak kelemahan dan celah.			10. Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal 11. Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan 12. Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal 13. Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual		
1. Tabanan telah memasuki periode <i>window of opportunity</i> untuk menikmati bonus demografi 2. Laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat setiap tahunnya 3. Telah terbukanya potensi wisata desa	Permasalahan Kemandirian Ekonomi: - Banyak lulusan BLK Tabanan tidak mendapat pekerjaan; - Belum ada fasilitasi pelatihan oleh pemerintah yang bersertifikat internasional - Perlunya peningkatan pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja produktif di sektor pertanian dan kelautan/perikanan - Belum ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam upaya pengembangan industri pariwisata premium dan					Isu Strategis Kemandirian Ekonomi: - Penambahan Indikasi Geografis (IG); - Modernisasi irigasi pertanian; - Pengembangan pertanian organik; - Percepatan pertumbuhan ekonomi; - Pengembangan obyek wisata baru; - Pengembangan ekonomi kreatif; - Dukungan terhadap penguatan pariwisata regeneratif Bali.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	pariwisata massal; - Belum seluruh desa mampu mengembangkan pertanian organik - Sistem pendataan potensi ekonomi di desa belum presisi. - Belum semua desa memiliki pangan olahan alternatif sesuai potensinya. - Adanya potensi ancaman ketersediaan pangan. - Tabanan hanya memiliki satu indikasi geografis (IG); - Belum semua subak tersentuh modernisasi irigasi; - Tenaga kerja disektor pertanian cenderung menurun dan didominasi usia di atas 50 tahun. - Belum optimalnya pengembangan industri pendukung kebutuhan pariwisata. - Tidak ada retribusi			14.Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah 15.Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum maksimal dalam mendukung ekosistem kekayaan intelektual		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	khusus dari sektor pariwisata terhadap pengelolaan sampah - Belum adanya penguatan pariwisata regeneratif; - Terjadi komersialisasi produk budaya Bali;					
1. Predikat WTP selama 11 tahun berturut-turut 2. Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam predikat baik	Permasalahan Tata Kelola: - Belum semua desa mampu menerapkan satu data kependudukan dan pencatatan sipil; - Sistem pendataan pendidikan, perpustakaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, tata kelola data di desa, serta pengelolaan data statistik belum menghasilkan data yang presisi yang mampu diakses masyarakat. - Data alih fungsi lahan belum terintegrasi dengan data tata ruang penggunaan tanah;					Isu Strategis Tata Kelola: - Optimalisasi sistem pengawasan dan pelayanan publik secara digital; - Optimalisasi tata kelola satu data.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	- Sistem pendataan pertanahan belum menghasilkan data yang presisi; - Banyaknya pemanfaatan penduduk lokal Bali untuk kepentingan penguasaan aset.					
1. Tingkat pengangguran rendah 2. Umur Harapan Hidup tinggi	Permasalahan Daya Saing SDM: - Wajib belajar 12 tahun (rata-rata Lama Sekolah 12 tahun) belum tercapai 100%; - Pendidikan karakter lebih berorientasi pada penguasaan kesenian, belum pada penekanan perilaku manusia Tabanan - Belum semua sekolah mendapat dukungan peran perpustakaan dalam literasi anak usia sekolah; - Masih banyak lulusan BLK Tabanan tidak terserap dunia kerja; - Kurangnya pelatihan yang mendukung penyediaan tenaga					Isu Strategis Daya Saing SDM: - Penyediaan sumber daya manusia usia produktif dalam pengelolaan potensi pertanian; - Penyediaan sumber daya manusia usia produktif); - Penguatan lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi; - Penyediaan tenaga pendidik dengan jumlah yang memadai dan tersebar merata antar kecamatan; - Peningkatan fasilitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan menengah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	kerja berkualitas; - Belum ada kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan sumber daya manusia di Tabanan; - Belum adanya peningkatan pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja produktif dalam mendukung sektor pertanian dan kelautan/perikanan - Tingginya alih fungsi lahan, abrasi pantai dan keterbatasan air irigasi					pertama; - Peningkatan kualitas pendidikan karakter; - Penuntasan wajib belajar 12 tahun.
1. Banyaknya cagar budaya 2. Banyaknya karya warisan 3. Banyaknya banjar adat 4. Banyaknya sanggar kesenian 5. Indeks Pembangunan Kebudayaan tinggi	Permasalahan Ketahanan Sosial Budaya: - Belum optimalnya penanganan masalah sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.; - Perubahan perilaku sosial generasi muda yang lebih banyak berinteraksi melalui media teknologi informasi sosial. - Perlu peningkatan					Isu Strategis Ketahanan sosial dan budaya: - Adanya komersialisasi produk budaya; - Semangat hidup kebersamaan dan gotong-royong semakin menurun; - Peningkatan ketahanan sosial; - Peningkatan peran organisasi kepemudaan.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan peningkatan ketahanan sosial budaya. - Belum semua desa wisata melakukan kolaborasi antara pekerja seni dalam pengembangan industri pariwisata dalam menunjukkan jati diri budaya Bali; - Perkembangan teknologi informasi di era modern semakin mengikis pengetahuan dan ingatan tentang budaya luhur bangsa; - Belum optimalnya pencegahan komersialisasi produk budaya seni tradisional - Menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali; - Menurunnya budaya kebersamaan dan gotong-royong dalam menjalankan aktivitas					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	budaya Bali; - Degradasi adat, tradisi, seni dan budaya akibat globalisasi; - Keberadaan lembaga subak semakin berkurang. - Menurunnya kegiatan rutin yang melibatkan organisasi kepemudaan dalam peningkatan ketahanan sosial budaya; - Belum optimalnya kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dalam mencegah komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi.					
1. Seluruh wilayah terhubung dengan jalan kabupaten yang mantap 2. Terpeliharanya jaringan irigasi 3. Telah memiliki <i>Tabanan</i>	Permasalahan Infrastruktur Fisik dan Digital: - Sistem pendataan yang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang belum menghasilkan data yang presisi; - Masih terdapat					Isu Strategis Infrastruktur Fisik dan Digital: - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana; - Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<i>Command Centre (TCC)</i> 4. Tersedianya jaringan <i>fiber optic</i> 5. Tersedianya wifi di setiap banjar adat	pembangunan fisik oleh masyarakat di lahan rawan bencana longsor dan banjir; - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perawatan fasilitas umum infrastruktur; - Bangunan baru tidak menggunakan arsitektur Bali. - Infrastruktur digital yang menyediakan sistem pendataan di berbagai urusan belum menghasilkan data yang presisi; - Masih perlunya peningkatan kontribusi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pembangunan ekosistem digital di wilayah Bali. - Belum optimalnya pengamanan data mulai dari desa.					terhadap arsitektur khas Bali; - Dukungan terhadap pembangunan ekosistem digital di wilayah Bali; - Optimalisasi sistem pengawasan dan pelayanan publik secara digital; - Pengembangan dan pemantapan platform digital.
1. Sudah ada Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Permasalahan Lingkungan: - Belum adanya penerapan transportasi massal ramah					Isu Strategis Lingkungan: - Pengembangan penerapan transportasi ramah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2. Telah ditetapkan Lahan Sawah Dilindungi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perda RTRW 2023-2043	lingkungan (<i>electrical vihicles</i>); - Perlunya peningkatan pengawasan alih fungsi lahan pertanian/ perkebunan; - Perlunya lahan tempat pembuangan akhir sampah; - Perlunya perbaikan pengelolaan sampah; - Masih minimnya upaya pembangunan rendah karbon untuk mendukung ketahanan energi dan air; - Upaya menyelesaikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan penurunan emisi gas rumah kaca (polusi kendaraan) belum optimal; - Masih minimnya upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam berbagai bidang kehidupan.					lingkungan (<i>electrical vihicles</i>); - Memperkuat kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana; - Pembangunan rendah karbon; - Penyelesaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari polusi kendaraan; - Perlunya lahan tempat pembuangan akhir sampah; - Perlunya perbaikan pengelolaan sampah; - Belum terintegrasinya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan limbah; - Belum adanya strategi yang jelas dan berkelanjutan antara berbagai urusan yang terkait dalam upaya

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						mitigasi dan pengelolaan pencemaran lingkungan.
1. Pendapatan Daerah Selalu Meningkat setiap tahun 2. Telah ditetapkan kawasan industri untuk menarik investasi	Permasalahan Kesenambungan Pembangunan: - Tidak adanya dokumen profil investasi kabupaten; - Sistem pengawasan dan pelayanan publik secara digital dalam urusan penanaman modal belum dimanfaatkan secara optimal.; - Belum adanya investasi skala besar dibidang teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekosistem digital di wilayah Bali; - Belum adanya upaya mengkaji intensifikasi pajak dan pendanaan melalui pola penanaman modal KPBU.					Isu Strategis Kesenambungan Pembangunan: - Kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional; - Pemantapan manajemen pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR); - Perluasan upaya pelaksanaan pembangunan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU); - Intensifikasi pajak dan pendanaan; - Peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana periode tahun 2025-2029 merupakan periode lima tahunan pertama pelaksanaan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Tabanan 2025-2045. Periode ini diarahkan untuk penguatan transformasi dengan arah kebijakan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, membangun kemandiri ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan daerah melalui ketahanan adat dan budaya, serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan Tabanan. Sejalan dengan hal tersebut dan hasil pemetaan permasalahan dan isu strategis pada uraian sebelumnya, maka dirancanglah visi dan misi Kabupaten Tabanan lima tahun ke depan. Visi dan misi ini mengedepankan kearifan lokal sebagai pondasi pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu pulau satu tata kelola (*one island one management*).

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 dalam penyusunannya selain menggunakan 7 (tujuh) pendekatan, juga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal *Bali Sad Kerthi*, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali. *Sad Kerthi* meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*), yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana*

yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

3.1.1. Visi

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini dan tantangan masa depan, serta menjamin keberlanjutan pemebangunan maka visi jangka menengah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 adalah:

**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA
BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN,
UNGGUL, MADANI (AUM)**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan *gumi* Tabanan yang sejahtera dan bahagia, *sekala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang **Aman, Unggul dan Madani (AUM)**.

Tabanan Aman, Unggul dan Madani (AUM) diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan dengan menjamin rasa aman masyarakat Tabanan dan meningkatkan keunggulan daerah atas 5 (lima) bidang prioritas yang didukung 2 (dua) bidang penunjang yaitu:

1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan;
2. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya;
5. Bidang Pariwisata;
6. Bidang Infrastruktur Fisik dan Digital;
7. Bidang Lingkungan Hidup.

Tabanan Aman, dimaknai sebagai terpenuhinya hak dasar bagi setiap individu dalam menjalankan swadarmanya yang diwujudkan melalui pemenuhan hak pelayanan dasar warga, pembangunan yang berorientasi pada daya dukung, dan daya tampung lingkungan yang didukung infrastruktur yang memadai. Tabanan aman ditandai dengan peningkatan nilai SPM, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Indeks Kepuasan Infrastruktur Daerah.

Tabanan Unggul, dimaknai sebagai Sumber Daya Manusia Tabanan yang memiliki daya saing tinggi di segala bidang yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan daerah yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai luhur, norma yang baik, serta hukum positif. Tabanan Unggul ditandai dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indek Daya Saing Daerah, Nilai SPBE, Indek Inovasi Daerah, Rasio Kemandirian Fiscal.

Tabanan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan, yang ditandai dengan peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan, penurunan Angka Pengangguran dan Indek Gini, Indeks Ketahanan Pangan,

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB, Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan.

Sebagaimana makna Tabanan Aman, Unggul dan Madani (AUM), dalam implementasinya berpedoman pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu:

1. Dimensi Pertama, terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*)
 - a. Terpeliharanya Alam Tabanan secara sekala dan niskala yang diwujudkan dengan memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan *Upakara/Upacara Pakertih Yadnya* secara periodik, yaitu: *Atma Kerthi, Segara Kerthi, Wana Kerthi, Danu Kerthi, Jana Kerthi* dan *Jagat Kerthi*;
 - b. Mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* baik secara *sakala maupun niskala: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Wana Kerthi, Danu Kerthi, Jana Kerthi* dan *Jagat Kerthi*;
 - c. Memajukan kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang menjiwai seluruh aspek pembangunan di Tabanan meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
2. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan meliputi kebutuhan dasar masyarakat tabanan meliputi :

- a. Terpenuhiya pangan, sandang dan papan;
 - b. Terpenuhiya pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang memadai;
 - c. Terpenuhiya jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata dan berkeadilan;
 - d. Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - e. Terpenuhiya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan;
 - f. Terpenuhiya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.
3. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, maupun global, yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang, melalui:
- a. Penguatan dan pelebagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh;
 - b. Pengarusutamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian;
 - c. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan;
 - d. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali;
 - e. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat Tabanan.

Pencapaian visi “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM)**” lima tahun ke depan dilakukan dengan 6 misi daerah meliputi 5 bidang prioritas yang didukung dengan infrastruktur fisik dan digital.

3.1.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Tabanan 2025-2029 yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti (berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan) atas: Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; serta Pariwisata, diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

➤ **Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri.**

Pondasi pembangunan Tabanan terletak pada sumberdaya manusianya. Pada misi ini dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia Tabanan melalui pendidikan formal, informal dan non formal, serta pendidikan vokasi dengan muatan lokal untuk membentuk jati diri manusia Tabanan sehingga mampu menggerakkan sumberdaya ekonomi.

➤ **Misi 2: Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani.**

Akses kesehatan merupakan pemenuhan atas hak dasar masyarakat untuk mendukung produktivitas. Jaminan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan melalui

menyediakan layanan kesehatan primer terpadu dan keterlibatan keluarga untuk terwujudnya keluarga sehat dan berkualitas.

- **Misi 3: Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif.**

Memajukan ekonomi kerakyatan yang produktif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan mengelola seluruh sumberdaya melalui penguatan kelembagaan baik koperasi, BUMDes, dan perluasan akses permodalan bagi UMKM untuk tumbuh bersama demi mewujudkan keadilan sosial.

- **Misi 4: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal,**

Kunci kemandirian ekonomi terletak pada upaya daerah untuk mengelola seluruh potensi sumber daya untuk masuk pada upaya hilirisasi komoditas unggulan potensial melalui investasi berkelanjutan berbasis kawasan sehingga memiliki daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- **Misi 5: Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban.**

Upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan tidak diskriminatif sebagai kebutuhan untuk menjamin hak masyarakat. Upaya ini tentunya membutuhkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, bebas korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

➤ **Misi 6: Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia.**

Adat, tradisi, seni dan budaya yang dimiliki sesungguhnya adalah kekuatan untuk membangun Tabanan. Pengaruh globalisasi tidak dapat dipungkiri menyebabkan degradasi nilai-nilai warisan para leluhur dalam menjaga keharmonisan alam, manusia dan kebudayaan Bali.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator sebagai alat ukur kinerja yang bersifat operasional. Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator sebagai alat ukur kinerja yang bersifat operasional. Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri, dengan 1 (satu) tujuan yaitu:

Tujuan 1. Terwujudnya Masyarakat Tabanan cerdas, berkarakter, produktif, memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha.

Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi Anak Usia Sekolah;

Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Literasi Masyarakat Tabanan

Sasaran 1.1.3. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga;

Sasaran 1.1.4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tabanan

Sasaran 1.1.5. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Misi 2 : Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani, dengan 1(satu) tujuan yaitu:

Tujuan 2.1. Meningkatkan Akses Kesehatan yang Berkualitas dan Merata.

Sasaran 2.1.1. Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Berkeadilan;

Sasaran 2.1.2. Meningkatkan Kesehatan Keluarga untuk Menciptakan Keluarga Unggul.

Sasaran 2.1.3. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat;

Sasaran 2.1.4. Meningkatkan Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Misi 3 : Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif. Misi ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

Tujuan 3.1. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan ekonomi kerakyatan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan.

Sasaran 3.1.1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan;

Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM;

Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

Tujuan 3.2. Meningkatnya ketersediaan pangan untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Sasaran 3.2.1. Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang berkualitas.

4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, misi memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

Tujuan 4.1. Terwujudnya kemandirian ekonomi Tabanan yang merata dan berkelanjutan.

Sasaran 4.1.1. Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif

Sasaran 4.1.2. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah Perdagangan;

Sasaran 4.1.4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Tujuan 4.2. Terwujudnya kapasitas inovasi daerah.

Sasaran 4.2.1. Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah

5. Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban. Misi ini memiliki 2 (dua) tujuan:

Tujuan 5.1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN.

- Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan;
- Sasaran 5.1.2. Terwujudnya Transformasi Layanan Publik berbasis digital dan Keamanan Informasi;
- Sasaran 5.1.3. Terwujudnya Profesionalitas ASN;
- Sasaran 5.1.4. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- Sasaran 5.1.5. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Sasaran 5.1.6. Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah;
- Sasaran 5.1.7. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Sasaran 5.1.8. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien;
- Sasaran 5.1.9. Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau;
- Sasaran 5.1.10. Meningkatnya Layanan Statistik;
- Tujuan 5.2 Terwujudnya Stabilitas Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- Sasaran 5.2.1. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat;
- Sasaran 5.2.2. Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;

6. Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia,
 misi memiliki 3 (tiga) tujuan :

Tujuan 6.1. Melestarikan dan mengembangkan nilai adat, tradisi, seni dan budaya daerah.

Sasaran 6.1.1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

Sasaran 6.1.2. Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan 6.2. Menumbuhkan Semangat Kebhinekaan dan Toleransi

Sasaran 6.2.1. Meningkatnya Pemahaman Politik

Sasaran 6.2.2. Meningkatnya Ketahanan Daerah

Tujuan 6.3. Terjaganya kelestarian alam Tabanan yang bersih, sehat dan lestari.

Sasaran 6.3.1. Meningkatnya Tata Kelola Persampahan

Sasaran 6.3.2. Meningkatnya ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2030

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urutan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM)													
1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri													
1.1	Terwujudnya masyarakat Tabanan cerdas, berkarakter, produktif, memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	76,17	79,02	79,65	80,28	80,91	81,54	82,17	82,17	Pendidikan
	1.1.1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi Anak Usia Sekolah	Indeks Pendidikan	Angka	Tuntas Pratama (77,79)	Tuntas Madya (81,46)	Tuntas Madya (81,95)	Tuntas Madya (82,12)	Tuntas Madya (82,45)	Tuntas Madya (83,25)	Tuntas Madya (84,00)	Tuntas Madya (84,00)	Pendidikan
	1.1.2.	Meningkatnya Literasi	Indeks Pembangunan	Angka	60,14	64	64	65	66	67	68	68	Perpustakaan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Masyarakat Tabanan	n Literasi Masyarakat										
	1.1.3.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Rasio Pembangunan Pemuda	Angka	30,77	38,46	46,15	53,85	61,54	69,23	76,92	76,92	Pendidikan
	1.1.4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tabanan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,35	75,64	75,82	76,01	76,19	76,38	76,57	76,57	Dinas Kesehatan
	1.1.5.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	1,85	1,75	1,65	1,55	1,35	1,25	1,10	1,10	Tenaga Kerja
2. Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani.													
2.1.	Meningkatnya Kesehatan yang berkualitas dan merata	Akses yang	Prevalensi Stunting	Persentase	7,5	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0	Dinas Kesehatan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.1.1.	Meningkatnya Layanan Kesehatan yang Berkeadilan	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial (UHC service Coverage Index)	Persentase	87,74	87,75	87,80	87,85	87,90	87,95	88,00	88,00	Kesehatan
			Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	Angka	86,96	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	88,25	Kesehatan
	2.1.2	Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga unggul	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	66,92	66,92	67,42	67,92	68,42	68,92	69,42	69,42	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.1.3	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	Persentase	59,03	59,04	59,05	59,06	59,07	59,08	59,09	59,09	Sosial

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.1.4.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembanguna n Gender (IPG)	Angka	95,72	96,50	97,25	97,75	98,25	98,50	98,75	98,75	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif													
3.1	Menumbuhkan dan Mengembangkan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan Yang Inklusif, Kreatif, dan Berkelanjutan		Tingkat Kemiskinan	Persentase	4,4	4,1	3,85	3,65	3,45	3,15	2,75	2,75	Lintas PD
			Indek Gini	Angka	0,301	0,300	0,299	0,298	0,297	0,296	0,295	0,295	Lintas PD
			PDRB Per-Kapita	Rupiah/ Tahun	59.122,83	60.784,84	63.257,91	65.730,98	68.204,04	70.677,11	73.150,18	73.150,18	Linta PD
			Rasio Wirausaha	Persentase	2,83	3,28	3,63	3,94	4,21	4,44	4,64	4,64	Koperasi dan UMKM

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.1.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	22,31	22,51	22,71	22,91	23,11	23,31	23,51	23,51	Pertanian
			Nilai Tukar Nelayan	Angka	105,8	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109	Perikanan
			Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Angka	105,4	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108	Perikanan
	3.1.2.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase	na	na	1,60	2,40	3,19	3,99	4,79	4,79	Koperasi dan UMKM
			Persentase UMKM Unggul	Persentase	0,30 (132 UMKM)	0,40 (175 UMKM)	0,50 (219 UMKM)	0,60 (263 UMKM)	0,70 (307 UMKM)	0,80 (351 UMKM)	0,90 (395 UMKM)	0,90 (395 UMKM)	Koperasi dan UMKM
	3.1.3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase Desa dalam Kategori Mandiri	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan untuk Menjaga Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	92,51	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	95,50	Pangan
	3.2.1.	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas	Ketersediaan Pangan Pemerintah	Angka	23,00	30,00	41,00	52,00	63,00	74,00	85,00	85,00	Pangan dan Pertanian
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal													
4.1	Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Tabanan yang Merata dan Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,94	5,00	5,25	5,45	5,65	5,85	6,00	6,00	
	4.1.1.	Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persentase	7,716 Triliyun	5 (8,101 Triliyun)	5 (8,506 Triliyun)	5 (8,931 Triliyun)	5 (9,337 Triliyun)	5 (9,845 Triliyun)	5 (10,337 Triliyun)	10.337 Triliyun	Penanaman Modal
	4.1.2.	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persentase	20,00	21,95	22,67	23,37	24,08	24,78	25,49	25,49	Pariwisata
	4.1.3.	Meningkatnya Daya Saing Industri dan	Kontribusi Sektor Industri	Persentase	6,90	7,06	7,22	7,38	7,54	7,7	7,86	7,86	Perindustrian dan Perdagangan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Nilai Tambah Perdagangan	Pengolahan terhadap PDRB										
			Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persentase	3,48	3,62	3,76	3,9	4,04	4,18	4,32	4,32	Perindustrian dan Perdagangan
	4.1.4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur	Angka	69,05	70,87	72,59	74,56	76,52	78	78,75	78,75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Terwujudnya Kapasitas Inovasi Daerah		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,20	3,50	4,15	4,50	4,75	4,95	5,00	5,00	
	4.2.1.	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	57,45 (Inovatif)	65,5 (Sangat Inovatif)	66 (Sangat Inovatif)	67 (Sangat Inovatif)	68 (Sangat Inovatif)	69 (Sangat Inovatif)	70 (Sangat Inovatif)	70 (Sangat Inovatif)	Penelitian dan Pengembangan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5. Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban													
5.1	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Melalui Peningkatan Kompetensi ASN	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	72,58	73,38	74,18	76,11	77,03	78,11	79,22	79,22	Unsur Sekretariat Daerah	
	5.1.1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan	Indeks Integritas Daerah	Angka	77,39	78,00 (Waspada)	79,00 (Waspada)	80,00 (Terjaga)	80,50 (Terjaga)	80,70 (Terjaga)	81,00 (Terjaga)	81,00 (Terjaga)	Unsur Pengawasan
			Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Angka	2,892	2,90	3,0	3,05	3,1	3,15	3,2	3,2	Unsur Pengawasan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.1.2.	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital dan Keamanan Informasi	Indeks SPBE	Angka	3,54	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,80	3,80	Komunikasi dan Informatika
	5.1.3.	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	64,84 (Rendah)	71 (Sedang)	73 (Sedang)	75 (Sedang)	77 (Sedang)	79 (Sedang)	81 (Sedang)	81 (Sedang)	Unsur Kepegawaian
	5.1.4.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	Unsur Sekretariat Daerah
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Unsur Pengawasan
	5.1.5.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	6,10	6,50	6,75	7,00	7,30	7,75	8,00	8,00	Unsur Perencanaan
	5.1.6.	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal	Nilai	n.a	Rendah (0,939)	Rendah (0,858)	Sedang (1,285)	Sedang (1,236)	Sedang (1,188)	Sedang (1,142)	Sedang (1,142)	Unsur Keuangan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.1.7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	2,78 Sedang (Data Tahun 2022)	3,41 (Tinggi)	3,50 (Tinggi)	3,50 (Tinggi)	3,50 (Tinggi)	3,50 (Tinggi)	3,50 (Tinggi)	3,50 (Tinggi)	Unsur Sekretariat Daerah
	5.1.8.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91	91	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	5.1.9.	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Rasio Konektivitas	Persentase	88,00	88,00	92,00	96,00	100	100	100	100	Perhubungan
	5.1.10	Meningkatnya Layanan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	2,78	3,00	3,25	3,35	3,55	3,65	3,75	3,75	Komunikasi dan Informatika
5.2	Terwujudnya Stabilitas Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat,		Angka Kriminalitas	Kasus/ Tahun	142	138	134	130	126	121	117	117	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim												Perlindungan Masyarakat
	5.2.1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumli nmas	Angka	n.a	50	55	60	65	70	75	75	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	5.2.2	Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Angka	122,13 (sedang)	119,68 (sedang)	117,28 (sedang)	114,93 (sedang)	112,63 (sedang)	110,38 (sedang)	108,17 (sedang)	108,17 (sedang)	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
6. Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia													
6.1	Melestarikan dan Mengembangkan Nilai Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Daerah		Nilai Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Angka	88	90	92	94	96	98	100	100	Kebudayaan
	6.1.1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	2	2	3	4	5	6	7	7	Kebudayaan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Warisan Budaya dan Cagar Budaya											
			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	2	2	3	4	5	6	7	7	Kebudayaan
	6.1.2.	Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Desa Adat yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase	20	20	25	30	40	50	60	60	Lingkungan Hidup
6.2	Menumbuhkan Semangat Kebhinekaan dan Toleransi		Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7,13 (Capaian Nasional Tahun 2024)	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,0	
	6.2.1.	Meningkatnya Pemahaman Politik	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih	Persentase	N/A	88	88,1	88,2	88,3	88,4	89	89	Unsur Pemerintahan Umum
	6.2.2.	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Persentase Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase	76,83 (Capaian Nasional Tahun 2024)	77	77,5	78	78,5	79	79,5	79,5	Unsur Pemerintahan Umum

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.3	Terjaganya kelestarian alam tabanan yang bersih, sehat dan lestari		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	73,00	73,17	73,38	73,59	73,80	74,01	74,22	74,22	Lingkungan Hidup
	6.3.1.	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	52,35	52,50	53,45	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	Lingkungan Hidup
	6.3.2.	Meningkatnya ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK	Persentase Desa Program Kampung Iklim (Proklam)	Persentase	12	16,50	20,68	33,91	47,14	60,37	73,60	73,60	Lingkungan Hidup

3.1.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang dibuat secara lengkap dan komprehensif yang memuat tatacara Pemerintah Kabupaten Tabanan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis yang telah disepakati. Strategi pembangunan daerah dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Strategi tersebut diperjelas dengan arah kebijakan agar rumusan strategi memiliki fokus dan target pelaksanaan dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD SB Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri	Terwujudnya masyarakat Tabanan cerdas, berkarakter, produktif, memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi Anak Usia Sekolah	Pemerataan akses, infrastruktur dan penguatan kurikulum Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	▪ Peningkatan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Kesetaraan ▪ Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar ▪ Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kearifan lokal ▪ Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Meningkatnya Literasi Masyarakat Tabanan	Meningkatkan minat baca masyarakat Tabanan.	▪ Peningkatan kompetensi SDM perpustakaan ▪ Peningkatan infrastruktur perpustakaan daerah ▪ Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi masyarakat
		Meningkatnya Peran dan Pemahaman Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah raga	Peningkatan Peran dan Pemahaman Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan integrasi dan sinergitas lembaga/organisasi kepemudaan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tabanan		
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	▪ Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja ▪ Perlindungan tenaga kerja ▪ Memfasilitasi penyediaan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah ▪ Mengoptimalkan sentra pelatihan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul dan berdikari. ▪ Pencegahan perselisihan tenaga kerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan untuk kesehatan masyarakat yang merata dan berkeadilan	1. Meningkatkan sinergitas antara lintas sektor, pihak swasta dan masyarakat 2. Meningkatkan infrastruktur, digitalisasi sistem, inovasi dalam layanan, kolaborasi, promosi kesehatan dan pemanfaatan teknologi 3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan melalui rekrutmen, redistribusi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kesehatan 4. Meningkatkan ketersediaan, mutu/keamanan dan distribusi yang merata dan tepat waktu 5. Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan secara mandiri 6. Meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan untuk akreditasi melalui pendampingan, pemenuhan standar dan evaluasi rutin	▪ Meningkatkan advokasi dan sosialisasi pembayaran JKN ke <i>stakeholder</i> ▪ Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan didukung dengan sistem layanan terintegrasi ▪ Penyediaan tenaga kesehatan secara merata dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pada setiap layanan ▪ Penguatan distribusi dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman melalui peningkatan fasilitas, sistem logistik terpadu dan pengawasan mutu sesuai standar ▪ Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan peran kader kesehatan di tingkat desa ▪ Terakreditasinya penyedia layanan kesehatan di Kabupaten Tabanan
	Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Penguatan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.	▪ Peningkatan program bantuan sosial melalui perluasan program bantuan untuk keluarga miskin, perlindungan jaminan kesehatan dan pemberian bantuan untuk penyandang disabilitas:

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				▪ Pemberian perlindungan terhadap anak dan lansia, pemberian fasilitas untuk penyandang disabilitas dan pengembangan bantuan khusus untuk kelompok rentan lainnya
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan ketahanan keluarga, peran, dan perlindungan perempuan dan anak	▪ Pencegahan dan penanggulangan kekerasan pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). ▪ Pengembangan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan konseling dan dukungan psikososial ▪ Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perluasan kewirausahaan untuk perempuan, pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan dan perlindungan dalam dunia kerja. ▪ Peningkatan infrastruktur ramah anak melalui perluasan taman bermain dan fasilitas umum untuk anak, sekolah dan lingkungan yang aman
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Pengendalian kuantitas penduduk dan meningkatnya kualitas penduduk (Keluarga)	Peningkatan pembinaan dan penyuluhan keluarga berkualitas
Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif	Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan ekonomi kerakyatan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Meningkatkan produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan	▪ Pengembangan Pertanian Organik ▪ Pembangunan Sentra Bibit / Benih Unggul ▪ Pembangunan Jaringan Irigasi, Jalan Usaha Tani, dan Prasarana Pertanian Lainnya ▪ Pembangunan <i>Rice Milling Unit</i> (RMU) dan Pabrik Pakan Ternak ▪ Menciptakan Petani Millennial dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (<i>Smart Farming</i>) ▪ Optimalisasi Taman Teknologi Pertanian (TTP) ▪ Pemberian Asuransi Petani ▪ Pembangunan Kawasan Inti di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Shiny Tabanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				▪ Penyediaan Sarana Pertanian ▪ Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian ▪ Melaksanakan Kerjasama Kemitraan dengan Pelaku Utama Pertanian ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Promosi Hasil Pertanian ▪ Sosialisasi Bahaya Penyakit Hewan Menular dan <i>Zoonosis</i>
			Meningkatkan produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perikanan	▪ Pemberian Asuransi kepada Pelaku Usaha Perikanan ▪ Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan ▪ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan melalui Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) ▪ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan kepada Pelaku Usaha Perikanan ▪ Peningkatan Promosi Konsumsi Ikan
		Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan Kualitas Daya Saing UMKM 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Koperasi	▪ Penyediaan basis data UMKM ▪ Penyediaan sarana pengolahan ▪ Memfasilitasi akses permodalan ▪ Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Koperasi melalui pembinaan koperasi ▪ Peningkatan pengawasan koperasi ▪ Melaksanakan pemeriksaan kesehatan koperasi
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Peningkatan perekonomian Perdesaan	▪ Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat ▪ Pengembangan Potensi Lokal melalui Bupati Ngantor di Desa (Bungan Desa)
	Meningkatnya ketersediaan pangan untuk menjaga ketahanan pangan daerah	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatkan katahanan pangan daerah	▪ Penganekaragaman Pangan Lokal ▪ Penguatan Cadangan dan Distribusi pangan ▪ Meningkatkan Keamanan Pangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Tabanan yang Merata dan Berkelanjutan	Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	- Tersedianya Regulasi terkait Pemberian Insentif Penanaman Modal - Meningkatkan Kualitas Kelembagaan untuk Kemudahan Investasi - Meningkatkan Jaminan Keamanan Investasi
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Industri Pariwisata yang Merata dan Regeneratif	- Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Shiny Tabanan (<i>Agro, Eco, Edu Tourism</i>) - Integrasi Daerah Tujuan Wisata dengan Desa Wisata - Pembangunan infrastruktur Pariwisata. - Menambah Atraksi Pariwisata di Destinasi Pariwisata - Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata - Melakukan Promosi dan Pemasaran Pariwisata melalui Platform Digital dan Kerja Sama dengan Lembaga dan Pelaku Pariwisata - Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah Perdagangan	Pengembangan Kawasan Industri dan Perdagangan Jasa	- Meningkatkan Daya Saing IKM - Pengembangan Sentra – Sentra IKM - Monitoring Harga Bahan Pokok - Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatkan cakupan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat	- Penuntasan penanganan jalan Kabupaten dan jaringannya - Penanganan permukiman kumuh melalui PAMSIMAS - Penanganan permukiman kumuh melalui Optimalisasi pengolahan air limbah - Pembangunan Jalan Baru - Pembangunan Jaringan Irigasi
	Terwujudnya Kapasitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas riset dan membangun budaya inovasi masyarakat.	Melaksanakan Kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				- Melakukan Kajian pada 5 (Lima) Bidang Prioritas Daerah - Membangun Ekosistem Inovasi yang Kompetitif dan Implementatif
Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Pemerintahan	Meningkatkan peran pengawasan internal	- Meningkatkan kapasitas APIP - Memberikan Fasilitas dan Pendampingan
		Terwujudnya Transformasi Layanan Publik berbasis digital dan Keamanan Informasi	1 Meningkatkan Kualitas Jaringan dan Infrastruktur Digital	- Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemerintah - Peningkatan Kapasitas Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah (JIP) - Penyediaan Server dan <i>Cloud Server</i> - Pengamanan Data dan Informasi - Diseminasi Informasi Publik - Literasi Digital - Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) - Penyediaan Aplikasi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah - Fasilitasi Pengaduan Publik
		Meningkatnya Layanan Statistik	Meningkatkan Kualitas Data	- Membangun Data Statistik Sektoral dalam Satu Data Pemerintah - Cakupan Desa Terlayani Sistem Informasi Data Desa Presisi
		Terwujudnya Layanan Transportasi Massal yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Meningkatkan integrasi moda transportasi, pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan serta pembiayaan berkelanjutan	- Meningkatkan kinerja lalu lintas - Meningkatkan Aksesibilitas - Transportasi berkelanjutan
		Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi dan edukasi masyarakat	- Transformasi Digital dan Inovasi Layanan Semara Ratih - Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Penduduk - Penguatan Pengawasan dan Evaluasi - Penguatan Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal	▪ Pengelolaan aset Daerah ▪ Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ▪ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat, penegakan hukum dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	▪ Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan kondusif ▪ Modernisasi sarana prasarana pengawasan dan pengendalian bencana kebakaran.
		Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kesadaran dan edukasi, pengembangan sistim peringatan dini dan penguatan infrastruktur yang tahan bencana untuk dapat mengurangi resiko bencana	▪ Pengintegrasian peningkatan Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan Lembaga lainnya dalam kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim ▪ Pengembangan sistem informasi yang efektif untuk mengantisipasi bencana dan perubahan iklim
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan inovasi tata kelola pemerintahan	▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan inovasi ▪ Melakukan pengendalian, evaluasi secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja
		Terwujudnya Profesionalitas ASN	Penguatan Sistem Merit, pengembangan Kompetensi, digitalisasi manajemen dan penguatan budaya kerja	▪ Seleksi ASN berbasis kompetensi dan integritas ▪ Promosi dan mutasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ▪ Penilaian kinerja berbasis target dan hasil kerja. ▪ Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan disiplin ASN
		Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang Handal	Peningkatan Kapabilitas dan Kapasitas Perencanaan serta Penggunaan Data yang Berkualitas	▪ Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perencanaan ▪ Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dalam Penyusunan Perencanaan ▪ Menginventaris dan Evaluasi Kebutuhan Data Perencanaan melalui Forum Satu Data ▪ Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan antar Bidang Urusan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD melalui Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengawasan, penganggaran, dan pembentukan produk hukum daerah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Indikator Kinerja Utama yang Jelas dan Terukur, Pengawasan Internal yang efektif, Keterbukaan Dalam Pengelolaan Anggaran, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Serta Penguatan Evaluasi dan Pemantuan Kinerja	▪ Meningkatkan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran ▪ Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya Pemerintah Daerah ▪ Meningkatkan Kualitas Pelayanan ▪ Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Kinerja dan Akuntabilitas ▪ Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Penguatan Pengawasan dan Evaluasi	▪ Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas ▪ Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas ▪ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Publik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengembangan Digitalisasi Pengadaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	▪ Meningkatkan Transparansi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ▪ Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ▪ Meningkatkan Kualitas Barang dan Jasa ▪ Meningkatkan Akuntabilitas dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kejelasan Hak Atas Tanah	Pensertifikatan Tanah Penyelesaian Sengketa, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penggunaan Tanah	▪ Meningkatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah ▪ Meningkatkan Transparansi Dalam Pengelolaan Tanah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				▪ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Tanah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Peningkatan pengelolaan arsip daerah sesuai NSPK	▪ Peningkatan kompetensi SDM pengelola kearsipan ▪ peningkatan infrastruktur kearsipan
Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia	Melestarikan dan mengembangkan nilai adat, tradisi, seni dan budaya daerah	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya masyarakat	▪ Peningkatan pendidikan dan literasi seni budaya melalui integrasi pendidikan seni dan budaya daerah dalam kurikulum pendidikan di sekolah, workshop kesenian dan festival budaya daerah. ▪ Peningkatan promosi dan apresiasi seni dan budaya daerah melalui pemberian apresiasi Seni dan Penghargaan untuk Seniman Lokal, Promosi Melalui Media Sosial dan Digital dan pengembangan produk seni dan budaya daerah ▪ Pelestarian dan pengembangan kearifan lokal melalui sosialisasi pelestarian tradisi dan kearifan lokal, pemberdayaan komunitas seni lokal, menghidupkan tradisi lokal dan mendorong industri kreatif lokal ▪ Peningkatan infrastruktur dan fasilitas seni budaya melalui Perbaikan dan Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan fasilitas seni di ruang publik
		Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemanfaatan lahan berkelanjutan	▪ Memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti fungsi lahan, potensi sumber daya, dan kebutuhan masyarakat ▪ Mendorong praktik pertanian yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan agroforestri ▪ Mencegah erosi tanah, menjaga kualitas air, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam kegiatan pertanian dan non-pertanian

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				▪ Menggunakan teknologi informasi, teknologi pertanian, dan teknologi pengelolaan air untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan lahan ▪ Meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan lahan berkelanjutan, serta memperkuat regulasi dan insentif yang mendukung praktik berkelanjutan
	Menumbuhkan semangat kebinekaan dan toleransi	Meningkatnya pemahaman politik dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan	▪ Pendidikan Politik yang Inklusif dan Berbasis Nilai Demokrasi ▪ Penguatan Peran Lembaga Pendidikan Nonformal ▪ Pembinaan Wawasan Kebangsaan berbasis lembaga adat ▪ Penggunaan Media Sosial
		Meningkatnya ketahanan Daerah	Meningkatkan ketahanan sosial budaya	▪ Memperkuat Identitas Nasional melalui penguatan kelembagaan adat dan organisasi masyarakat ▪ Melestarikan Warisan Budaya melalui sosialisasi pemahaman nilai-nilai, dan praktek budaya nusantara. ▪ Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dalam berkehidupan bermasyarakat. ▪ Pembenahan Regulasi dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai budaya untuk memperkuat ketahanan daerah. ▪ Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan adat, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan untuk menjaga stabilitas daerah.
	Terjaganya kelestarian alam tabanan yang bersih, sehat dan lestari	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan	▪ Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat. ▪ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Melalui.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Mengurangi Emisi GRK	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi di rumah	▪ Pendidikan dan Sosialisasi ▪ Regulasi dan Standar ▪ Pemanfaatan energi terbarukan, seperti panel surya

b. Pentahapan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan tahun 2025 – 2029 ditempuh melalui berbagai strategi dan arah kebijakan. Dari berbagai strategi dan arah kebijakan tersebut dapat dirangkum menjadi pentahapan strategis tahunan yang akan diterjemahkan sebagai tema-tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Langkah Strategis/tema RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Pentahapan Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang cerdas dan berkarater	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi Anak Usia Sekolah	Pemerataan akses, infrastruktur dan penguatan kurikulum Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	▪ Peningkatan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Kesetaraan ▪ Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar ▪ Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kearifan lokal	Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas, Perpustakaan Pendidikan Dasar Pemberian Beasiswa PIP, Beasiswa Berprestasi o Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal o Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan o Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada	Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas, Perpustakaan Pendidikan Dasar Pemberian Beasiswa PIP, Beasiswa Berprestasi o Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal o Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan o Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada	Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas, Perpustakaan Pendidikan Dasar Pemberian Beasiswa PIP, Beasiswa Berprestasi o Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal o Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan o Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada	Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas, Perpustakaan Pendidikan Dasar Pemberian Beasiswa PIP, Beasiswa Berprestasi o Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal o Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan o Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada	Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas, Perpustakaan Pendidikan Dasar Pemberian Beasiswa PIP, Beasiswa Berprestasi o Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal o Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan o Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
					satuan pendidikan o Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan o Pengawasan dan evaluasi	Bali pada satuan pendidikan o Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan o Pengawasan dan evaluasi	pada satuan pendidikan o Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan o Pengawasan dan evaluasi	satuan pendidikan o Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan o Pengawasan dan evaluasi	satuan pendidikan o Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan o Pengawasan dan evaluasi
				▪ Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier
		Meningkatnya Literasi Masyarakat Tabanan	Meningkatkan minat baca masyarakat Tabanan.	▪ Peningkatan kompetensi SDM perpustakaan ▪ Peningkatan infrastruktur perpustakaan daerah	Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan untuk menunjang	Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan Sosialisasi perpustakaan digital	Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan Pemanfaatan perpustakaan digital	Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan Pemanfaatan perpustakaan digital	Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan Pemanfaatan perpustakaan digital

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi masyarakat	perpustakaan digital - Penyediaan Perpustakaan keliling - Penyediaan perpustakaan desa / desa adat	- Penyediaan Perpustakaan keliling - Penyediaan perpustakaan desa / desa adat	- Penyediaan Perpustakaan keliling - Penyediaan perpustakaan desa / desa adat	- Penyediaan Perpustakaan keliling - Penyediaan perpustakaan desa / desa adat	- Penyediaan Perpustakaan keliling - Penyediaan perpustakaan desa / desa adat
		Meningkatnya Peran dan Pemahaman Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah raga	Peningkatan Peran dan Pemahaman Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan integrasi dan sinergitas lembaga/organisasi kepemudaan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan dan sosialisasi program pembangunan kepada organisasi / lembaga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan dan sosialisasi program pembangunan kepada organisasi / lembaga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan dan sosialisasi program pembangunan kepada organisasi / lembaga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan dan sosialisasi program pembangunan kepada organisasi / lembaga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan dan sosialisasi program pembangunan kepada organisasi / lembaga
	Membangun manusia Tabanan yang tangguh memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	- Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja - Perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan <i>job fair</i> Sosialisasi dan pemutakhiran data jaminan sosia tenaga kerja Peningkatan Pelindungan dan	Meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan <i>job fair</i> - Perluasan cakupan data jaminan sosia tenaga kerja - Peningkatan Pelindungan dan	Meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan <i>job fair</i> - Perluasan cakupan data jaminan sosia tenaga kerja - Peningkatan Pelindungan dan	Meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan <i>job fair</i> - Perluasan cakupan data jaminan sosia tenaga kerja - Peningkatan Pelindungan dan	Meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan <i>job fair</i> - Perluasan cakupan data jaminan sosia tenaga kerja - Peningkatan Pelindungan dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Memfasilitasi penyediaan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah - Mengoptimalkan sentra pelatihan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul dan berdikari. - Pencegahan perselisihan tenaga kerja	Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan untuk kesehatan masyarakat yang	Meningkatkan sinergitas antara lintas sektor, pihak swasta dan masyarakat	Meningkatkan advokasi dan sosialisasi pembayaran JKN ke <i>stakeholder</i>	Sosialisasi berkaitan pembayaran JKN ke <i>stakeholder</i>	Sosialisasi berkaitan pembayaran JKN ke <i>stakeholder</i>	Sosialisasi berkaitan pembayaran JKN ke <i>stakeholder</i>	Sosialisasi berkaitan pembayaran JKN ke <i>stakeholder</i>	Sosialisasi berkaitan pembayaran JKN ke <i>stakeholder</i>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani		merata dan berkeadilan	Meningkatkan infrastruktur, digitalisasi sistem, inovasi dalam layanan, kolaborasi, promosi kesehatan dan pemanfaatan teknologi	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan didukung dengan sistem layanan terintegrasi	Pemetaan dan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar	Peningkatan sarana dan prasarana di semua fasilitas kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana di semua fasilitas kesehatan	Ekspansi Akses & Pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan manajemen layanan berbasis teknologi informasi
			Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan melalui rekrutmen, redistribusi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kesehatan	Penyediaan tenaga kesehatan secara merata dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pada setiap layanan	Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan dan Pemerataan SDM Kesehatan	Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan dan Pemerataan SDM Kesehatan	Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan dan Pemerataan SDM Kesehatan	Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan dan Pemerataan SDM Kesehatan	Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan dan Pemerataan SDM Kesehatan
			Meningkatkan ketersediaan, mutu/keamanan dan distribusi yang merata dan tepat waktu	Penguatan distribusi dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman melalui peningkatan fasilitas, sistem	Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas distribusi dan sistem logistik terpadu sesuai standar	Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas distribusi dan sistem logistik terpadu sesuai standar	Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas distribusi dan sistem logistik terpadu sesuai standar	Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas distribusi dan sistem logistik terpadu sesuai standar	Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas distribusi dan sistem logistik terpadu sesuai standar

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan secara mandiri Meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan untuk akreditasi melalui pendampingan, pemenuhan standar dan evaluasi rutin	logistik terpadu dan pengawasan mutu sesuai standar ▪ Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan peran kader kesehatan di tingkat desa ▪ Terakreditasinya penyedia layanan kesehatan di Kabupaten Tabanan	Meningkatkan <i>event</i> kesehatan berkaitan dengan upaya promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat Meningkatkan tata kelola dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan	Sosialisasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala melalui kader kesehatan di tingkat desa Meningkatkan tata kelola dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan	Sosialisasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala melalui kader kesehatan di tingkat desa Meningkatkan tata kelola dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan	Sosialisasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala melalui kader kesehatan di tingkat desa Meningkatkan tata kelola dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan	Sosialisasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala melalui kader kesehatan di tingkat desa Meningkatkan tata kelola dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan
	Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Penguatan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan	▪ Peningkatan program bantuan sosial melalui perluasan program bantuan	Pendataan keluarga miskin, penyandang disabilitas dan	Sinergi bersama jejaring dan instansi terkait analisis kebutuhan	Penyusunan kegiatan dan program terkait peningkatan	Fasilitasi sarana dan prasarana pemberian bantuan kepada kelompok rentan	Fasilitasi sarana dan prasarana pemberian bantuan kepada kelompok rentan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
	keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera		kelompok rentan lainnya.	untuk keluarga miskin, perlindungan jaminan kesehatan dan pemberian bantuan untuk penyandang disabilitas: Pemberian perlindungan terhadap anak dan lansia, pemberian fasilitas untuk penyandang disabilitas dan pengembangan bantuan khusus untuk kelompok rentan lainnya	kelompok rentan lainnya Pemetaan program, fasilitas, dan pengembangan bantuan untuk perlindungan anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya yang terdapat di desa / desa adat	program bantuan untuk keluarga miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya Sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan perlindungan anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya	bantuan untuk kelompok rentan Impelementasi terkait regulasi dan kebijakan perlindungan anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya	Impelementasi terkait regulasi dan kebijakan perlindungan anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya	Impelementasi terkait regulasi dan kebijakan perlindungan anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan ketahanan keluarga, peran, dan perlindungan perempuan dan anak	- Pencegahan dan penanggulangan kekerasan pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). - Pengembangan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan konseling	Sosialisasi terhadap penanggulangan kekerasan pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Penyediaan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan	Pendampingan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Peningkatan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan	Optimalisasi peran kader dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pendampingan dan layanan konseling serta dukungan psikososial	Penguatan peran keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis Implementaasi layanan terpadu, konseling dan dukungan psikososial	Tidak terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terpenuhinya layanan terpadu, konseling dan dukungan psikososial

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				dan dukungan psikososial ▪ Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perluasan kewirausahaan untuk perempuan, pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan dan perlindungan dalam dunia kerja. ▪ Peningkatan infrastruktur ramah anak melalui perluasan taman bermain dan fasilitas umum untuk anak, sekolah dan lingkungan yang aman	konseling dan dukungan psikososial Pemberian pelatihan keterampilan dan sertifikasi kemampuan kewirausahaan Penyediaan infrastruktur ramah anak, fasilitas umum dan lingkungan yang aman fasilitas umum untuk anak	konseling dan dukungan psikososial Peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi infrastruktur ramah anak, fasilitas umum dan lingkungan yang aman fasilitas umum untuk anak	Peningkatan penyerapan tenaga kerja perempuan dalam berbagai sektor pekerjaan Pemeliharaan infrastruktur ramah anak, fasilitas umum dan lingkungan yang aman fasilitas umum untuk anak	Peningkatan penyerapan tenaga kerja perempuan dalam berbagai sektor pekerjaan Pemeliharaan infrastruktur ramah anak, fasilitas umum dan lingkungan yang aman fasilitas umum untuk anak	Peningkatan penyerapan tenaga kerja perempuan dalam berbagai sektor pekerjaan Pemeliharaan infrastruktur ramah anak, fasilitas umum dan lingkungan yang aman fasilitas umum untuk anak
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Pengendalian kuantitas penduduk dan meningkatnya kualitas penduduk (Keluarga)	Peningkatan pembinaan dan penyuluhan keluarga berkualitas	Sosialisasi penyuluhan keluarga berkualitas	Sosialisasi penyuluhan keluarga berkualitas	Sosialisasi penyuluhan keluarga berkualitas	Sosialisasi penyuluhan keluarga berkualitas	Sosialisasi penyuluhan keluarga berkualitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif	Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan ekonomi kerakyatan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Meningkatkan produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan	▪ Pengembangan Pertanian Organik ▪ Pembangunan Sentra Bibit / Benih Unggul ▪ Pembangunan Jalan Usaha Tani, dan Prasarana Pertanian Lainnya ▪ Pembangunan <i>Rice Milling Unit</i> (RMU) dan Pabrik Pakan Ternak ▪ Menciptakan Petani Millennial dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (<i>Smart Farming</i>) ▪ Optimalisasi Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Percepatan pertanian organik berupa penyiapan sarana dan prasarana pertanian organik Penyediaan sentra bibit / benih unggul Pendataan jalan usaha tani, dan prasarana pertanian lainnya Pemilihan lahan pembangunan RMU dan Pabrik Pakan Ternak Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi (<i>smart farming</i>) dalam pertanian Sosialisasi Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Percepatan pertanian organik berupa penyiapan sarana dan prasarana pertanian organik Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel unggul Peningkatan jalan usaha tani, dan prasarana pertanian lainnya Pelaksanaan pembangunan RMU dan Pabrik Pakan Ternak Pelatihan metode <i>smart farming</i> Peningkatan riset dan inovasi teknologi pertanian	Percepatan pertanian organik berupa penyiapan sarana dan prasarana pertanian organik Sosialisasi sentra bibit / benih unggul Pemeliharaan jalan usaha tani, dan prasarana pertanian lainnya Pemanfaatan RMU dan Pabrik Pakan Ternak Penanaman komoditas pertanian <i>smart farming</i> Penerapan inovasi teknologi pertanian	Percepatan pertanian organik berupa penyiapan sarana dan prasarana pertanian organik Sosialisasi sentra bibit / benih unggul Pemeliharaan jalan usaha tani, dan prasarana pertanian lainnya Sosialisasi hasil pemanfaatan RMU dan Pabrik Pakan Ternak Penanaman komoditas pertanian <i>smart farming</i> Pemanfaatan Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Percepatan pertanian organik berupa penyiapan sarana dan prasarana pertanian organik Sosialisasi sentra bibit / benih unggul Pemeliharaan jalan usaha tani, dan prasarana pertanian lainnya Sosialisasi hasil pemanfaatan RMU dan Pabrik Pakan Ternak Penanaman komoditas pertanian <i>smart farming</i> Pemanfaatan Taman Teknologi Pertanian (TTP)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Pemberian Asuransi Petani - Pembangunan Kawasan Inti di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Shiny Tabanan - Penyediaan Sarana Pertanian - Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian - Melaksanakan Kerjasama Kemitraan dengan Pelaku Utama Pertanian - Pengolahan Hasil Pertanian - Promosi Hasil Pertanian	Pendataan Petani di Kabupaten Tabanan Inventarisasi kebutuhan kawasan Inti di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Shiny Tabanan Pendataan kebutuhan sarana pertanian Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimtek kepada penyuluh pertanian Sosialisasi kemitraan bidang pertanian kepada pelaku utama pertanian Kerja sama dengan pelaku usaha yang mengutamakan hasil pertanian Penyediaan ruang promosi	Peningkatan asuransi petani Pembangunan Kawasan Inti di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Shiny Tabanan Penyediaan sarana pertanian Pemberian penyuluhan kepada petani Legalitas kerja sama kemitraan dengan pelaku utama pertanian Kerja sama dengan pelaku usaha yang mengutamakan hasil pertanian Penyediaan ruang promosi	Peningkatan asuransi petani Pembangunan Kawasan Inti di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Shiny Tabanan Penyediaan sarana pertanian Pemberian penyuluhan kepada petani Implementasi kerja sama kemitraan dengan pelaku utama pertanian Kerja sama dengan pelaku usaha yang mengutamakan hasil pertanian Penyediaan ruang promosi	Peningkatan asuransi petani Pemeliharaan Kawasan Inti di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Shiny Tabanan Penyediaan sarana pertanian Pemberian penyuluhan kepada petani Implementasi kerja sama kemitraan dengan pelaku utama pertanian Kerja sama dengan pelaku usaha yang mengutamakan hasil pertanian Penyediaan ruang promosi	Peningkatan asuransi petani Pemeliharaan Kawasan Inti di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Shiny Tabanan Penyediaan sarana pertanian Pemberian penyuluhan kepada petani Implementasi kerja sama kemitraan dengan pelaku utama pertanian Kerja sama dengan pelaku usaha yang mengutamakan hasil pertanian Penyediaan ruang promosi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Sosialisasi Bahaya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	berupa event – event pertanian Penyuluhan kader-kader pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan	berupa event – event pertanian Sosialisasi Bahaya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	berupa event – event pertanian Sosialisasi Bahaya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	berupa event – event pertanian Sosialisasi Bahaya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	berupa event – event pertanian Sosialisasi Bahaya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis
		Meningkatkan produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perikanan		- Pemberian Asuransi kepada Pelaku Usaha Perikanan - Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan melalui Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan kepada Pelaku Usaha Perikanan	Pendataan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Tabanan Pembinaan dan Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dinas Perikanan Peningkatan Sarana Perbenihan Ikan Air Tawar Rehabilitasi Prasarana Balai Benih Ikan Pemberian Sarana dan Prasarana kepada Pelaku Usaha Perikanan	Peningkatan asuransi kepada pelaku usaha perikanan Pembinaan dan Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dinas Perikanan Peningkatan Sarana Perbenihan Ikan Air Tawar Rehabilitasi Prasarana Balai Benih Ikan Pemberian Sarana dan Prasarana kepada Pelaku Usaha Perikanan	Peningkatan asuransi kepada pelaku usaha perikanan Pembinaan dan Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dinas Perikanan Peningkatan Sarana Perbenihan Ikan Air Tawar Rehabilitasi Prasarana Balai Benih Ikan Pemberian Sarana dan Prasarana kepada Pelaku Usaha Perikanan	Peningkatan asuransi kepada pelaku usaha perikanan Pembinaan dan Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dinas Perikanan Peningkatan Sarana Perbenihan Ikan Air Tawar Rehabilitasi Prasarana Balai Benih Ikan Pemberian Sarana dan Prasarana kepada Pelaku Usaha Perikanan	Peningkatan asuransi kepada pelaku usaha perikanan Pembinaan dan Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dinas Perikanan Peningkatan Sarana Perbenihan Ikan Air Tawar Rehabilitasi Prasarana Balai Benih Ikan Pemberian Sarana dan Prasarana kepada Pelaku Usaha Perikanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Peningkatan Promosi Konsumsi Ikan	Sosialisasi GEMARIKAN Pameran Produk Olahan Hasil Perikanan	Sosialisasi GEMARIKAN Pameran Produk Olahan Hasil Perikanan	Sosialisasi GEMARIKAN Pameran Produk Olahan Hasil Perikanan	Sosialisasi GEMARIKAN Pameran Produk Olahan Hasil Perikanan	Sosialisasi GEMARIKAN Pameran Produk Olahan Hasil Perikanan
		Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Meningkatkan Kualitas Daya Saing UMKM	- Penyediaan basis data UMKM - Penyediaan sarana pengolahan - Memfasilitasi akses permodalan	Pendataan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan Identifikasi produk unggulan UMKM Identifikasi Target Potensial Pasar	Integrasi data pelaku usaha UMKM ke dalam basis data Identifikasi sarana kebutuhan UMKM Penelitian dan Pengembangan Produk (Identifikasi tren pasar, dan penentuan fokus produk)	Pembaharuan data pelaku usaha UMKM di wilayah Kabupaten Tabanan Pengembangan infrastruktur sarana pengolahan yang dibutuhkan Pemasaran dan <i>Branding</i>	Pembaharuan data pelaku usaha UMKM di wilayah Kabupaten Tabanan Pemanfaatan sarana pengolahan Pelatihan manajerial, dan pembangunan kepemimpinan	Pembaharuan data pelaku usaha UMKM di wilayah Kabupaten Tabanan Pemeliharaan sarana pengolahan Sertifikasi dan standarisasi
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Koperasi	- Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Koperasi melalui pembinaan koperasi - Peningkatan pengawasan koperasi	Pemetaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan koperasi Monitoring kinerja koperasi dalam periode waktu tertentu	Penguatan kelembagaan, dan pengembangan koperasi Monitoring kinerja koperasi dalam periode waktu tertentu	Pengawasan pelaksanaan tata kelola koperasi Monitoring kinerja koperasi dalam periode waktu tertentu	Pengawasan pelaksanaan tata kelola koperasi Monitoring kinerja koperasi dalam periode waktu tertentu	Pengawasan pelaksanaan tata kelola koperasi Monitoring kinerja koperasi dalam periode waktu tertentu

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Melaksanakan pemeriksaan kesehatan koperasi	Monitoring dan evaluasi pengelolaan koperasi setiap tahun	Monitoring dan evaluasi pengelolaan koperasi setiap tahun	Monitoring dan evaluasi pengelolaan koperasi setiap tahun	Monitoring dan evaluasi pengelolaan koperasi setiap tahun	Monitoring dan evaluasi pengelolaan koperasi setiap tahun
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Peningkatan perekonomian Perdesaan	- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat - Pengembangan Potensi Lokal melalui Bupati Ngantor di Desa (Bungan Desa)	Peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan Sosialisasi barang dan jasa unggulan di lokasi Bungan Desa	Peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan Sosialisasi barang dan jasa unggulan di lokasi Bungan Desa	Peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan Sosialisasi barang dan jasa unggulan di lokasi Bungan Desa	Peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan Sosialisasi barang dan jasa unggulan di lokasi Bungan Desa	Peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan Sosialisasi barang dan jasa unggulan di lokasi Bungan Desa
	Meningkatnya ketersediaan pangan untuk menjaga ketahanan pangan daerah	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatkan katahanan pangan daerah	Penganekaragaman Pangan Lokal	Sosialisasi kepada KWT, masyarakat	Penguatan SDM dengan memberi pelatihan pengolahan penganekaragaman pangan lokal	Pembinaan kepada KWT	Melakukan kerja sama dengan toko modern untuk pemasaran hasil hasil pengolahan penganekaragaman pangan lokal	Evaluasi dan monitoring program yang sudah dilakukan
				- Penguatan Cadangan dan Distribusi pangan - Meningkatkan Keamanan Pangan	Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pengujian /test cepat pestisida pada sayuran di 10 pasar yang ada di Kab. Tabanan	Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pengujian /test cepat pestisida pada sayuran di 10 pasar yang ada di Kab. Tabanan	Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pengujian /test cepat pestisida pada sayuran di 10 pasar yang ada di Kab. Tabanan	Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pengujian /test cepat pestisida pada sayuran di 10 pasar yang ada di Kab. Tabanan	Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pengujian /test cepat pestisida pada sayuran di 10 pasar yang ada di Kab. Tabanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Terwujudnya kemandirian ekonomi Tabanan yang merata dan berkelanjutan	Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	- Tersedianya Regulasi terkait Pemberian Insentif Penanaman Modal - Meningkatkan Kualitas Kelembagaan untuk Kemudahan Investasi - Meningkatkan Jaminan Keamanan Investasi	Merumuskan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal	Legalitas Investasi Penanaman Modal	Pengawasan Implementasi Regulasi	Pembinaan Implementasi Regulasi	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Regulasi
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Industri Pariwisata yang Merata dan Regeneratif	- Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Shiny Tabanan (<i>Agro, Eco, Edu Tourism</i>) - Integrasi Destinasi Pariwisata dengan Desa Wisata - Pembangunan infrastruktur Pariwisata.	Pendataan Potensi Wisata di Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan Identifikasi Potensi Desa Wisata Pemetaan Kondisi Infrastruktur Penunjang Pariwisata di	Perencanaan dan Peningkatan Infrastruktur Pariwisata di Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan Perencanaan dan Penyusunan Strategi Pengembangan Desa Wisata yang Terintegrasi Membuat Kajian dan Usulan tentang Peningkatan Infrastruktur Penunjang	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola di Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan Penguatan Kelembagaan dan SDM Pariwisata Memfasilitasi Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Penunjang	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata di Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan Memfasilitasi Terwujudnya Paket Wisata Terintegrasi Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Destinasi Pariwisata	Pelaksanaan Promosi dan event-event di Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan Pelaksanaan Promosi dan Event Pariwisata Melakukukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Menambah Atraksi Pariwisata di Destinasi Pariwisata - Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata - Melakukan Promosi dan Pemasaran Pariwisata melalui Platform Digital dan Kerja Sama dengan Lembaga dan Pelaku Pariwisata - Pengembangan Ekonomi Kreatif	Destinasi Pariwisata Menggali Potensi Budaya Lokal sebagai Atraksi Unggulan di masing-masing Destinasi Pariwisata Pemetaan kelembagaan pengelola destinasi yang sudah ada Inventarisasi Produk Ekonomi Kreatif Penguatan Data dan Pemetaan Potensi Ekonomi Kreatif serta Fasilitasi	Pariwisata di Destinasi Pariwisata Penguatan Atraksi Berbasis Budaya Lokal (Seni Pertunjukan, Kuliner Khas, Ritual Adat) Penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan struktur organisasi kelembagaan Penciptaan Narasi Branding Produk Ekonomi Kreatif Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kolaborasi dan	Pariwisata di Destinasi Pariwisata dengan Perangkat Daerah Terkait Pengembangan Festival Tahunan dan Event Kreatif sebagai Atraksi Kalender Wisata Pelatihan Sumber Daya manusia Pariwisata Promosi Lintas Sektor melalui Kerjasama dengan BPPD, Bekraf, dan Pengelola Destinasi Pariwisata Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Literasi Digital serta	Promosi Atraksi Baru melalui Media Digital dan Media Massa Pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana pengembangan Promosi Destinasi melalui Partisipasi secara offline (Media Cetak, Pameran, Festival) dan Online melalui Media Sosial Promosi dan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi	Pariwisata di Destinasi Pariwisata Pengembangan Model Atraksi yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Evaluasi kinerja kelembagaan pengelola destinasi yang telah dibentuk Pembentukan Media Center Pariwisata Daerah yang dikelola Profesional dan Berkelanjutan Integrasi dengan Sektor Pariwisata Menyelaraskan Pengembangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
					Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Penguatan Regulasi daerah terkait Ekonomi Kreatif serta Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Ekonomi Kreatif dengan Program Desa Wisata dan Atraksi Budaya serta Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
		Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah Perdagangan	Pengembangan Kawasan Industri dan Perdagangan Jasa	▪ Meningkatkan Daya Saing IKM ▪ Pengembangan Sentra – Sentra IKM ▪ Monitoring Harga Bahan Pokok ▪ Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan ▪ Peningkatan Infrastruktur Perdagangan	Melakukan Pelatihan IKM Promosi Produk IKM Menyediakan sistem informasi pasar Menjamin keamanan produk pangan Fasilitasi pemenuhan perolehan perijinan pasar rakyat	Pendaftaran pelaku IKM dan Pelatihan Pelaku IKM Pengembangan Produk IKM dan promosi melalui pameran Sosialisasi Penyediaan data dan informasi Harga Bahan Pokok melalui SIM Sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Sosialisasi dan fasilitasi perijinan Pasar Rakyat	Pelatihan Pelaku IKM Pengembangan Produk IKM dan promosi melalui pameran Sosialisasi Penyediaan data dan informasi Harga Bahan Pokok melalui SIM Sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Sosialisasi dan fasilitasi perijinan Pasar Rakyat	Pelatihan Pelaku IKM Pengembangan Produk IKM dan promosi melalui pameran Sosialisasi Penyediaan data dan informasi Harga Bahan Pokok melalui SIM Sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Sosialisasi dan fasilitasi perijinan Pasar Rakyat	Pelatihan Pelaku IKM Pengembangan Produk IKM dan promosi melalui pameran Sosialisasi Penyediaan data dan informasi Harga Bahan Pokok melalui SIM Sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Sosialisasi dan fasilitasi perijinan Pasar Rakyat

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatkan cakupan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat	- Penuntasan penanganan jalan Kabupaten dan jaringannya - Penanganan permukiman kumuh melalui PAMSIMAS - Penanganan permukiman kumuh melalui Optimalisasi pengolahan air limbah - Pembangunan Jalan Baru - Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi	Pendataan dan pemeliharaan jalan kabupaten sesuai kondisi Pendataan dan pengajuan usulan kebutuhan PAMSIMAS Pendataan dan pengajuan usulan kebutuhan pengolahan air limbah terpadu Pendataan jalan yang ada di kabupaten Pendataan kondisi jaringan irigasi	Perbaikan jalan kabupaten dalam kondisi rusak Pembangunan PAMSIMAS Penguatan regulasi penyediaan IPAL pada perumahan baru Pengadaan lahan baik melalui pengalihan aset pembelian tanah Peningkatan Jaringan irigasi	Perbaikan jalan kabupaten dalam kondisi rusak Pembangunan PAMSIMAS Penegakan hukum terhadap regulasi penyediaan IPAL pada perumahan baru Penyiapan lahan untuk badan jalan baru Pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan jalan kabupaten dalam kondisi rusak Pembangunan PAMSIMAS Pembangunan IPAL Pembangunan Jalan Baru Pemeliharaan jaringan irigasi	Perbaikan jalan kabupaten dalam kondisi rusak Pembangunan PAMSIMAS Pembangunan IPAL Pembangunan Jalan Baru Pemeliharaan jaringan irigasi
	Terwujudnya Kapasitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas riset dan membangun budaya inovasi masyarakat.	Melaksanakan Kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi	Pendataan Hasil Riset dan Inovasi yang akan dikerjasamakan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi	Penyiapan Kerja Sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi	Implementasi kerja sama pengembangan inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi	Pengawasan dan Evaluasi kerja sama pengembangan inovasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi	Pengawasan dan Evaluasi kerja sama pengembangan inovasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Melakukan Kajian pada 5 (Lima) Bidang Prioritas Daerah - Membangun Ekosistem Inovasi yang Kompetitif dan Implementatif	Pembentukan tim dan pendataan kebutuhan kajian 5 (lima) bidang prioritas Membangun regulasi dan sistem inovasi daerah	Pelaksanaan kajian 5 (lima) bidang prioritas Sosialisasi regulasi dan sistem inovasi daerah	Pelaksanaan kajian 5 (lima) bidang prioritas Penjaringan inovasi daerah melalui lomba inovasi dan kreatifitas daerah	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kajian 5 (lima) bidang prioritas Penjaringan inovasi daerah melalui lomba inovasi dan kreatifitas daerah	Publikasi kajian 5 (lima) bidang prioritas Penjaringan inovasi daerah melalui lomba inovasi dan kreatifitas daerah
Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Pemerintahan	Meningkatkan peran pengawasan internal	- Meningkatkan kapasitas APIP - Memberikan Fasilitas dan Pendampingan	Peningkatan kompetensi APIP melalui pelatihan dan bimbingan teknis Pendataan, fasilitasi dan pendampingan pekerjaan berdasarkan pengajuan dari seluruh perangkat daerah	Peningkatan kompetensi APIP melalui pelatihan dan bimbingan teknis Pendataan, fasilitasi dan pendampingan pekerjaan berdasarkan pengajuan dari seluruh perangkat daerah	Peningkatan kompetensi APIP melalui pelatihan dan bimbingan teknis Pendataan, fasilitasi dan pendampingan pekerjaan berdasarkan pengajuan dari seluruh perangkat daerah	Peningkatan kompetensi APIP melalui pelatihan dan bimbingan teknis Pendataan, fasilitasi dan pendampingan pekerjaan berdasarkan pengajuan dari seluruh perangkat daerah	Peningkatan kompetensi APIP melalui pelatihan dan bimbingan teknis Pendataan, fasilitasi dan pendampingan pekerjaan berdasarkan pengajuan dari seluruh perangkat daerah
		Terwujudnya Transpormasi Layanan Publik berbasis digital dan Keamanan Informasi	2 Meningkatkan Kualitas Jaringan dan Infrastruktur Digital	Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemerintah	Pemetaan kebutuhan jaringan fiber optik pemerintah	Perjanjangan kerja sama dengan antara pemerintah dan penyedia jaringan fiber optik	Pelaksanaan pembangunan jaringan fiber optik pemerintah	Pelaksanaan pembangunan jaringan fiber optik pemerintah	Pengawasan dan evaluasi pembangunan jaringan fiber optik pemerintah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				▪ Peningkatan Kapasitas Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah (JIP) ▪ Penyediaan Server dan <i>Cloud Server</i> ▪ Pengamanan Data dan Informasi ▪ Diseminasi Informasi Publik ▪ Literasi Digital ▪ Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Penyusunan rencana peningkatan kapasitas bandwidth pada jaringan intra pemerintah (JIP) Penyusunan rencana kebutuhan server dan <i>cloud server</i> Peningkatan sarana dan prasarana dan keamanan siber Penyediaan sistem informasi publik yang terintegrasi Peningkatan kompetensi ASN dalam pemahaman literasi digital Penyusunan kajian dan kebijakan komunitas informasi masyarakat (KIM)	Penyusunan kerja sama dengan penyedia bandwidth pada jaringan intra pemerintah (JIP) Persiapan kerja sama antara pemerintah dengan penyedia server dan <i>cloud server</i> Peningkatan kompetensi ASN dalam bidang keamanan siber Sosialisasi sistem informasi publik yang terintegrasi Peningkatan kompetensi ASN dalam pemahaman literasi digital Legalitas komunitas informasi masyarakat (KIM)	Pelaksanaan peningkatan kapasitas bandwidth pada jaringan intra pemerintah (JIP) Legalitas kerja sama antara pemerintah dengan penyedia server dan <i>cloud server</i> Peningkatan kompetensi ASN dalam bidang keamanan siber Sosialisasi sistem informasi publik yang terintegrasi Peningkatan kompetensi ASN dalam pemahaman literasi digital Sosialisasi komunitas informasi masyarakat (KIM)	Pelaksanaan peningkatan kapasitas bandwidth pada jaringan intra pemerintah (JIP) Implementasi kerja sama antara pemerintah dengan penyedia server dan <i>cloud server</i> Peningkatan kompetensi ASN dalam bidang keamanan siber Sosialisasi sistem informasi publik yang terintegrasi Sosialisasi literasi digital kepada masyarakat Implementasi komunitas informasi masyarakat (KIM)	Pengawasan dan evaluasi peningkatan kapasitas bandwidth pada jaringan intra pemerintah (JIP) Pengawasan dan evaluasi kerja sama antara pemerintah dengan penyedia server dan <i>cloud server</i> Peningkatan kompetensi ASN dalam bidang keamanan siber Sosialisasi sistem informasi publik yang terintegrasi Sosialisasi literasi digital kepada masyarakat Monitoring dan evaluasi kinerja komunitas informasi masyarakat (KIM)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				▪ Peyediaan Aplikasi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah ▪ Fasilitasi Pengaduan Publik	Perencanaan kebutuhan aplikasi penyelenggaraan pemerintah Sosialisasi layanan pengaduan publik	Pengadaan aplikasi penyelenggaraan pemerintah Tindak lanjut pengaduan publik	Pengadaan aplikasi penyelenggaraan pemerintah Tindak lanjut pengaduan publik	Monitoring dan evaluasi pengadaan aplikasi penyelenggaraan pemerintah Tindak lanjut pengaduan publik	Monitoring dan evaluasi pengadaan aplikasi penyelenggaraan pemerintah Tindak lanjut pengaduan publik
		Meningkatnya Layanan Statistik	Meningkatkan Kualitas Data	▪ Membangun Data Statistik Sektoral dalam Satu Data Pemerintah ▪ Cakupan Desa Terlayani Sistem Informasi Data Desa Presisi	Membangun regulasi dan sistem data statistik sektoral dalam satu data pemerintah Sosialisasi sistem informasi data desa presisi	Sosialisasi regulasi dan sistem data statistik sektoral dalam satu data pemerintah Penyusunan data sistem informasi data desa presisi	Pemanfaatan data statistik sektoral dalam satu data pemerintah Integrasi data sistem informasi data desa presisi	Pemanfaatan data statistik sektoral dalam satu data pemerintah Integrasi data sistem informasi data desa presisi	Pemanfaatan data statistik sektoral dalam satu data pemerintah Publikasi sistem informasi data desa presisi
		Terwujudnya Layanan Transportasi Massal yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Meningkatkan integrasi moda transportasi, pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan serta pembiayaan berkelanjutan	▪ Meningkatkan kinerja lalu lintas	Evaluasi kondisi transportasi darat	Pemetaan trayek baru angkutan umum, pemasangan kelengkapan jalan, peningkatan layanan angkutan darat terhadap siswa, kaum disabilitas, dan masyarakat umum	Pemasangan kelengkapan jalan, peningkatan layanan angkutan darat terhadap siswa, kaum disabilitas, dan masyarakat umum	Pemasangan kelengkapan jalan, peningkatan layanan angkutan darat terhadap siswa, kaum disabilitas, dan masyarakat umum	Pemasangan kelengkapan jalan, peningkatan layanan angkutan darat terhadap siswa, kaum disabilitas, dan masyarakat umum

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Meningkatkan Aksesibilitas - Transportasi berkelanjutan					
		Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi dan edukasi masyarakat	- Transformasi Digital dan Inovasi Layanan Semara Ratih - Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Penduduk - Penguatan Pengawasan dan Evaluasi - Penguatan Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat	Sosialisasi dan Penerapan layanan Semara Ratih Verifikasi dan validasi data penduduk pada basis data Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pendataan penduduk	Sosialisasi dan Penerapan layanan Semara Ratih Verifikasi dan validasi data penduduk pada basis data Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pendataan penduduk	Sosialisasi dan Penerapan layanan Semara Ratih Verifikasi dan validasi data penduduk pada basis data Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pendataan penduduk	Sosialisasi dan Penerapan layanan Semara Ratih Verifikasi dan validasi data penduduk pada basis data Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pendataan penduduk	Sosialisasi dan Penerapan layanan Semara Ratih Verifikasi dan validasi data penduduk pada basis data Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pendataan penduduk
		Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk	Pengelolaan aset Daerah	Identifikasi perencanaan kebutuhan aset, penganggaran, pengadaan, pen	Identifikasi perencanaan kebutuhan aset, penganggaran, pengadaan, pen	Identifikasi perencanaan kebutuhan aset, penganggaran, pengadaan, pen	Identifikasi perencanaan kebutuhan aset, penganggaran, pengadaan, pen	Identifikasi perencanaan kebutuhan aset, penganggaran, pengadaan, pen

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
			mewujudkan kemandirian fiskal	▪ Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ▪ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	ggunaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan,pe ng hapusan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian Peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada dan memperluas basis PAD dengan mencari sumber baru Perencanaan dan penyusunan APBD yang matang, Pelaksanaan APBD yang efisien dan efektif, penatausahaan keuangan yang tertib, pertanggungjaw aban keuangan yang akuntabel	ggunaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan,pe ng hapusan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian Peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada dan memperluas basis PAD dengan mencari sumber baru Perencanaan dan penyusunan APBD yang matang, Pelaksanaan APBD yang efisien dan efektif, penatausahaan keuangan yang tertib, pertanggungjaw aban keuangan yang akuntabel	ggunaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan,pe ng hapusan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian Peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada dan memperluas basis PAD dengan mencari sumber baru Perencanaan dan penyusunan APBD yang matang, Pelaksanaan APBD yang efisien dan efektif, penatausahaan keuangan yang tertib, pertanggungjaw aban keuangan yang akuntabel	ggunaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan,pe ng hapusan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian Peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada dan memperluas basis PAD dengan mencari sumber baru Perencanaan dan penyusunan APBD yang matang, Pelaksanaan APBD yang efisien dan efektif, penatausahaan keuangan yang tertib, pertanggungjaw aban keuangan yang akuntabel	ggunaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan,pe ng hapusan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian Peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada dan memperluas basis PAD dengan mencari sumber baru Perencanaan dan penyusunan APBD yang matang, Pelaksanaan APBD yang efisien dan efektif, penatausahaan keuangan yang tertib, pertanggungjaw aban keuangan yang akuntabel

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
					yang akuntabel serta pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan	serta pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan	serta pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan	serta pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan	serta pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat, penegakan hukum dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	▪ Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan kondusif ▪ Modernisasi sarana prasarana pengawasan dan pengendalian bencana kebakaran.	○ Pembentukan tim dan koordinasi trantibumlilima s dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa ○ Sosialisasi peraturan humum terkait trantibumlilima s ○ Penegakan peraturan hukum ❖ Pengembangan sistem komunikasi (pengadaan alat – alat komunikasi) ❖ Penyediaan rambu –	○ Pembentukan tim dan koordinasi trantibumlilima s dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa ○ Sosialisasi peraturan humum terkait trantibumlilima s ○ Penegakan peraturan hukum ❖ Pengembangan sistem komunikasi (pengadaan alat – alat komunikasi) ❖ Penyediaan rambu –	○ Pembentukan tim dan koordinasi trantibumlilima s dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa ○ Sosialisasi peraturan humum terkait trantibumlilima s ○ Penegakan peraturan hukum ❖ Pengembangan sistem komunikasi (pengadaan alat – alat komunikasi) ❖ Penyediaan rambu –	○ Pembentukan tim dan koordinasi trantibumlilima s dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa ○ Sosialisasi peraturan humum terkait trantibumlilima s ○ Penegakan peraturan hukum ❖ Pengembangan sistem komunikasi (pengadaan alat – alat komunikasi) ❖ Penyediaan rambu –	○ Pembentukan tim dan koordinasi trantibumlilima s dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa ○ Sosialisasi peraturan humum terkait trantibumlilima s ○ Penegakan peraturan hukum ❖ Pengembangan sistem komunikasi (pengadaan alat – alat komunikasi) ❖ Penyediaan rambu –

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
					rambu rawan bencana kebakaran	rambu rawan bencana kebakaran	rambu rawan bencana kebakaran	rambu rawan bencana kebakaran	rambu rawan bencana kebakaran
		Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kesadaran dan edukasi, pengembangan sistim peringatan dini dan penguatan infrastruktur yang tahan bencana untuk dapat mengurangi resiko bencana	▪ Pengintegrasian peningkatan Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan Lembaga lainnya dalam kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim ▪ Pengembangan sistem informasi yang efektif untuk mengantisipasi bencana dan perubahan iklim	Pembentukan tim koordinasi dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa	Sosialisasi, koordinasi, edukasi kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim secara rutin	Sosialisasi, koordinasi, edukasi kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim secara rutin	Sosialisasi, koordinasi, edukasi kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim secara rutin	Sosialisasi, koordinasi, edukasi kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim secara rutin
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan inovasi tata kelola pemerintahan	▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan inovasi ▪ Melakukan pengendalian, evaluasi secara rutin dan berkelanjutan untuk	Melakukan inovasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM dalam melakukan pelayanan publik Menerapkan manajemen risiko, sistem pengawasan internal pemerintah, dan	Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar layanan Menerapkan manajemen risiko, sistem pengawasan internal pemerintah, dan	Melakukan adaptasi sesuai kebutuhan publik terhadap layanan prima Menerapkan manajemen risiko, sistem pengawasan internal pemerintah, dan	Melakukan adaptasi sesuai kebutuhan publik terhadap layanan prima Menerapkan manajemen risiko, sistem pengawasan internal pemerintah, dan	Melakukan adaptasi sesuai kebutuhan publik terhadap layanan prima Menerapkan manajemen risiko, sistem pengawasan internal pemerintah, dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				meningkatkan kinerja	sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
		Terwujudnya Profesionalitas ASN	Penguatan Sistem Merit, pengembangan Kompetensi, digitalisasi manajemen dan penguatan budaya kerja	- Seleksi ASN berbasis kompetensi dan integritas - Promosi dan mutasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja - Penilaian kinerja berbasis target dan hasil kerja. - Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan disiplin ASN	Digitalisasi seleksi berbasis Sistem ASN yang mengutamakan kompetensi dan integritas Manajemen ASN berbasis kompetensi dan budaya kerja Pelaksanaan reformasi manajemen asn Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan disiplin ASN melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kepemimpinan	Peningkatan Fitur seleksi ASN berbasis sistem yang mengacu pada kompetensi dan integritas Pemberian penghargaan dan sanksi kepada ASN berbasis kinerja Penguatan budaya kerja ASN unggul Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan disiplin ASN melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kepemimpinan	Implementasi seleksi ASN berbasis kompetensi dan integritas Pemberian penghargaan dan sanksi kepada ASN berbasis kinerja Penerapan inovasi dalam budaya kerja ASN Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan disiplin ASN melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kepemimpinan	Implementasi seleksi ASN berbasis kompetensi dan integritas Pemberian penghargaan dan sanksi kepada ASN berbasis kinerja Pengembangan kinerja ASN melalui peningkatan kompetensi ASN Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan disiplin ASN melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kepemimpinan	Monitoring dan evaluasi seleksi ASN berbasis kompetensi dan integritas Monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan sanksi kepada ASN berbasis kinerja Pengembangan kinerja ASN melalui peningkatan kompetensi ASN Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan disiplin ASN melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kepemimpinan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
		Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang Handal	Peningkatan Kapabilitas dan Kapasitas Perencanaan serta Penggunaan Data yang Berkualitas	- Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perencanaan - Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dalam Penyusunan Perencanaan - Menginventaris dan Evaluasi Kebutuhan Data Perencanaan melalui Forum Satu Data - Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan antar Bidang Urusan	Peningkatan kompetensi SDM Perencanaan melalui pelatihan dan bimtek Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan dengan data yang termuat dalam SIPD Verifikasi dan validasi data perencanaan dengan wali data melalui forum satu data Koordinasi input data perencanaan dengan pengampu bidang urusan	Peningkatan kompetensi SDM Perencanaan melalui pelatihan dan bimtek Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan dengan data yang termuat dalam SIPD Verifikasi dan validasi data perencanaan dengan wali data melalui forum satu data Verifikasi dan validasi data perencanaan dengan pengampu bidang urusan	Peningkatan kompetensi SDM Perencanaan melalui pelatihan dan bimtek Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan dengan data yang termuat dalam SIPD Verifikasi dan validasi data perencanaan dengan wali data melalui forum satu data Verifikasi dan validasi data perencanaan dengan pengampu bidang urusan	Peningkatan kompetensi SDM Perencanaan melalui pelatihan dan bimtek Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan dengan data yang termuat dalam SIPD Verifikasi dan validasi data perencanaan dengan wali data melalui forum satu data Monitoring dan evaluasi data perencanaan dengan pengampu bidang urusan	Peningkatan kompetensi SDM Perencanaan melalui pelatihan dan bimtek Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan dengan data yang termuat dalam SIPD Verifikasi dan validasi data perencanaan dengan wali data melalui forum satu data Monitoring dan evaluasi data perencanaan dengan pengampu bidang urusan
		Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD melalui Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengawasan, penganggaran, dan pembentukan produk hukum	Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi anggota DPRD dan studi komparasi dengan anggota DPRD lain.	Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi anggota DPRD dan studi komparasi dengan anggota DPRD lain.	Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi anggota DPRD dan studi komparasi dengan anggota DPRD lain.	Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi anggota DPRD dan studi komparasi dengan anggota DPRD lain.	Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi anggota DPRD dan studi komparasi dengan anggota DPRD lain.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				daerah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					
		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Indikator Kinerja Utama yang Jelas dan Terukur, Pengawasan Internal yang efektif, Keterbukaan Dalam Pengelolaan Anggaran, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Serta Penguatan Evaluasi dan Pemantuan Kinerja	▪ Meningkatkan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran ▪ Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya Pemerintah Daerah ▪ Meningkatkan Kualitas Pelayanan ▪ Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Kinerja dan Akuntabilitas ▪ Meningkatkan Pengawasan dan	Pelaporan pengelolaan anggaran tepat waktu Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan batas kemampuan keuangan daerah Meningkatkan tata kelola lembaga pengelola anggaran Peningkatan kompetensi ASN dengan pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis Monitoring dan evaluasi kinerja	Sosialisasi dan publikasi pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan batas kemampuan keuangan daerah Meningkatkan tata kelola lembaga pengelola anggaran Peningkatan kompetensi ASN dengan pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis Monitoring dan evaluasi kinerja	Sosialisasi dan publikasi pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan batas kemampuan keuangan daerah Meningkatkan tata kelola lembaga pengelola anggaran Peningkatan kompetensi ASN dengan pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis Monitoring dan evaluasi kinerja	Sosialisasi dan publikasi pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan batas kemampuan keuangan daerah Meningkatkan tata kelola lembaga pengelola anggaran Peningkatan kompetensi ASN dengan pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis Monitoring dan evaluasi kinerja	Sosialisasi dan publikasi pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan batas kemampuan keuangan daerah Meningkatkan tata kelola lembaga pengelola anggaran Peningkatan kompetensi ASN dengan pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis Monitoring dan evaluasi kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Evaluasi yang Efektif	pengelola anggaran setiap awal tahun selanjutnya	pengelola anggaran setiap awal tahun selanjutnya	pengelola anggaran setiap awal tahun selanjutnya	pengelola anggaran setiap awal tahun selanjutnya	pengelola anggaran setiap awal tahun selanjutnya
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Penguatan Pengawasan dan Evaluasi	- Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Publik	Meningkatkan tata kelola lembaga pelayanan	Meningkatkan tata kelola lembaga pelayanan	Meningkatkan tata kelola lembaga pelayanan	Meningkatkan tata kelola lembaga pelayanan	Meningkatkan tata kelola lembaga pelayanan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengembangan Digitalisasi Pengadaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	- Meningkatkan Transparansi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi dan publikasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam basis data yang mudah diakses	Sosialisasi dan publikasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam basis data yang mudah diakses	Sosialisasi dan publikasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam basis data yang mudah diakses	Sosialisasi dan publikasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam basis data yang mudah diakses	Sosialisasi dan publikasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam basis data yang mudah diakses
					Pelatihan kepada ASN dalam bidang barang dan jasa	Pelatihan kepada ASN dalam bidang barang dan jasa	Pelatihan kepada ASN dalam bidang barang dan jasa	Pelatihan kepada ASN dalam bidang barang dan jasa	Pelatihan kepada ASN dalam bidang barang dan jasa

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Meningkatkan Kualitas Barang dan Jasa - Meningkatkan Akuntabilitas dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Memperbaharui data barang dan jasa di dalam basis data	Memperbaharui data barang dan jasa di dalam basis data	Memperbaharui data barang dan jasa di dalam basis data	Memperbaharui data barang dan jasa di dalam basis data	Memperbaharui data barang dan jasa di dalam basis data
		Meningkatnya Kejelasan Hak Atas Tanah	Pensertifikatan Tanah Penyelesaian Sengketa, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penggunaan Tanah	- Meningkatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah - Meningkatkan Transparansi Dalam Pengelolaan Tanah - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Tanah	Pendampingan kepastian hukum hak atas tanah Pengelolaan tanah sesuai dengan RTRW yang berlaku Sosialisasi pengelolaan tanah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tabanan	Pendampingan kepastian hukum hak atas tanah Pengelolaan tanah sesuai dengan RTRW yang berlaku Sosialisasi pengelolaan tanah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tabanan	Pendampingan kepastian hukum hak atas tanah Pengelolaan tanah sesuai dengan RTRW yang berlaku Sosialisasi pengelolaan tanah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tabanan	Pendampingan kepastian hukum hak atas tanah Pengelolaan tanah sesuai dengan RTRW yang berlaku Sosialisasi pengelolaan tanah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tabanan	Pendampingan kepastian hukum hak atas tanah Pengelolaan tanah sesuai dengan RTRW yang berlaku Sosialisasi pengelolaan tanah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tabanan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Peningkatan pengelolaan arsip daerah sesuai NSPK	- Peningkatan kompetensi SDM pengelola kearsipan - peningkatan infrastruktur kearsipan	Peningkatan kompetensi SDM kearsipan melalui bimtek Rehabilitasi sarana dan	Peningkatan kompetensi SDM kearsipan melalui bimtek Rehabilitasi sarana dan	Peningkatan kompetensi SDM kearsipan melalui bimtek Rehabilitasi sarana dan	Peningkatan kompetensi SDM kearsipan melalui bimtek Rehabilitasi sarana dan	Peningkatan kompetensi SDM kearsipan melalui bimtek Rehabilitasi sarana dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
					prasarana kearsipan	prasarana kearsipan	prasarana kearsipan	prasarana kearsipan	prasarana kearsipan
Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia	Melestarikan dan mengembangkan nilai adat, tradisi, seni dan budaya daerah	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan an tradisi, seni, sastra, dan budaya masyarakat	▪ Peningkatan pendidikan dan literasi seni budaya melalui integrasi pendidikan seni dan budaya daerah dalam kurikulum pendidikan di sekolah, workshop kesenian dan festival budaya daerah. ▪ Peningkatan promosi dan apresiasi seni dan budaya daerah melalui pemberian apresiasi Seni dan Penghargaan untuk Seniman Lokal, Promosi Melalui Media Sosial dan Digital dan pengembangan produk seni dan budaya daerah ▪ Pelestarian dan pengembangan kearifan lokal melalui sosialisasi	Penguatan kurikulum muatan lokal dan pelibatan pelajar dalam festival budaya daerah Pemberian penghargaan kepada pelaku seni, pengadaan dan sosialisasi festival budaya daerah Pengadaan festival budaya daerah yang melibatkan	Penguatan kurikulum muatan lokal dan pelibatan pelajar dalam festival budaya daerah Pemberian penghargaan kepada pelaku seni, pengadaan dan sosialisasi festival budaya daerah Pengadaan festival budaya daerah yang melibatkan	Penguatan kurikulum muatan lokal dan pelibatan pelajar dalam festival budaya daerah Pemberian penghargaan kepada pelaku seni, pengadaan dan sosialisasi festival budaya daerah Pengadaan festival budaya daerah yang melibatkan	Penguatan kurikulum muatan lokal dan pelibatan pelajar dalam festival budaya daerah Pemberian penghargaan kepada pelaku seni, pengadaan dan sosialisasi festival budaya daerah Pengadaan festival budaya daerah yang melibatkan	Penguatan kurikulum muatan lokal dan pelibatan pelajar dalam festival budaya daerah Pemberian penghargaan kepada pelaku seni, pengadaan dan sosialisasi festival budaya daerah Pengadaan festival budaya daerah yang melibatkan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				pelestarian tradisi dan kearifan lokal, pemberdayaan komunitas seni lokal, menghidupkan tradisi lokal dan mendorong industri kreatif lokal Peningkatan infrastruktur dan fasilitas seni budaya melalui Perbaikan dan Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan fasilitas seni di ruang publik	seluruh pelaku seni di Kabupaten Tabanan Pendataan / inventarisasi infrastruktur seni dan budaya, warisan budaya tak benda dan cagar budaya	seluruh pelaku seni di Kabupaten Tabanan Penyusunan Kajian infrastruktur seni dan budaya, warisan budaya tak benda dan cagar budaya	seluruh pelaku seni di Kabupaten Tabanan Sosialisasi infrastruktur seni dan budaya, warisan budaya tak benda dan cagar budaya	seluruh pelaku seni di Kabupaten Tabanan Pemanfaatan infrastruktur seni dan budaya, warisan budaya tak benda dan cagar budaya	seluruh pelaku seni di Kabupaten Tabanan Pembinaan terhadap SDM Kebudayaan
		Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemanfaatan lahan berkelanjutan	Memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti fungsi lahan, potensi sumber daya, dan kebutuhan masyarakat	Membuat dokumen perencanaan lahan yang tepat. Pengelolaan lahan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan. Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan seperti	Penggunaan lahan multifungsi: menggunakan lahan untuk beberapa tujuan seperti pertanian, konservasi dan rekreasi, untuk memaksimalkan nilai lahan. Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan seperti	Pertanian organik dan pertanian hidroponik untuk meminimalkan dampak lingkungan. Pengurangan limbah dan polusi yang dihasilkan dari penggunaan lahan.	Melakukan konservasi lahan untuk melindungi tanah dari erosi dan degradasi serta memelihara keanekaragaman hayati. Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan seperti membangun jaan usaha tani	Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan seperti sistem irigasi yang efisien dan penggunaan drone untuk memantau kondisi lahan. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Mendorong praktik pertanian yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan agroforestri - Mencegah erosi tanah, menjaga	membangun jaan usaha tani dan sistem drainase yang efektif Mengembangkan pertanian organik, menggunakan sistem irigas yang efisien untuk mengurangi penggunaan air dan meminimalkan limbah. Penanaman tanaman	membangun jaan usaha tani dan sistem drainase yang efektif Menggunakan metode pertanian konservasi yang meminimalkan pengolahan tanah dan mempertahankan residu tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan kesuburan tanah. Pengendalian hama dan penyakit yang terintegrasi seperti penggunaan predator alami dan rotasi tanaman untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia. Menggunakan mulsa untuk	Pengintegrasian pohon ke dalam sistem pertanian untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, mengurangi erosi dan meningkatkan kesuburan tanah, menggunakan teknologi yang tepat seperti sistem informasi geografis (SIG) dan drone untuk memantau kondisi tanaman dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya Membuat terracing untuk	dan sistem drainase yang efektif Menggunakan sistem hidroponik yang efisien dalam penggunaan air dan nutrisi untuk meningkatkan produksi tanaman. Mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan dengan mempromosikan keanekaragaman hayati, mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penggunaan tanaman yang	lahan untuk memastikan bahwa tujuan lahan tercapai dan dampak lingkungan diminimalkan. Menggunakan pupuk organik yang berasal dari bahan alami untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi dampak lingkungan. Menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Penanaman pohon untuk

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				kualitas air, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam kegiatan pertanian dan non-pertanian ▪ Menggunakan teknologi informasi, teknologi pertanian, dan teknologi pengelolaan air untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan lahan	penutup tanah seperti legum dan rumput untuk mengurangi erosi tanah. Menggunakan pestisida dan pupuk yang bijak dan tidak berlebihan untuk mengurangi polusi air. Menggunakan sistem irigasi yang efisien seperti rigasi tetes dan irigasi sprinkler untuk mengurangi penggunaan air. Pengembangan sisem informasi lahan untuk memantau dan mengelola lahan secara efektif. Penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap penakit dan memiliki produktivitas tinggi.	melindungi taah dari erosi dan meningkatkan kelembaban tanah. Mengelola limbah pertanian dan non pertanian dengan baik untuk mencegah polusi air. Pemetaan lahan menggunakan teknologi GIS untuk memantau kondisi lahan dan mengindetifikasi potensi lahan. Pengembangan sistem pengelolaan air yang efektif dan efisien untuk meningkatkan	mengurangi aliran air dan mencegah erosi tanah. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti sistem irigasi yang efisien untuk mengurangi dampak lingkungan. Mengelola air denga bijak dan tidak berlebihan untuk mengurangi penggunaan air. Analisis data untuk memantau kondisi lahan. Mengidentifikasi potensi lahan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan. Penggunaan teknologi irigasi hemat air seperti irigasi tetes dan irigasi sprinkler	tepat untuk kondisi tanah dan iklim setempat. Pemantauan kualitas air secara teratur untuk mendeteksi perubahan kualitas air. Penggunaan tanaman yang toleran kekeringan untuk mengurangi kebutuhan air. Pertanian presisi seperti drone, sensor dan GPS untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Penggunaan air limbah ang telah diolah untuk keperluan pertanian dan lain – lain.	mengurangi erosi tanah. Menggunakan teknologi yang tepat seperti sensor kelembaban tanah untuk memantau kebutuhan air tanaman. Sistem irigasi : pengembangan sistem irigasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan lahan berkelanjutan, serta memperkuat regulasi dan insentif yang mendukung praktik berkelanjutan	Membuat regulasi yang mendukung pengelolaan lahan berkelanjutan. Penanaman pohon dan pengelolaan sumber daya alam. Menginvestasikan dana dalam pengelolaan lahan berkelanjutan, seperti pengembangan pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam.	efisiensi pemanfaatan air Pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan lahan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Mengembangkan dan menerapkan teknologi dan inovasi yang mendukung pengelolaan lahan berkelanjutan.	untuk menghemat air. Menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan petani tentang pengelolaan lahan berkelanjutan. Bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan pengelolaan lahan berkelanjutan.	Menyediakan insentif kepada petani dan masyarakat yang menerapkan pengelolaan lahan berkelanjutan. Bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan pengelolaan lahan berkelanjutan	Mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti pertanian dan ekowisata.
	Menumbuhkan semangat kebinekaan dan toleransi	Meningkatnya pemahaman politik dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan	- Pendidikan Politik yang Inklusif dan Berbasis Nilai Demokrasi - Penguatan Peran Lembaga Pendidikan Nonformal	Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih Pembinaan kepada organisasi	Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih Pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan	Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih Pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan	Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih Pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan	Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih Pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Pembinaan Wawasan Kebangsaan berbasis lembaga adat - Penggunaan Media Sosial	kemasyarakatan Pembinaan wawasan kebangsaan kepada generasi muda Publikasi kegiatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan melalui teknologi informasi (media sosial)	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada generasi muda Publikasi kegiatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan melalui teknologi informasi (media sosial)	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada generasi muda Publikasi kegiatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan melalui teknologi informasi (media sosial)	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada generasi muda Publikasi kegiatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan melalui teknologi informasi (media sosial)	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada generasi muda Publikasi kegiatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan melalui teknologi informasi (media sosial)
		Meningkatnya ketahanan Daerah	Meningkatkan ketahanan sosial budaya	- Memperkuat Identitas Nasional - Melestarikan Warisan Budaya - Meningkatkan Toleransi	Penguatan nasionalisme kepada baik internal maupun eksternal perangkat daerah Pencegahan potensi konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku dan agama Sosialisasi dan pembinaan	Penguatan nasionalisme kepada baik internal maupun eksternal perangkat daerah Pencegahan potensi konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku dan agama Sosialisasi dan pembinaan	Penguatan nasionalisme kepada baik internal maupun eksternal perangkat daerah Pencegahan potensi konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku dan agama Sosialisasi dan pembinaan	Penguatan nasionalisme kepada baik internal maupun eksternal perangkat daerah Pencegahan potensi konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku dan agama Sosialisasi dan pembinaan	Penguatan nasionalisme kepada baik internal maupun eksternal perangkat daerah Pencegahan potensi konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku dan agama Sosialisasi dan pembinaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Pembenahan Regulasi - Pemberdayaan Masyarakat	kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi beragama Penyelerasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan produk kesbangpol dengan pemerintah daerah Pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan peran serta masyarakat adat	kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi beragama Penyelerasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan produk kesbangpol dengan pemerintah daerah Pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan peran serta masyarakat adat	kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi beragama Penyelerasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan produk kesbangpol dengan pemerintah daerah Pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan peran serta masyarakat adat	kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi beragama Penyelerasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan produk kesbangpol dengan pemerintah daerah Pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan peran serta masyarakat adat	kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi beragama Penyelerasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan produk kesbangpol dengan pemerintah daerah Pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan peran serta masyarakat adat
	Terjaganya kelestarian alam tabanan yang bersih, sehat dan lestari	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan	Edukasi dan Sosialisasi	Pelatihan untuk meningkatkan kemamouan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola persampahan	Workshop untuk membahas topik – topik terkait dengan pengelolaan persampahan.	Pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan	Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan persampahan	Penyuluhan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan persampahan. Penggunaan media sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Partisipasi Masyarakat	Musyawarah untuk membahas dan memutuskan rencana pengelolaan persampahan	Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pembentukan kelompok masyarakat untuk mengelola persampahan secara bersama - sama	Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola persampahan	untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola persampahan
		Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Mengurangi Emisi GRK	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi di rumah	Pendidikan dan Sosialisasi	Penyuluhan tentang pentingnya pengendalian pencemaran lingkungan	Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan	Pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan	Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian pencemaran lingkungan	Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pertemuan masyarakat untuk membahas dan meningkatkan kesadaran tentang pengendalian

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pentahapan Pembangunan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				- Regulasi dan Standar - Pemanfaatan energi terbarukan, seperti panel surya	Pengembangan peraturan dan kebijakan untuk mengatu pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan Pengembangan Energi Air, Pengembangan Energi Surya	Penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku Pengembangan Energi Angin, Pengembangan Energi Air, Pengembangan Energi Surya	Pengawasan untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pengembangan Energi Air, Pengembangan Energi Surya	Pengembangan standar untuk pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan Pengembangan Energi Air, Pengembangan Energi Surya	pencemaran lingkungan Penerapan standar untuk memastikan pengendalian pencemaran lingkungan yang efektif dan efisien, Pemberian Sertifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Pengembangan Energi Air, Pengembangan Energi Surya

Sebagaimana pentahapan pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2025-2030, maka pembangunan tahunan dilakukan dengan tema sebagai berikut :

1. Tahap I tahun 2026 tema pembangunan adalah Peningkatan Kesejahteraan melalui Pertanian Berkelanjutan.
2. Tahap II tahun 2027 mengusung tema Hilirisasi dan membangun ekosistem produk unggulan
3. Tahap III tahun 2028 dengan tema Meningkatkan Daya Saing Daerah
4. Tahap IV tahun 2029 dengan tema Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah
5. Tahap V tahun 2030 merupakan perwujudan Landasan Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola yang kuat

c. Program Prioritas Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan daerah adalah implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan program-program yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2025-2029 yang menekankan pada :

1. Mewujudkan ketahanan pangan untuk memperkuat Tabanan sebagai lumbung pangan Bali
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan cakupan jaminan sosial dan daya saing tenaga kerja
4. Penguatan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya
5. Meningkatkan kualitas pariwisata berbasis wisata desa, yang didukung dengan UMKM, Koperasi, dan ekonomi kreatif
6. Mewujudkan lingkungan hidup yang hijau, bersih dan lestari

7. Meningkatkan kualitas infrastruktur fisik dan digital yang merata
8. Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Prioritas pembangunan daerah tersebut disinkronkan dengan program nomenkatur Perangkat Daerah, sehingga program yang dilaksanakan secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.4.
Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM)						
	Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri					
	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang cerdas dan berkarater			Indeks Pendidikan		
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi Anak Usia Sekolah		Rapor Pendidikan		
			Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar	Angka Partisipasi Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Membangun manusia Tabanan yang tangguh memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang berkompeten	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani						
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan untuk Kesehatan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan		Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional		
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan perorangan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif						
	Menumbuhkan dan Mengembangkan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan Yang Inklusif, Kreatif, dan Berkelanjutan			Rasio Wirausaha		
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB		
			Meningkatnya distribusi dan	Persentase subak yang terlayani prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			kualitas prasarana pertanian			
			Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Produksi Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal						
	Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Tabanan yang Merata dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi Daerah		
			Meningkatnya Jangkauan Promise Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Yang Memeroleh Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya Kapasitas SDM	Persentase Pelaku Pariwisata dan	Program Pengembangan	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah Perdagangan		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah		Persentase Kemantapan Jalan		
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pelayanan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi Layak (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola TPA/TPST/TPS3R	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas layanan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban						
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Melalui Peningkatan Kompetensi ASN			Opini Atas Sistem Laporan Keuangan Daerah		
		Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital dan Keamanan Informasi		Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		
			Meningkatnya Layanan Digital Pemerintah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)		
		Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau		Rasio Konektivitas		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia						
	Melestarikan dan Mengembangkan Nilai Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Daerah			Nilai Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah		
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		
				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan		
			Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup		Persentase Desa Adat yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
	Menumbuhkan Semangat Kebhinekaan dan Toleransi			Indeks Harmoni Indonesia		
		Meningkatnya Pemahaman Politik		Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih		
			Meningkatnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		Meningkatnya Ketahanan Daerah		Persentase Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			menggunakan hak pilih		Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
	Terjaganya kelestarian alam tabanan yang bersih, sehat dan lestari			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Program Pengelolaan Persampahan	
		Meningkatnya ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK		Persentase Desa Program Kampung Iklim (Proklim)		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang memperoleh penghargaan (Persentase)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Rencana dan Indikasi Program Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan langkah berikutnya dalam menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan suatu jembatan konseptual yang menghubungkan rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dengan adanya kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sasaran yang telah ditetapkan akan dijabarkan ke dalam indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator program yang menjadi bidang dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam melaksanakan program tersebut. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kerangka pendanaan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut.

Tabel 4.1.Rencana dan Indikasi Pendanaan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				2.207.975,44		2.333.841,65		2.467.863,91		2.617.664,20		2.814.412,21	
Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.313.978,67		1.388.768,31		1.469.124,00		1.556.559,69		1.674.387,16	
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				543.166,49		574.198,83		607.169,64		644.048,13		692.448,47	Pendidikan
1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,00 (BB)	75,00 (BB)	474.967,49	76,00 (BB)	502.102,83	77,00 (BB)	530.933,64	78,00 (BB)	563.181,13	79,00 (BB)	605.505,47	
1.2. Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	87,74	90	67.634	92	71.499	94	75.604	96	80.196	98	86.223	
1.3. Program Pendi-dik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	71,40	75	300	80	317	85	335	90	356	95	382	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
1.4. Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100	100	265	100	280	100	297	100	315	100	338	
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				584.527,07		617.923,58		653.404,13		693.090,79		745.177,59	
2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	480.449,07	76 (BB)	507.897,58	77 (BB)	537.061,13	78 (BB)	569.680,79	79 (BB)	612.493,59	Kesehatan
2.2. Program Pemanfaatan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	6,3	7,4	99.918	7,3	105.627	7,2	111.692	7,1	118.476	7,0	127.379	
2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang	53,63	55	2.493	60	2.636	65	2.787	70	2.957	75	3.179	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
	memiliki jenis dan jumlah SDM kesehatan yang memenuhi standar												
2.4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan serta pemenuhan makanan dan minuman yang memenuhi standar	70	72	245	75	259	80	274	85	291	90	313	
2.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	53,38	25	578	35	611	45	646	65	685	75	736	
2.6. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	100	100	844	100	893	100	944	100	1.001	100	1.077	
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				144.988,36		150.815,14		157.005,70		163.931,03		176.019,44	
3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,65 (BB)	72,25 (BB)	22.628,36	72,50 (BB)	23.921,14	72,75 (BB)	25.294,70	73,00 (BB)	26.831,03	74,00 (BB)	28.847,44	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Daerah Kabupaten/Kota													
3.2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	58	60	17.350	62	17.770	64	18.216,00	66	18.715	68	19.370,00	
3.3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Berakses Layanan Air Minum	72,63	75,38	12.800	76,10	12.960	78,10	13.130,00	79,47	13.320	80,00	13.570,00	
3.4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	N.A.	17	10.950	15	11.004	13	11.062,00	11	11.126	10	11.211,00	
3.5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi Layak (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	70,00	75,00	1.050	80,00	1.110	85,00	1.174,00	90,00	1.245	100	1.339,00	
3.6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	60	65	2.200	70	2.326	75	2.459,00	80	2.609	100	2.805,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
3.7. Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik	50	55	250	60	400	65	500,00	70	600	75	700,00	
3.8. Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kodisi Baik	85	88,15	10.000	91,14	10.207	94,07	10.486,00	97,03	10.811	100	11.268,00	
3.9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100	100	300	100	317	100	335,00	100	356	100	382,00	
3.10. Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	95,93	98	66.640	100	69.933	100	73.432,00	100	77.345	100	85.482,00	
3.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	20	25	310	30	328	35	347,00	40	368	50	395,00	
3.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	100	100	510	100	539	100	570,00	100	605	100	650,00	
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan				2.405,00		3.071,00		3.897,00		4.232,00		4.594,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Kawasan Permukiman													
4.1. Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	55	60	630	65	1.000	70	1.500,00	75	1750	80	2.000,00	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4.2. Program Kawasan Permukiman	Persentase Kualitas Kawasan Permukiman	97	98	1.250	98,50	1.321	99	1.397,00	99,50	1.482	100	1.594,00	
4.3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	100	100	525	100	750	100	1.000,00	100	1000	100	1.000,00	
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				29.249,82		31.492,15		34.392,52		36.813,48		40.161,28	
5.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	27.188,82	76 (BB)	28.742,15	77 (BB)	30.392,52	78 (BB)	32.238,48	79 (BB)	34.661,28	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Daerah Kabupaten/Kota													Perlindungan Masyarakat
5.2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100	195	100	250	100	500,00	100	550	100	750,00	
5.3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100	901	100	1.000	100	1.500,00	100	1525	100	1.750,00	
5.4. Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Diberikan	100	100	965	100	1.500	100	2.000,00	100	2500	100	3.000,00	
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				9.641,93		11.267,61		13.255,01		14.444,26		15.986,38	
6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	7.205,93	76 (BB)	7.617,61	77 (BB)	8.055,01	78 (BB)	8.544,26	79 (BB)	9.186,38	Sosial
6.2. Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai	44	55	618	60	1.000	65	1.500,00	70	1650	75	2.000,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
	standar dalam penanganan PMKS												
6.3. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	100	100	718	100	1.000	100	1.500,00	100	1750	100	2.000,00	
6.4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100	100	500	100	1.000	100	1.500,00	100	1750	100	2.000,00	
6.5. Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapat penanganan	100	100	500	100	550	100	600,00	100	650	100	700,00	
6.6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Monumen Tugu Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	0	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00	
2. Bidang Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				282.792,79		298.558,14		316.206,48		335.511,60		360.479,06	
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				1.284,00		1.710,00		1.921,00		2.182,00		2.395,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
7.1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berkompeten	72	72,9	144	73,8	500	74,7	650,00	75,6	850	76,5	1.000,00	Tenaga Kerja
7.2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	72	72,1	40	72,2	100	72,3	150,00	72,4	200	72,5	250,00	
7.3. Program Hubungan Industrial	Persentase sengketa pengusaha dan pekerja yang tertangani	100	100	1.100	100	1.110	100	1.121	100	1.132	100	1.145	
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				559		591		625		663		713	
8.1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	100	100	35	100	37	100	39	100	42	100	45	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8.2. Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani	100	100	264	100	279	100	295	100	313	100	337	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
8.3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	80	82	60	82,5	63	83	67	83,5	71	84,5	77	
8.4. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani	100	100	200	100	212	100	224	100	237	100	255	
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				5.143,56		5.394,15		5.661,58		5.959,91		6.351,53	
9.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,00 (BB)	73,00 (BB)	3.878,56	74,00 (BB)	4.100,15	75,00 (BB)	4.335,58	76,00 (BB)	4.598,91	77,00 (BB)	4.944,53	Pangan
9.2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,41	92,3	515	92,7	544	93,1	576,00	93,6	611	94	657,00	
9.3. Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250	100	250,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9.4.Prgram Pengelolaan Sumber Daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	28,45	48,81	250,00	61,9	250,00	75	250,00	88,1	250	100	250,00	
9.5.Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5,26	3,76	250,00	3,01	250,00	2,26	250,00	1,5	250,00	0,75	21150,00	
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				200,00		211,00		224,00		237,00		255,00	
10.1. Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Pemda yang Bersertifikat	90	92	200,00	93	211,00	94	224,00	95	237,00	96	255,00	Pertanahan
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				40.376,10		42.390,32		44.532,23		46.944,46		50.094,24	
11.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	17.560,10	76 (BB)	18.563,32	77 (BB)	19.629,23	78 (BB)	20.821,46	79 (BB)	22.386,24	Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11.2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Reko- mendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	250	100	250	100	250,00	100	250	100	250,00	
11.3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	62,50	73,86	1.410	74,06	1.434	74,26	1.459,00	74,46	1.487	74,66	1.523,00	
11.4. Program Pengelolaan Keaneka- ragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	100	100	2.250	100	2.331	100	2.417,00	100	2.529	100	2.662,00	
11.5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang Terkelola	N.A	22	648	26	656	28	665,00	30	675	100	688,00	
11.6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau	N.A.	25	648	30	656	40	665,00	45	675	50	688,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis												
11.7. Program Penga- kuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N.A.	100	648	100	656	100	665,00	100	675	100	688,00	
11.8. Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N.A.	20	648	20	656	20	665,00	20	675	20	688,00	
11.9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	100	100	648	100	656	100	665,00	100	675	100	688,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan yang tertangani	100	100	648	100	656	100	665,00	100	675	100	688,00	
11.11. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang Terkelola di Kabupaten./Kota	N.A.	20	15.018	20	15.876	20	16.787,00	20	17.807	100	19.145,00	
12. Urusan Pemerin- tahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				15.311,89		16.186,57		17.115,59		18.154,95		19.519,92	
12.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,10 (BB)	72,10 (BB)	12.141,89	72,60 (BB)	12.835,57	73,10 (BB)	13.572,59	73,60 (BB)	14.396,95	74,10 (BB)	15.478,92	Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
12.2. Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	91	95	750	96	793	97	838	98	889	99	956	
12.3. Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan	60	62	2.020	63	2.135	64	2.258	65	2.395	66	2.575	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
	dokumen pencatatan sipil												
12.4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang Terlayani Administrasi Kependudukan	66	69	155	70	164	71	173	72	184	73	198	
12.5. Program Penge- lolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	245	100	259	100	274	100	290	100	312	
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				12.714,16		13.437,20		14.205,30		15.066,01		16.194,18	
13.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,20 (BB)	70,30 (BB)	9.260,16	70,50 (BB)	9.789,20	70,75 (BB)	10.351,30	80 (BB)	10.980,01	80,25 (A)	11.805,18	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13.2. Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertib Hukum	95,48	100	50	100	50	100	50,00	100	50	100	50,00	
13.3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	100	100	1.335	100	1.411	100	1.492,00	100	1.583	100	1.702,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13.4. Program Pemberdayaan Lembaga Ke masyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Strata Kelompok – Kelompok Kemasyarakatan Desa	95,00	100	2.069	100	2.187	100	2.312,00	100	2.453	100	2.637,00	
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				10.198,21		10.780,52		11.401,04		12.092,28		13.000,52	
14.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	5.939,21	76 (BB)	6.278,52	77 (BB)	6.639,04	78 (BB)	7.042,28	79 (BB)	7.571,52	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14.2. Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	1,84	1,86	285	1,87	301	1,89	319	1,90	338	2,00	363	
14.3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive</i>	61,10	60,90	2.781	60,85	2.940	60,80	3.109	60,75	3.297	60,73	3.545	
14.4. Program Pemberdayaan Dan	Persentase Keluarga yang Mengikuti	51	55	1.193	57	1.261	59	1.334	61	1.415	63	1.521	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga												
15. Urusan Pemerin- tahan Bidang Perhubungan				54.707,76		57.833,35		61.154,01		64.868,88		69.744,31	
15.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79,40 (BB)	80,00 (BB)	19.351,76	80,50 (A)	20.457,35	81,00 (A)	21.632,01	81,50 (A)	22.945,88	82,00 (A)	24.670,31	Perhubungan
15.2. Program Penye- lenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	55	65	35.356	70	37.376	75	39.522	80	41.923	85	45.074	
	Konektivitas Darat	88	92		96		100		100		100		
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				13.509,44		14.281,04		15.101,73		16.017,99		17.222,38	
16.1. Program Penunjang Urusan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65 (B)	70 (B)	7.029,44	71 (BB)	7.431,04	72 (BB)	7.857,73	73 (BB)	8.334,99	75 (BB)	8.961,38	Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a													
16.2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan informasi publik Pemerintah Daerah	84	84,25	1.433	84,50	1.515	84,75	1.602	85	1.699	85,25	1.827	
16.3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan pemerintah dan fasilitas publik yang didukung teknologi informasi	95,54	96,25	5.047	96,50	5.335	96,75	5.642	97,00	5.984	97,25	6.434	
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				7.890,92		8.470,98		9.062,09		9.778,69		10.590,29	
17.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,20 (BB)	74,72 (BB)	6.739,92	76,48 (BB)	7.124,98	78,24 (BB)	7.534,09	80,00 (A)	7.991,69	81,76 (A)	8.592,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
17.2. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	100	125	100	135	100	135,00	100	151	100	158,00	
17.3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5	7	230	9	235	11	240,00	13	252	15	266,00	
17.4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	72,12	90,5	350	93,5	376	96,5	403,00	98,5	434	100	474,00	
17.5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan UMKM	2,79 (1190 UMKM)	1 (438 UMKM)	346	1 (442 UMKM)	500	1 (447 UMKM)	650,00	1 (451 UMKM)	850	1 (456 UMKM)	1.000,00	
17.6. Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang Menjalin Kemitraan	N.A.	0,5% (219 UMKM)	100	0,5% (221 UMKM)	100	0,5% (223 UMKM)	100,00	0,5% (225 UMKM)	100	0,5% (228 UMKM)	100,00	
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				7.994,58		8.464,50		9.002,71		9.595,26		10.348,17	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73,35 (BB)	74,00 (BB)	7.416,78	75,00 (BB)	7.840,50	76,00 (BB)	8.290,71	78,00 (BB)	8.794,26	78,00 (BB)	9.455,17	Penanaman Modal
18.2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	N.A.	1 juta	125	1 juta	150	1 juta	200,00	1 juta	250	1 juta	300,00	
18.3. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	N.A.	5	64,8	5	75	5	100,00	5	125	5	150,00	
18.4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai Ketentuan	N.A.	100	175	100	185	100	196,00	100	208	100	223,00	
18.5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N.A.	100	25	100	26	100	28,00	100	30	100	32,00	
18.6. Program Pengendalian Pelaksanaan	Persentase Penyelesaian Permasalahan	100	100	188	100	188	100	188,00	100	188	100	188,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Penanaman Modal	dan Hambatan Yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha												
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				7.837		8.285		8.761		9.293		9.990	
19.1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	5	6	772	7	816	8	863	9	915	10	984	Kepemudaan Dan Olahraga
19.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat pada Pekan Olah Raga Provinsi	6	6	6.825	6	7.215	5	7.629	4	8.093	4	8.700	
19.3. Program Pengembangan Kapasistas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	30	35	240	40	254	45	269	50	285	55	306	
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				100		106		112		119		127	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
20.1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Produsen Data yang memenuhi standar data statistik sektoral	70	80	100	85	106	90	112	95	119	100	127	Statistik
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				100		106		112		119		127	
21.1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang diukur kerentanannya oleh BSSN	30	36	100	38	106	40	112	42	119	45	127	Persandian
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				21.396,27		22.825,95		24.579,23		26.480,17		28.820,96	
22.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,65 (BB)	75 (BB)	8.571,27	76 (BB)	9.060,95	77 (BB)	9.581,23	78 (BB)	10.163,17	79 (BB)	10.926,96	Kebudayaan
22.2. Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	100	100	6.635	100	7.014	100	7.417,00	100	7.867	100	8.459,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
	Pengembangan Kebudayaan												
22.3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	60	65	4.250	70	4.493	75	4.751,00	80	5.039	85	5.418,00	
22.4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan	20	30	750	40	1000	50	1.500,00	60	2000	70	2.500,00	
	Persentase cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	20	30		40	50	60		70				
22.5. Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	10	15	1.190	20	1.258	25	1.330,00	30	1.411	35	1.517,00	
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				6.949,18		7.346,05		7.767,29		8.240,60		8.858,75	
23.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75,5 (BB)	6.544,18	76 (BB)	6.918,05	76,5 (BB)	7.315,29	77 (BB)	7.759,60	78 (BB)	8.342,75	Perpustakaan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Kabupaten/Kot a													
23.2. Program Pembinaan Perpustakaan	Niai Tingkat Kegemaran Masyarakat Membaca	60,14	64	240	65	254	66	268,00	67	285	68	306,00	
23.3. Program Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Persentase Pus- takawan Yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Perpustakaan	5	10	165	20	174	30	184,00	40	196	50	210,00	
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				435,00		459,00		485,00		516,00		554,00	
24.1. Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	100	100	140	100	148	100	156,00	100	166	100	178,00	Kearsipan
24.2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	100	130	100	137	100	145,00	100	154	100	166,00	
24.3. Program Akreditasi dan Sertifikasi	Persentase SDM Bidang Kearsipan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	165	100	174	100	184,00	100	196	100	210,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
				2026	2027	2028	2029	2030					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(9)
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				9.110,72		9.688,54		10.389,79		11.088,21		11.927,89	
25.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77,55 (BB)	78 (BB)	6.280,72	78,50 (BB)	6.639,54	79 (BB)	7.020,79	79,50 (BB)	7.447,21	80 (BB)	8.006,89	Kelautan dan Perikanan
25.2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	782,31	800,3	830	808,30	849	817,2 0	869,00	827	891	837,7 5	921,00	
25.3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.152,14	3.180,55	1000	3.188,50	1200	3.198,0 7	1.500,00	3.209,2 6	1750	3.222,1 0	2.000,00	
25.4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	33,40	34,5	1000	35	1000	35,5	1.000,00	36	1000	36,5	1.000,00	
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				8.228,52		8.650,08		9.141,74		9.673,88		10.425,44	
26.1. Program Penunjang Urusan	Nilai Akuntabilitas	72 (BB)	76 (BB)	5.628,52	78 (BB)	5.950,08	80 (BB)	6.291,74	82 (A)	6.673,88	84 (A)	7.175,44	Pariwisata

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Kinerja Perangkat Daerah												
26.2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	12 (3.395.857 Orang)	15 (3.905. 235 Orang)	1.000,00	15 (4.491.0 20 Orang)	1.100,00	15 (5.164 .675 Orang)	1.200,00	15 (5.939 .375 Orang)	1300	15 (6.830 .280 Orang)	1.500,00	
26.3. Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	9,327 Like	5 (9.793 Like)	500	5 (10.283 Like)	500	5 (10.79 7 Like)	500,00	5 (11.33 7 Like)	500	5 (11.90 4 Like)	500,00	
26.4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	26 (2.841 Pelaku)	27 (3.041 Pelaku)	1000	28 (3.141 Pelaku)	1000	29 (3.241 Pelaku)	1.000,00	30 (3.341 Pelaku)	1000	31 (3.441 Pelaku)	1.000,00	
26.5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI	2 (11 Pelaku Ekraf)	5 (21 Pelaku Ekraf)	100	7 (31 Pelaku Ekraf)	100	9 (41 Pelaku Ekraf)	150,00	11 (51 Pelaku Ekraf)	200	13 (61 Pelaku Ekraf)	250,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026	2027	2028	2029	2030						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			44.124,90	46.133,30	48.734,31	51.391,35	54.878,38						
27.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72,15 (BB)	74,15 (BB)	31.853,90	75,15 (BB)	33.673,74	76,15 (BB)	35.607,29	77,15 (BB)	37.769,98	78,15 (BB)	40.608,48	Pertanian
27.2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	216.976 Ton	2 (221.31 5,52 Ton)	2.375,00	1 (223.52 8,68 Ton)	2.453,56	1 (225.7 63,96 Ton)	2.537,02	1 (228.0 21,60 Ton)	2.630,37	1 (230.3 01,82 Ton)	2.752,90	
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	22.317,94 Ton	2 (22.764 ,30 Ton)		2 (23.219, 58 Ton)		2 (23.68 3,98 Ton)		2 (24.15 7,66 Ton)		2 (24.64 0,81 Ton)		
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pternakan	27.498,10 Ton	3 (28.232 ,04 Ton)		3 (29.172, 73 Ton)		3 (30.04 0,92 Ton)		3 (30.94 9,35 Ton)		3 (31.87 7,83 Ton)		
27.3. Program Penye- ediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase subak yang terlayani prasarana pertanian	5 (12 Subak)	9	5.626	13	5.631	17	6.106	21	6.391	25	6.780	
27.4. Program Pengendalian	Persentase Wilayah yang	93	96	1.545	97	1.576	98	1.609	98	1.646	98	1.695	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis												
27.5. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	10	20	1.425	30	1.449	40	1.475	50	1.504	60	1.542	
27.6. Program Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	20	50	1.300	65	1.350	80	1.400	95	1.450	100	1.500	
	Persentase Penanganan Perubahan Iklim terhadap Pertanian	0,38	0,56		0,75		0,94		1,13		1,31		
28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				12.321,58		12.773,59		13.542,84		14.296,96		15.402,10	
28.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,90 (BB)	75 (BB)	7.071,58	75,50 (BB)	7.475,59	78,10 (BB)	7.904,84	79,50 (BB)	8.384,96	80 (BB)	9.015,10	Perdagangan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Kabupaten/Kot a													
28.2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	60	66	2.125	73	2.258	80	2.399	86	2.457	100	2.664	
28.3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100	2.125	100	2.258	100	2.399	100	2.457	100	2.664	
28.4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan	100	100	200	100	132	100	140	100	148	100	159	
28.5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Presentase barang kebutuhan pokok yang stabil harganya	55	60	400	70	200	75	200,00	80	300	85	300,00	
28.6. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagaa- ngan yang Difasilitsi	100	100	400	100	450	100	500,00	100	550	100	600,00	
29. Urusan Pemerintahan				2.300,00		2.434,00		2.575,00		2.733,00		2.938,00	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Bidang Perindustrian													
29.1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	35	40	2.250	45	2.379	50	2.515,00	55	2.668	60	2.868,00	Perindustrian
29.2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini	1 dokumen	1 doku- men	50	1 doku- men	55	1 doku- men	60,00	1 doku- men	65	1 doku- men	70,00	
3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				121.141,55		128.063,50		135.419,00		143.640,35		154.437,05	
30. Unsur Sekretariat Daerah				85.709,55		90.607,50		95.812,00		101.628,35		109.267,05	
30.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	69.068,55	76 (BB)	73.014,50	77 (BB)	77.207,00	78 (BB)	81.896,35	79 (BB)	88.051,05	Sekretariat Daerah
30.2. Program Penataan Organisasi	Indek Kematangan Organisasi	40	42	174	44	184	46	195	48	206	50	222	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
30.3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,78	3,50	5.000	3,50	5.286	3,50	5.589	3,50	5.929	3,50	6.374	
30.4. Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	10.490	100	11.090	100	11.727	100	12.439	100	13.374	
30.5. Prgram fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	100	100	174	100	184	100	195	100	206	100	222	
30.6. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	100	455	100	481	100	509	100	540	100	580	
30.7. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	94,17	95	174	95	184	95	195	95	206	95	222	
30.8. Program Administrasi Pembangunan	Persentase efektivitas Kebijakan	100	100	174	100	184	100	195	100	206	100	222	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
	Administrasi Pembangunan												
31. Unsur Sekretariat DPRD				35.432		37.456		39.607		42.012		45.170	
31.1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD	100	100	35.432	100	37.456	100	39.607	100	42.012	100	45.170	Sekretariat DPRD
4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				490.062,43		518.451,70		547.114,43		581.952,56		625.108,94	
32. Unsur Perencanaan				12.669,07		13.393,69		14.162,97		15.023,11		16.151,14	
32.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72,45 (BB)	74,00 (BB)	9.988,07	76,00 (BB)	10.558,69	78,00 (BB)	11.164,97	80,05 (A)	11.843,11	80,25 (A)	12.733,14	Perencanaan
32.2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	781	100	826	100	874	100	927	100	996	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
32.3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	1.900	100	2.009	100	2.124	100	2.253	100	2.422	
33. Unsur Keuangan				377.426,46		398.990,03		421.899,52		447.524,71		481.157,72	
33.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79,25 (BB)	79,40 (BB)	52.923,46	79,50 (BB)	55.947,03	80,50 (A)	59.159,52	80,75 (A)	62.752,71	80,90 (A)	67.468,72	Keuangan
33.2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	319.290	100	337.532	100	356.913	100	378.591	100	407.043	
33.3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5 (3,262 T)	5 (3,425 T)	1.825	5 (3,596 T)	1.929	5 (3,776 T)	2.040	5 (3,964 T)	2.164	5 (4,163 T)	2.327	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
33.4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,70	38	3.388	39	3.582	40	3.787	41	4.017	42	4.319	
34. Unsur Kepegawaian				10.641,31		11.248,71		11.895,07		12.617,79		13.565,54	
34.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79,25 (BB)	79,50 (BB)	8.391,31	80,15 (A)	8.870,71	80,25 (A)	9.380,07	80,50 (A)	9.949,79	80,75 (A)	10.697,54	Kepegawaian
34.2. Program Kepegawaian Daerah	Indeks Merit Sistem	0,71	0,76	2.250	0,77	2.378	0,78	2.515	0,79	2.668	0,80	2.868	
35. Unsur Pendidikan dan Pelatihan				3.757		3.972		4.200		4.455		4.790	
35.1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	64,24	57,20	3.757	58,30	3.972	59,40	4.200	60,50	4.455	61,60	4.790	Pendidikan dan Pelatihan
36. Unsur Penelitian dan Pengembangan				7.400,08		7.822,84		8.272,15		8.773,74		9.433,83	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
36.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72,45 (BB)	74,45 (BB)	3.794,08	75,45 (BB)	4.010,84	76,45 (BB)	4.241,15	77,45 (BB)	4.498,74	78,45 (BB)	4.836,83	Penelitian dan Pengembangan
36.2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	100	100	3.376	100	3.569	100	3.774	100	4.003	100	4.304	
36.3. Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100	100	230	100	243	100	257	100	272	100	293	
37. Unsur Pengawasan				40.852,34		43.576,22		44.970,38		49.310,09		52.437,59	
37.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75 (BB)	76,50 (BB)	18.617,17	78,50 (BB)	19.680,79	80,50 (A)	20.810,86	82,50 (A)	22.074,86	85 (A)	23.733,83	Pengawasan
37.2. Program Penyelenggara n Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100	100	18.617,17	100	20.070,43	100	20.115,52	100	22.945,23	100	24.091,76	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
37.3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	100	3.618	100	3.825	100	4.044	100	4.290	100	4.612	
	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	100	100		100		100		100		100		
38. Unsur Pemerintahan Umum				11.056,78		11.688,43		12.360,16		13.111,37		14.096,14	
38.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	5.069,78	76 (BB)	5.359,43	77 (BB)	5.667,16	78 (BB)	6.011,37	79 (BB)	6.463,14	Pemerintahan Umum
38.2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	2.400	100	2.537	100	2.683	100	2.846	100	3.060	
38.3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan	Persentase Pendidikan Politik pada	100	100	3.106	100	3.284	100	3.472	100	3.683	100	3.960	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kader Partai Politik												
38.4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	101	100	107	100	113	100	120	100	129	
38.5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	5	100	5	100	6	100	6	100	6	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
38.6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang terselesaikan	100	100	375	100	396	100	419	100	445	100	478	
39. Unsur Kewilayahan				41.026,56		43.370,57		45.861,04		48.646,61		52.302,81	
39.1. Program Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu- paten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	40.188,56	76 (BB)	42.484,57	77 (BB)	44.924,04	78 (BB)	47.652,61	79 (BB)	51.233,81	Kewilayahan
39.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100	100	543	100	574	100	607	100	644	100	693	
39.3. Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100	100	295	100	312	100	330	100	350	100	376	
39.4. Program Penyelenggaraa n Pemerintahan	Persentase terselenggaranya pemerintahan	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif (dalam juta) Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang
			2026		2027		2028		2029		2030		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
dan Pelayanan Publik	dan pelayanan publik												
39.5. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	
39.6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase terselenggaranya pemerintahan desa	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut IKU Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2030.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	79,02	79,65	80,28	80,91	81,54	82,17
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,64	75,82	76,01	76,19	76,38	76,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	1,75	1,65	1,55	1,35	1,25	1,10
4	Prevalensi Stunting	Persentase	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,50	97,25	97,75	98,25	98,50	98,75
6	Tingkat Kemiskinan	Persentase	4,1	3,85	3,65	3,45	3,15	2,75
7	Indek Gini	Angka	0,300	0,299	0,298	0,297	0,296	0,295
8	PDRB Perkapita	Rupiah/Tahun	60.784,84	63.257,91	65.730,98	68.204,04	70.677,11	73.150,18
9	Rasio Wirausaha	Persentase	3,28	3,63	3,94	4,21	4,44	4,64
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	22,51	22,71	22,91	23,11	23,31	23,51
11	Indek Ketahanan Pangan	Angka	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50
12	Ketersediaan Pangan Pemerintah	Angka	30,00	41,00	52,00	63,00	74,00	85,00
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,00	5,25	5,45	5,65	5,85	6,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Indeks Infrastruktur	Angka	70,87	72,59	74,56	76,52	78	78,75
15	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,50	4,15	4,50	4,75	4,95	5,00
16	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	65,5 (Sangat Inovatif)	66 (Sangat Inovatif)	67 (Sangat Inovatif)	68 (Sangat Inovatif)	69 (Sangat Inovatif)	70 (Sangat Inovatif)
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	73,38	74,18	76,11	77,03	78,11	79,22
18	Indeks SPBE	Angka	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,80
19	Angka Kriminalitas	Kasus/Tahun	138	134	130	126	121	117
20	Nilai Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Angka	90	92	94	96	98	100
21	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	73,17	73,38	73,59	73,80	74,01	74,22

5. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penentuan target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditentukan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berikut Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2030.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persentase	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	756,94	792,65	828,36	864,07	899,78	935,49
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persentase	72,63	74	75,38	76,74	78,10	79,47
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	71	71,95	72,9	73,85	74,8	75,75
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	50	52,5	55	57,5	60	62,5
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	45	47,75	50,05	53,25	56	58,75
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	33,83	37,14	40,45	43,76	47,06	50,37
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persentase	16,5	20,68	24,85	29,03	33,2	37,38
11	Indeks Risiko Bencana	Angka	119,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,32	0,5	0,75	0,9	1,1	1,5
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,00	5,25	5,45	5,65	5,85	6,00
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase	4,1	3,15	3,00	2,85	2,75	2,50
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	63,056	66,989	70,922	74,855	78,788	82,721
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	2	1,93	1,85	1,78	1,7	1,63
5	Indeks Gini	Angka	0,300	0,299	0,298	0,297	0,296	0,295
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,02	79,65	80,28	80,91	81,54	82,72
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75	76,35	76,65	76,95	77	77,5
8	Prevalensi Stunting	Persentase	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,71	9,85	9,99	10,13	10,27	10,41
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,05	13,2	13,35	13,5	13,64	13,79

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Angka Literasi / Numerasi	Persentase	98-100	98-100	98-100	99-100	99-100	99-100
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase	67,54	69,76	70,61	72,15	73,67	75,67
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	80	80,5	81	81,5	82	82,5
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	77	78,15	79,3	80,45	81,6	82,75
15	Indeks Perlindungan Anak	Angka						
16	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	75	75,25	75,5	75,75	76	76,25
17	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
18	Rasio Pembangunan Pemuda	Angka	38,46	46,15	53,85	61,54	69,23	76,92
19	Jumlah Kematian Ibu	Angka	4	4	4	4	4	3
20	Jumlah Kematian Balita	Angka	68	68	68	68	68	67
21	Cakupan Imunisasi lengkap	Persentase	100	100	100	100	100	100
22	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberculosis	Persentase	83	85	87	90	90	90
III ASPEK DAYA SAING								
1	Angka Ketergantungan	Persentase	42,10	45,25	47,50	49,12	51,50	52,70
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persentase	7,06	7,22	7,38	7,54	7,7	7,86
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persentase	21,96	22,67	23,37	24,08	24,78	25,49
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persentase	9,1	9,4	9,69	9,99	10,28	10,58
5	Rasio Kewirausahaan	Persentase	0,25	0,26	0,28	0,29	0,3	0,31
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	72	72,9	73,8	74,7	75,6	76,5
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	65,50 (Sangat Inovatif)	66,00 (Sangat Inovatif)	67,00 (Sangat Inovatif)	68,00 (Sangat Inovatif)	69,00 (Sangat Inovatif)	70,00 (Sangat Inovatif)
9	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	105	106	107	108	109	110
10	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	60,50	61,48	61,95	62,35	62,76	63,29
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta Rupiah	21	21	21	22	22	22
12	Ekspor Barang dan Jasa	Juta Rupiah	10	10,75	11,5	12,25	13	13,75
13	Indeks Infrastruktur / Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	80	82	85	90	92	98
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	45	47,75	50,05	53,25	56	58,75
15	Persentase Desa Mandiri	Persentase	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persentase	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
17	Tingkat Inflasi	Persentase	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	4,50	4,55	4,63	4,74	4,87	5,58
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98	98	98	98	98	99
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,80	3,84	3,87	3,91	3,94	3,98
3	Indek Pelayanan Publik	Angka	4	4	4	4	4	4
4	Indeks Integritas Daerah	Angka	78,00 (Waspada)	79,00 (Waspada)	80,00 (Terjaga)	80,50 (Terjaga)	80,70 (Terjaga)	81,00 (Terjaga)
5	Persentase Penegakan Perda	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Persentasi Capaian Aksi HAM	Persentase	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Persentase	83,21	83,55	83,89	84,23	84,57	84,91
9	Indeks Rasa Aman	Angka	90	90,5	91	91,5	92	92,5
10	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	50	55	60	65	70	75
11	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,50	4,15	4,50	4,95	5,25	5,50

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih yang penjabarannya dituangkan dalam tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan termasuk indikasi program dan kerangka pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045.

Tahapan dan sistematika Penyusunan RPJMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Sebagaimana ketentuan dalam pedoman tersebut, proses penyusunan RPJMD saat ini telah melalui tahapan konsultasi publik, dan kesepakatan dengan DPRD untuk menetapkan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. Dalam tahap penyusunan rancangan akan disempurnakan kembali hasil koreksi pada tahap penyusunan rancangan awal. Kemudian juga dipertegas kembali pemetaan tanggung jawab perangkat daerah terhadap target indikator untuk dituangkan dalam rancangan rencana strategis (renstra) masing-masing perangkat daerah. Selain itu proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan prioritas masyarakat, serta mencerminkan kondisi, sosial, ekonomi dan budaya Tabanan.

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan monitoring secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan periode berikutnya. Pada masa transisi dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029, untuk program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, dan mengawal terwujudnya Tabanan yang **Aman, Unggul dan Madani**.

